



P U T U S A N

Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bonaventura Dwi Windu
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 4 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tebet Timur III N / 5 RT. 008 RW.07, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Bonaventura Dwi Windu ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Wisnu Wardhana, SH, Muhammad Ficky Mashudin, SH dan Gilang Ramadhan, SH, Advokat, pada kantor hukum Wisnu Wardhana & Partners, beralamat kantor di Komp. BBD Blok D2/31, Ciganjur, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BONAVENTURA DWI WINDU** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dibidang perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana **Dakwaan Kedua** Pasal 39 ayat (1) huruf dJo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **BONAVENTURA DWI WINDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana penjara selama **5(lima)** tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membayar denda sebesar 2 (dua) x Rp.24.530.398.589,- = Rp 49.060.797.178,- dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama **6(enam)** bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.		Penetapan Pengadilan Nomor : 267/Pen.Pid/2019/PN.Tjk tanggal 25 Februari 2019
	PRIN-10.SITA/PJ.05/2019 tanggal 15 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none">1) Fotocopy Print Out SI DJP Penyampaian SPT PPN PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 Masa Januari 2013 s.d. Desember 2015 sebanyak 3 (tiga) lembar2) Fotocopy SPT PPN Masa Pebruari s.d. Juni 2013 dan Agustus s.d. Desember 2013 Normal dan Pembetulan PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) set3) Fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. Desember 2014 Normal dan Pembetulan PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) set4) Fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. Agustus 2015 Normal dan Pembetulan PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 10 (sepuluh) set5) Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar NPWP No. PEM-00030/WPJ.28/KP.0303/2013 a.n. PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 1 (satu) lembar6) Fotocopy Surat Pengukuhan PKP No. PEM-00044/WPJ.28/KP.0303/ 2013 tanggal 15 Januari 2013 a.n. PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 1 (satu) lembar7) Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi PKP NO. LHV-04/WPJ.28/KP.03/2012 sebanyak 5 (lima) lembar8) Fotocopy Print Out SI DJP Kewajiban Perpajakan a.n. PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 1 (satu) lembar
2.		Penetapan Pengadilan Nomor : 358/Pen.Pid/2019/PN Bdg tanggal 15 Maret 2019
	PRIN-14.SITA/PJ.05/2019 tanggal 18 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none">1) Fotokopi Rekening Koran BCA Nomor 7360261446 a.n. ABDUL CHALID, S.E sebanyak 1 (satu) set2) Fotokopi buku catatan penjualan faktur sebanyak 1 (satu) set
3.		Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 16 April 2019
	PRIN-17.SITA/PJ.05/2019 tanggal 20 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none">1) Fotocopy Legalitas PT OCEAN PETRO ENERGY tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set2) Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 14453K/10DJM.O/2009 sebanyak 1 (satu) set3) Fotocopy Kuasa Usaha No. 021/SKU-SMD/OPETRO/XI/2012 sebanyak 1 (satu) set4) Fotocopy Kuasa Usaha No. 072/SKU-LMP/OPETRO/IV/2016 sebanyak 1 (satu) set
4.		Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 16 April 2019
	PRIN-20.SITA/PJ.05	<ol style="list-style-type: none">1) Fotocopy Draft Laporan Penjualan PT Ocean Petro Energy Cab. Lampung bulan Pebruari-Mei dan Oktober-Desember

Halaman 3 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2/2019 tanggal 19 Maret 2019	<p>tahun 2013 sebanyak 7 (tujuh) lembar</p> <p>2) Fotocopy Draft Laporan Penjualan PT Ocean Petro Energy Cab. Lampung bulan Januari-Pebruari tahun 2014 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>3) Fotocopy Draft Laporan Penjualan PT Ocean Petro Energy Cab. Lampung bulan Januari-Pebruari dan Agustus tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) lembar</p> <p>4) Fotocopy SPT PPN Masa Pebruari s.d. Juni dan Oktober s.d. Desember tahun 2013 status Normal dan Pembetulan 1, 2 dan 3 sebanyak 21 (dua puluh satu) set</p> <p>5) Fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. Desember tahun 2014 status Normal dan Pembetulan 1, 2, 3, 4 dan 5 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) set</p> <p>6) Fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. Desember tahun 2015 status Normal dan Pembetulan 1 sebanyak 17 (tujuh belas) set</p> <p>7) Fotocopy Faktur Pajak No.010001-14.82249113, Invoice dan Surat Jalan No. 9113/MPS/I/06/2014 sebanyak 3 (tiga) lembar</p> <p>8) Fotocopy Print Out Email dr herwinopetro@gmail.com ke Opetro Lampung perihal Faktur IN OPE Lampung bulan Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>9) Fotocopy Print Out Email dr herwinopetro@gmail.com ke Opetro Lampung perihal Faktur IN OPE Lampung bulan Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>10) Fotocopy Faktur Pajak Masukan PT Ocean Petro Energy bulan Mei 2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>11) Fotocopy Faktur Pajak Masukan PT Ocean Petro Energy bulan Juni 2015 sebanyak 1 (satu) set</p>
5.		Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 16 April 2019
	PRIN-23.SITA/PJ.05 2/2019 tanggal 20 Maret 2019	<p>1) Fotocopy Print Out Rekening Koran No. 5425011666 a.n. Bonaventura Dwi Windu tgl. 29-Mar-2010 sd 16-Des-2016 sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar</p> <p>2) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.001) bulan Januari 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>3) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.001) bulan Pebruari 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>4) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.001) bulan Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>5) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.001) bulan April 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>6) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>7) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>8) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT</p>

Halaman 4 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



		<p>Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>9) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>10) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan September 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>11) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>12) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Nopember 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>13) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>14) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>15) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Pebruari 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>16) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy bulan Maret 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>17) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan April 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>18) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Mei 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>19) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Juni 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>20) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Juli 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>21) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>22) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan September 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>23) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set</p>
6.		Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 16 April 2019
	PRIN-38.SITA/PJ.052/2019 tanggal 2 April 2019	<p>1) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00210/WPJ.04/KP.0403/2013 sebanyak 1 (satu) lembar</p> <p>2) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00585/WPJ.04/KP.0403/2013 sebanyak 1 (satu) lembar</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ol style="list-style-type: none">3) Fotokopi Surat Permintaan Sertifikat Elektronik Nomor 079/ADM-TAX/OPETRO/VI/2015 sebanyak 1 (satu) set4) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak September 2011 sebanyak 1 (satu) set5) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Oktober 2011 sebanyak 1 (satu) set6) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak November 2011 sebanyak 1 (satu) set7) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Desember 2011 sebanyak 1 (satu) set8) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Januari 2012 sebanyak 1 (satu) set9) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Februari 2012 sebanyak 1 (satu) set10) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2012 sebanyak 1 (satu) set11) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak April 2012 sebanyak 1 (satu) set12) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Mei 2012 sebanyak 1 (satu) set13) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Juni 2012 sebanyak 1 (satu) set14) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Juli 2012 sebanyak 1 (satu) set15) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Juli 2012 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set16) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Agustus 2012 sebanyak 1 (satu) set17) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak September 2012 sebanyak 1 (satu) set18) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) set19) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak November 2012 sebanyak 1 (satu) set20) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Desember 2012 sebanyak
--	--	---

Halaman 6 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



		1 (satu) set
		21) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Januari 2013 sebanyak 1 (satu) set
		22) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Februari 2013 sebanyak 1 (satu) set
		23) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set
		24) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak April 2013 sebanyak 1 (satu) set
		25) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak April 2013 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		26) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set
		27) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set
		28) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juni 2013 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		29) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set
		30) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juli 2013 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		31) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set
		32) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak September 2013 sebanyak 1 (satu) set
		33) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set
		34) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak November 2013 sebanyak 1 (satu) set
		35) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set
		36) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set
		37) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Februari 2014 sebanyak 1 (satu) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		38) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2014 sebanyak 1 (satu) set
		39) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak April 2014 sebanyak 1 (satu) set
		40) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Mei 2014 sebanyak 1 (satu) set
		41) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juni 2014 sebanyak 1 (satu) set
		42) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juli 2014 sebanyak 1 (satu) set
		43) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) set
		44) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak September 2014 sebanyak 1 (satu) set
		45) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set
		46) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Oktober 2014 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		47) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak November 2014 sebanyak 1 (satu) set
		48) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set
		49) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2014 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		50) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Januari 2015 sebanyak 1 (satu) set
		51) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Januari 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		52) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Februari 2015 sebanyak 1 (satu) set
		53) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Februari 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		54) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2015 sebanyak 1 (satu) set
		55) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP

Halaman 8 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>56) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak April 2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>57) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Mei 2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>58) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juni 2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>59) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juli 2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>60) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>61) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak September 2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>62) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Oktober 2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>63) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak November 2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>64) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak November 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set</p> <p>65) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>66) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set</p>
7.		Penetapan Pengadilan Nomor : 1655/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 09 Juli 2019
		<p>1) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-8670/WPJ.14/KP.1303/2009 tanggal 01 April 2009 sebanyak 1 (satu) lembar</p> <p>2) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-880WPJ.14/KP.1303/2009 tanggal 22 Juli 2009 sebanyak 1 (satu) lembar</p> <p>3) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-03208/WPJ.04/KP.1203/2009 tanggal 13 November 2009 sebanyak 1 (satu) lembar</p> <p>4) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-03256WPJ.04/KP.1203/2009 tanggal 13 November 2009 sebanyak 1 (satu) lembar</p>

Halaman 9 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti Nomor Urut 1 dan 4 dikembalikan kepada Penyidik PPNS DJP Pusat, sedangkan Nomor Urut 2,3,5,6 dan 7 dipergunakan dalam berkas perkara atas nama EDWYN NOOR LODAYANA.

7. Menetapkan agar Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA BONAVENTURA DWI WINDU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan TERDAKWA BONAVENTURA DWI WINDU oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu tersebut di atas;
3. Menyatakan TERDAKWA BONAVENTURA DWI WINDU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 39 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;;
4. Membebaskan TERDAKWA BONAVENTURA DWI WINDU oleh karena itu dari Dakwaan Kedua tersebut di atas;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera mengeluarkan/membebasan TERDAKWA Bonaventura Dwi Windu dari rumah tahanan negara Cipinang;
6. Memulihkan hak-hak TERDAKWA BONAVENTURA DWI WINDU baik dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

TERDAKWA sepenuhnya memohon kebijaksanaan dan kemurahan hati dari yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *a quo* dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan,

Halaman 10 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, kebenaran dan rasa kemanusiaan, dengan mempertimbangkan posisi TERDAKWA yang hanya menjalankan perintah atasan yang hanya berperan melakukan pembayaran jasa.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya diberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) seringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

-----Bahwa Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU bersama-sama dengan Saksi EDWYN NOOR LODAYANA, Saksi BANDIYO, Saksi BUDI SATRIO, Saksi A FEN dan Saksi ABDUL CHALID alias TENGKU yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada kurun waktu antara Januari 2011 sampai dengan Desember 2015 bertempat di Jl. Wolter Monginsidi No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Komplek Polri Jl. A No. 43 Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tahun 2011 Saksi EDWYN NOOR LODAYANA sebagai Direktur PT. OCEAN PETRO ENERGY diperkenalkan kepada Saksi BUDI SATRIO oleh Saksi R.S. HADI SANTOSO alias SONY sebagai Konsultan Pajak yang akan membantu perusahaan dalam melaporkan kewajiban perpajakan di PT. OCEAN PETRO ENERGY. Pada saat itu Saksi BUDI SATRIO menawarkan Faktur Pajak yang dapat digunakan

Halaman 11 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurangi nilai PPN yang harus disetor ke Negara dan menjamin bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut "AMAN" dan tidak akan dicurigai oleh pihak Kantor Pajak.

- Bahwa atas penawaran 'Faktur Pajak Masukan' dari Saksi BUDI SATRIO tersebut, Saksi EDWYN NOOR LODAYANA memutuskan untuk menerima penawaran tersebut, namun untuk teknis pemesanan faktur pajaknya diserahkan kepada Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU. Pemesanan faktur pajak melalui Saksi BUDI SATRIO dan Saksi ABDUL CHALID alias TENGKU oleh Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU tersebut awal mulanya untuk digunakan di PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Surabaya dan kemudian dilanjutkan untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Pusat dan PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Jakarta Ampera serta PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Lampung.
- Bahwa PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Pusat, Kantor Cabang Jakarta Ampera dan Kantor Cabang Lampung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (solar) untuk industri yang mempunyai kewajiban perpajakan karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga setiap melakukan penyerahan barang dan/atau jasa wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli, selain itu juga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya.
- Bahwa pemesanan faktur pajak dari Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Pusat dan PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Jakarta Ampera, serta Cabang PT. OCEAN PETRO ENERGY Lampung dilakukan dengan proses pemesanan sebagai berikut :
 - Untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Pusat dan Kantor Cabang Jakarta Ampera, Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU melalui stafnya yang bernama HERWING alias EWING (telah meninggal dunia) mengirimkan rekapitulasi penjualan melalui email (surat elektronik) yang bersangkutan yaitu herwinopetro@gmail.com ke alamat email Saksi BUDI SATRIO di bsatrio66@yahoo.com dan s.tama66@yahoo.com. Selain melalui BUDI SATRIO, pemesanan juga dilakukan melalui alamat email Saksi A FEN yang merupakan karyawan konsultan pajak dari Saksi BUDI SATRIO di alamat

Halaman 12 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

afenkonsult@yahoo.com. Kemudian oleh Saksi BUDI SATRIO, email tersebut diteruskan kepada Saksi ABDUL CHALID alias TENGKU. Setelah Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU mengirimkan email kepada Saksi BUDI SATRIO kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BUDI SATRIO untuk mengabarkan pesanan Faktur Pajak yang telah dikirimnya tersebut, namun sejak Pebruari 2015, pemesanan faktur pajak dikirimkan langsung ke saksi ABDUL CHALID alias TENGKU di alamat email cantik.geulis@yahoo.com dan setelah itu Terdakwa juga menginformasikan pemesanan fakturnya tersebut kepada Saksi ABDUL CHALID alias TENGKU.

- Pemesanan faktur pajak kepada Saksi BUDI SATRIO maupun kepada Saksi ABDUL CHALID alias TENGKU tersebut dengan harga sebesar 40 % dari nilai PPN, sedangkan yang 60 % dari nilai PPN dibagi-bagikan oleh Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU kepada Saksi EDWIN NOOR LODAYANA, Saksi R.S. HADI SANTOSO alias SONY dan Saksi ARIE KENDALISADA. Seluruh faktur pajak yang dipesan oleh Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU kepada Saksi BUDI SATRIO dan saksi ABDUL CHALID alias TENGKU dikirim melalui TIKI atau melalui kurir ke Kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY.
- Pembayaran faktur pajak oleh Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU kepada Saksi BUDI SATRIO dilakukan dengan cara transfer atau setor tunai ke rekening saksi A FEN di Bank BCA Nomor Rekening a/c 7130363321, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, sedangkan untuk tahun 2015, oleh karena pemesanan faktur pajaknya langsung kepada Saksi ABDUL CHALID, maka pembayaran fakturnya ditujukan ke rekening Bank Mandiri atas nama ABDUL CHALID No. Rek. 1330012451910 dan rekening BCA atas nama PERMANA SAPUTRA.
- Bahwa faktur pajak yang diperoleh dari Saksi BUDI SATRIO dan Saksi ABDUL CHALID telah digunakan atau dikreditkan dalam Laporan SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Pusat NPWP 02.869.782.9-012.000 dan PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Jakarta NPWP 02.869.782.9-012.001, dan PT. OCEAN PETRO ENERGY Cabang Lampung, namun fakta sebenarnya faktur pajak tersebut adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena tidak berdasarkan transaksi yang riil atau tidak ada penyerahan barang

Halaman 13 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjual kepada pembeli yang artinya hanya jual beli Nomor Faktur Pajak dan/atau Kertas Faktur Pajak saja.

- Adapun rincian Faktur Pajak yang telah digunakan/dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh PT OCEAN PETRO ENERGY sebagai berikut :

1. Kantor Pusat, Tahun 2013 – 2014 :

No	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	PT ABADI TATA NUSANTARA	02.727.026.3-432.000	2014	165,757,708
2	PT ABADISAPTA DUDAUNI ANUGRAH	03.326.495.3-009.000	2014	48,112,512
3	PT ANDIN PERMATA JAYA	66.896.500.7-407.000	2014	199,181,200
4	PT ANGKASA ENGGIH BLITAR	03.332.063.1-005.000	2014	61,500,000
5	PT APRIL SUKSES ABADI	03.312.908.1-008.000	2013	323,694,137
6	PT ARUS BANGUNAN	03.345.244.2-411.000	2014	123,058,606
7	PT ARWANA MERAH BERJAYA	03.288.377.9-027.000	2013	68,209,880
8	PT BAHANA KASTA RANCAMAYA	66.815.510.4-016.000	2014	98,928,576
9	PT BARU SEMPURNA	66.312.872.6-411.000	2014	80,645,526
10	PT BERKAT MULIA LESTARI	03.247.218.5-008.000	2013	344,518,115
11	PT BERKAT MULIA LESTARI	03.247.218.5-008.000	2014	63,656,600
12	PT CAHAYA AGUNG FURNITURE	03.345.229.3-411.000	2014	8,739,000
13	PT CAHAYA MARMER ABADI	03.343.171.9-411.000	2014	131,146,400
14	PT CENTRAL MAKMUR AGROTAMA	03.268.241.1-008.000	2013	158,388,878
15	PT CENTRAL MAKMUR AGROTAMA	03.268.241.1-008.000	2014	69,712,100
16	PT CILENGGANGANG INDAH ALUMINIUM	66.309.736.8-411.000	2014	127,564,850
17	PT DONINDO MEGAH PRATAMA	66.575.297.8-005.000	2014	214,050,794
18	PT FAJAR SERPONG MANDIRI	66.312.878.3-411.000	2014	62,782,000
19	PT FURINDO CIPTA	66.303.687.9-411.000	2014	197,777,018
20	PT GARUDA MEKAR BERJAYA	03.269.281.6-027.000	2013	124,312,173
21	PT GRACIA DEO PERMATA	66.896.458.8-407.000	2014	60,574,917
22	PT GUNUNG SEWU PERMAI	66.802.652.9-016.000	2014	156,571,810
23	PT HAMPARAN KOLODAUL MAKSIMA	03.326.494.6-009.000	2014	55,490,600
24	PT HARUM NINTRA JAYA	72.102.714.2-411.000	2014	206,166,280
25	PT HIKARI BUANA TATAN	66.171.532.6-017.000	2014	195,455,500
26	PT ILAX SARANA UTAMA	66.848.866.1-407.000	2014	122,607,514
27	PT KARISMA GEMILANG	03.268.102.5-008.000	2013	139,333,000
28	PT KARISMA GEMILANG	03.268.102.5-008.000	2014	69,895,680
29	PT KARYA LOGAM TEKNO	03.343.174.3-411.000	2014	52,242,430
30	PT KEMBANG KIRANA	03.345.224.4-411.000	2014	90,278,480
31	PT KHARISMA PELANGI NUSANTARA	03.269.275.8-027.000	2013	157,100,911
32	PT KHATULISTIWA NUSANTARA	03.269.276.6-	2013	168,512,320

Halaman 14 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JAYA	027.000		
33	PT KINANTI BULAN PURNAMA	03.269.279.0-027.000	2013	143,697,210
34	PT KURNIA BINTANG SUKSES	02.727.074.3-432.000	2014	191,667,490
35	PT LOGAM INDOMITRA JAYA	03.247.220.1-008.000	2013	174,098,550
36	PT MAHARAYA TECHNIC INDONESIA	03.288.385.2-027.000	2013	59,276,400
37	PT MARAHA ANUGRAH BINTANG	66.168.090.0-017.000	2014	422,829,807
38	PT MEGARAYA AGUNG JAYA	03.268.240.3-008.000	2013	296,958,170
39	PT MEGARAYA AGUNG JAYA	03.268.240.3-008.000	2014	209,305,640
40	PT MEXTRANDO PRODIATAN	66.640.241.7-407.000	2014	14,489,600
41	PT MITRA PLUS SEJATI	66.848.710.1-407.000	2014	216,553,557
42	PT MULAJADI JAYA	03.323.112.7-045.000	2014	3,660,000
43	PT MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	2013	329,623,922
44	PT MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	2014	202,619,557
45	PT MULTI GLOBAL INTERNATIONAL	02.832.519.9-027.000	2013	85,289,034
46	PT MULYA RAYA	03.345.225.1-411.000	2014	192,908,009
47	PT MURNI JAYA PRIMA	66.789.379.6-412.000	2014	98,736,267
48	PT NAAFI JAYA UTAMA	03.345.226.9-411.000	2014	79,119,560
49	PT NUNATA SARANA SERVICE	03.345.201.2-411.000	2014	318,438,312
50	PT PADANAN CIPTA NUSA	66.890.175.4-407.000	2014	243,045,884
51	PT PANCARAN RADAYA	66.642.751.3-407.000	2014	81,807,596
52	PT PANDA ALAM KHATULISTIWA	03.288.386.0-027.000	2013	64,899,618
53	PT PANJI MEGA SENTOSA	03.312.904.0-008.000	2013	249,348,798
54	PT PARAGAN BITUAL TITAMA	03.332.064.9-005.000	2014	64,601,570
55	PT PRAMBANAN LAKSANA	66.794.214.8-412.000	2014	81,245,600
56	PT PUTRA PAJAJARAN TEHNIK	66.309.739.2-411.000	2014	61,215,324
57	PT RAWINTA BRAMA BERSINAR	03.335.009.1-017.000	2014	65,638,065
58	PT RINJANI BINTANG ABADI	03.224.265.3-008.000	2013	177,547,200
59	PT ROMEO CITRA LESTARI	03.333.585.2-009.000	2014	120,847,215
60	PT ROMEO WIBISANA INDONESIA	03.312.905.7-008.000	2013	197,128,336
61	PT SARINAH MULIA	03.224.265.3-008.000	2014	115,792,110
62	PT SECAMBAH ANUGERAH	03.333.585.2-009.000	2014	97,740,000
63	PT SEDANAN ABADILOKA	03.312.905.7-008.000	2014	264,191,712
64	PT SEJUTA KARYA MANDIRI	03.224.265.3-008.000	2014	208,177,260
65	PT SEMANGAT JAYA	66.307.188.4-411.000	2014	255,821,520
66	PT SUANTAPUI PRATAMA INDAH	66.871.170.8-407.000	2014	178,281,868
67	PT SUNDEYEN PRAKARSA	66.628.284.3-407.000	2014	243,319,864
68	PT SURYA SENTOSA	66.307.102.5-411.000	2014	273,448,923
69	PT TATA SURYA KENCANA	03.345.203.8-411.000	2014	141,622,474
70	PT TEKNO LISTRIK	03.343.173.5-	2014	61,550,400

Halaman 15 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		411.000		
71	PT TIRTA BAROKAH NUSANTARA	66.896.485.1-407.000	2014	169,280,140
72	PT USAHA MITRA BERSAMA	03.268.103.3-008.000	2013	175,273,693
73	PT VADILTAMA GAPSONINDO	03.315.697.7-017.000	2014	284,182,235
74	PT VIELTA	03.345.227.7-411.000	2014	162,833,800
75	PT XOIXE KARYA TAMA	66.890.242.2-407.000	2014	66,944,000
	Grand Total			11,291,021,805

2. Kantor Pusat, Tahun 2015 :

N o	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	ARWANITO SEMBADA	72.184.141.9-411.000	2015	49,851,820
2	PT AGUNG MAKMUR TERBANGGI	66.794.326.0-412.000	2015	52,162,515
3	PT AMANAH GLOBAL PERSADA JAYA	72.789.181.4-411.000	2015	635,737,753
4	PT ARWANITO SEMBADA	72.184.141.9-411.000	2015	50,009,225
5	PT BEJANA PUTERA KHATULISWA	72.789.222.6-411.000	2015	721,834,566
6	PT BERSAMA LAKSANA CIPTA	72.190.023.1-411.000	2015	81,975,454
7	PT BUNGA SARI ALAMANDA	72.190.139.5-411.000	2015	164,076,959
8	PT GEMAR NIAGA	03.350.994.4-045.000	2015	14,492,000
9	PT HARORO BUANA NUSANTARA	72.789.203.6-411.000	2015	719,444,488
10	PT HARUM BINTANG SEJATI	72.102.714.2-411.000	2015	122,566,500
11	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	72.183.557.7-411.000	2015	339,144,411
12	PT HARWAN DWI PERKASA	72.109.919.0-411.000	2015	228,293,493
13	PT HUMALA PERSADA JAYA	72.789.242.4-411.000	2015	50,578,184
14	PT JANUR HANKAM SEJATI	70.089.413.2-412.000	2015	214,990,464
15	PT KASTURI INDO WIDURI	70.113.797.8-412.000	2015	59,400,000
16	PT KAYU RINGAN PERSADA	70.113.439.7-412.000	2015	79,627,270
17	PT KHARISMA BERDIKARI JUJUNAN	72.110.007.1-411.000	2015	169,667,555
18	PT LAKSANA PRAGA INDO	72.183.443.0-411.000	2015	96,216,000
19	PT MAHATA SENTOSA	72.190.210.4-411.000	2015	100,180,950
20	PT MANGGALA BRAGA BAJA	72.115.946.5-411.000	2015	115,009,439
21	PT MATUMONA INDAH KARYA	72.740.882.5-411.000	2015	41,995,185
22	PT METALINDO MAKSIMA	66.792.343.7-016.000	2015	57,866,494
23	PT NUSA BENING	03.314.854.5-045.000	2015	71,578,187
24	PT OBETO RAGAM CAHAYA	72.189.947.4-411.000	2015	265,427,353
25	PT PERDANA SIANITA	70.113.754.9-412.000	2015	176,209,943
26	PT RAMA KIANI RAYA	66.815.699.5-016.000	2015	52,636,360
27	PT RUMBANA SAKTI	70.113.495.9-412.000	2015	46,499,712
28	PT SAOPHAR PESANGGRAHAN	66.788.884.6-412.000	2015	74,659,215
29	PT SUKABUMI RAIHAN	72.184.187.2-411.000	2015	50,707,712

Halaman 16 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	PT SUKAMULYA PERKASA DANA	70.113.700.2-412.000	2015	135,793,340
31	PT TENSA BERKARYA GLOBAL	72.789.256.4-411.000	2015	729,921,560
32	PT ULUWATI PARATOL	72.109.941.4-411.00	2015	290,762,485
33	PT WAHYU RINGAN SELARAS	70.096.019.8-412.000	2015	138,848,244
	GRAN TOTAL			6,198,164,836

3. Kantor Cabang Jakarta Tahun 2011 – 2013 :

N o	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	PT BESINDO INDOTAMA RAYA	31.432.373.4-008.000	2012	109,386,674
2	PT BUMI REJO KONSTRUKSINDO	31.365.602.7-018.000	2011	44,199,329
3	PT BUMI REJO PERKASA	31.365.601.9-018.000	2011	12,320,000
4	PT CAKRA DAYA MANUNGGAL	31.432.512.7-008.000	2012	18,799,000
5	PT GARUDA MEKAR BERJAYA	03.269.281.6-027.000	2013	119,794,761
6	PT GARUDA MEKAR BERJAYA	03.269.281.6-027.000	2013	32,601,924
7	PT KARIMATA PRATAMA MANDIRI	31.422.376.9-027.000	2012	99,928,944
8	PT KHARISMA PELANGI NUSANTARA	03.269.275.8-027.000	2013	109,680,288
9	PT KHATULISTIWA NUSANTARA JAYA	03.269.276.6-027.000	2013	144,225,853
10	PT KINANTI BULAN PURNAMA	03.269.279.0-027.000	2013	155,491,665
11	PT MITRA SARANA JAYA	03.098.903.2-027.000	2011	44,134,497
12	PT MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	2013	30,362,818
13	PT RODA HIDUP SEMESTA	02.979.415.3-014.000	2012	31,418,136
14	PT SINAR BERKAH ENERGI	03.078.055.5-086.000	2012	13,417,891
15	PT SUKARAMAI INDAH JAYA	31.445.705.2-022.000	2012	149,826,004
16	PT TRIMITRA INTERBUANA	02.979.412.0-014.000	2012	31,810,091
	Grand Total			1,147,397,875

4. Kantor Cabang Lampung, tahun 2013 -2014 :

N o	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	PT. ABADI TATA NUSANTARA	02.727.026.3-432.000	2014	171,488,000
2	PT. ABADISAPTA DUDAUNI ANUGRAH	03.326.495.3-009.000	2014	101,692,000
3	PT. ANGKASA ENGGIHLITAR	03.332.063.1-005.000	2014	178,423,500
4	PT. APRIL SUKSES ABADI	03.312.908.1-008.000	2013	47,091,600
5	PT. ARDHANA DWITUNGGAL	66.568.074.0-005.000	2014	19,088,000
6	PT. ARWANA MERAH BERJAYA	03.288.377.9-027.000	2013	34,900,000
7	PT. BAHANA KASTA RANCAMAYA	66.815.510.4-016.000	2014	45,686,300
8	PT. BARU SEMPURNA	66.312.872.6-411.000	2014	45,863,000
9	PT. BUMBUNGAN SUHAYA	66.626.911.3-407.000	2014	108,818,014
10	PT. CAHAYA AGUNG FURNITURE	03.345.229.3-411.000	2014	98,543,000
11	PT. CAPRIASI MULTI NASIONAL PERKASA	03.234.795.7-022.000	2013	28,229,500
12	PT. CENTRAL MAKMUR	03.268.241.1-	201	

Halaman 17 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AGROTAMA	008.000	3	25,736,000
13	PT. DINAMIC SUTRA ABADI	03.234.793.2-008.001	201 3	50,030,500
14	PT. ERIKANDO INDAH	66.637.005.1-407.000	201 4	111,024,300
15	PT. FURINDO CIPTA	66.303.687.9-411.000	201 4	102,340,000
16	PT. GARUDA MEKAR BERJAYA	03.269.281.6-027.000	201 3	12,257,000
17	PT. GRACIA DEO PERMATA	66.896.458.8-407.000	201 4	100,187,732
18	PT. HAMPARAN KOLODAUL MAKSIMA	03.326.494.6-009.000	201 4	154,804,500
19	PT. HIKARI BUANA TATAN	66.171.532.6-017.000	201 4	56,702,636
20	PT. ILAX SARANA UTAMA	66.848.866.1-407.000	201 4	126,438,500
21	PT. KARISMA GEMILANG	03.268.102.5-008.000	201 3	49,422,500
22	PT. KARYA LOGAM TEKNO	03.343.174.3-411.000	201 4	57,805,600
23	PT. KEMBANG KIRANA	03.345.224.4-411.000	201 4	155,232,739
24	PT. KHARISMA PELANGI NUSANTARA	03.269.275.8-027.000	201 3	8,381,500
25	PT. KHATULISTIWA NUSANTARA JAYA	03.269.276.6-027.000	201 3	32,332,000
26	PT. KINANTI BULAN PURNAMA	03.269.279.0-027.000	201 3	16,763,000
27	PT. KING KILABAN JAYA	02.832.246.9-027.000	201 3	41,844,000
28	PT. KURNIA BINTANG SUKSES	02.727.074.3-432.000	201 4	145,054,500
29	PT. LABUAN LALANG BERSINAR	03.234.797.3-022.000	201 3	98,938,000
30	PT. MAHAKAM SAPTASA	66.794.600.8-412.000	201 4	35,638,500
31	PT. MAHARAYA TECHNIC INDONESIA	03.288.385.2-027.000	201 3	40,563,000
32	PT. MEGARAYA AGUNG JAYA	03.268.240.3-008.000	201 3	18,100,000
33	PT. MITRA PLUS SEJATI	66.848.710.1-407.000	201 4	120,369,900
34	PT. MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	201 3	22,222,500
35	PT. NAAFI JAYA UTAMA	03.345.226.9-411.000	201 4	52,610,750
36	PT. NUNATA SARANA SERVICE	03.345.201.2-411.000	201 4	75,390,000
37	PT. PADANAN CIPTA NUSA	66.890.175.4-407.000	201 4	27,214,000
38	PT. PANCARAN RADAYA	66.642.751.3-407.000	201 4	42,665,000
39	PT. PANDA ALAM KHATULISTIWA	03.288.386.0-027.000	201 3	30,175,000
40	PT. PANJI MEGA SENTOSA	03.312.904.0-008.000	201 3	48,903,000
41	PT. PARAGAN BITUAL TITAMA	03.332.064.9-005.000	201 4	148,414,000
42	PT. RAPITAMA SARANA GLOBAL	66.877.401.1-407.000	201 4	86,913,000
43	PT. RAWINTA BRAMA BERSINAR	03.335.009.1-017.000	201 4	53,303,500
44	PT. ROMEO CITRA LESTARI	03.333.585.2-009.000	201 4	38,173,000
45	PT. ROMEO WIBISANA INDONESIA	03.312.905.7-008.000	201 3	47,370,000
46	PT. SARINAH MULIA	66.312.851.0-411.000	201 4	58,319,500
47	PT. SECAMBAH ANUGERAH	66.640.154.2-407.000	201 4	35,512,000
48	PT. SEMANGAT JAYA	66.307.188.4-411.000	201 4	196,962,000
49	PT. SUANTAPUI PRATAMA INDAH	66.871.170.8-407.000	201 4	151,187,000

Halaman 18 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



50	PT. SUMBER ALAS SUMSEL	03.250.891.3-027.000	2013	30,472,500
51	PT. SUNDEYEN PRAKARSA	66.628.284.3-407.000	2014	51,128,369
52	PT. SURYA SENTOSA	66.307.102.5-411.000	2014	196,587,736
53	PT. TATA SURYA KENCANA	03.345.203.8-411.000	2014	99,732,400
54	PT. TEKNO LISTRIK	03.343.173.5-411.000	2014	129,669,300
55	PT. TIRTA BAROKAH NUSANTARA	66.896.485.1-407.000	2014	194,371,740
56	PT. USAHA MITRA BERSAMA	03.268.103.3-008.000	2013	47,055,000
57	PT. VADILTAMA GAPSONINDO	03.315.697.7-017.000	2014	120,024,400
58	PT. XOIXE KARYA TAMA	66.890.242.2-407.000	2014	43,460,500
Grand Total				4,467,625,516

5. Kantor Cabang Lampung Tahun 2015 :

No.	NAMA WP	TAHUN	Nilai PPN
1	PT. ARWANITO SEMBADA	2015	149,055,800
2	PT. BUNGA SARI ALAMANDA	2015	44,895,800
3	PT. DWI RANDU CIPTA	2015	210,075,235
4	PT. HARUM BINTANG SEJATI	2015	71,020,972
5	PT. HARUMI CAHAYA CIPTA	2015	80,205,100
6	PT. HARWAN DWI PERKASA	2015	46,552,000
7	PT. HUMALA PERSADA JAYA	2015	89,502,400
8	PT. KASTURI INDO WIDURI	2015	137,703,500
9	PT. KHARISMA BERDIKARI JUNUNAN	2015	79,819,240
10	PT. MAHATA SENTOSA	2015	154,092,426
11	PT. MANGGALA BRAGA BAJA	2015	129,596,500
12	PT. MATUMONA INDAH KARYA	2015	51,697,500
13	PT. METALINDO MAKSIMA	2015	43,788,480
14	PT. PERDANA SIANITA	2015	49,183,900
15	PT. RAMA KIANI RAYA	2015	40,808,704
16	PT. SUKAMULYA PERKASA DANA	2015	48,191,000
Grand Total			1,426,188,557

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dari sektor perpajakan sekurang-kurangnya sebesar jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam masing-masing Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari tahun 2011 sampai dengan 2015, yaitu sebesar **Rp. 24.530.398.589,- (dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).**

–Perbuatan Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.--

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU bersama-sama dengan Saksi EDWYN NOOR LODAYANA, Saksi BANDIYO, Saksi BUDI SATRIO, Saksi A FEN dan Saksi ABDUL CHALID alias TENGKU yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, telah **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengajamenyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap,sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Saksi EDWYN NOOR LODAYANA sebagai Direktur PT. OCEAN PETRO ENERGY diperkenalkan kepada Saksi BUDI SATRIO oleh Saksi R.S. HADI SANTOSO alias SONY sebagai Konsultan yang akan membantu perusahaan dalam melaporkan kewajiban perpajakan di PT. OCEAN PETRO ENERGY. Pada saat itu Saksi BUDI SATRIO menawarkan Faktur Pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi nilai PPN yang harus disetor ke Negara dan menjamin bahwa Faktur Pajak masukan tersebut "AMAN" dan tidak akan dicurigai oleh pihak Kantor Pajak.
- Bahwa atas penawaran 'Faktur Pajak Masukan' dari Saksi BUDI SATRIO tersebut, Saksi EDWYN NOOR LODAYANA memutuskan untuk menerima penawaran tersebut, namun untuk teknis pemesanan faktur pajaknya diserahkan kepada Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU. Pemesanan faktur pajak melalui Saksi BUDI SATRIO dan Saksi ABDUL CHALID alias TENGKU oleh Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU tersebut mulanya untuk digunakan di PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Surabaya dan kemudian dilanjutkan untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Pusat, PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Jakarta Ampera dan PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Lampung.
- Bahwa PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Pusat, Kantor Cabang Jakarta Ampera dan Kantor Cabang Lampung merupakan perusahaan

Halaman 20 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (solar) untuk industri yang mempunyai kewajiban perpajakan karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga setiap melakukan penyerahan barang dan/atau jasa wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menerbitkan faktur pajak kepada pembeli, selain itu juga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya.

- Bahwa pemesanan faktur pajak yang dilakukan oleh Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Pusat dan PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Jakarta Ampera serta PT. OCEAN PETRO ENERGY Cabang Lampung dilakukan dengan proses pemesanan sebagai berikut :

- Untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Pusat dan Kantor Cabang Jakarta Ampera, Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU melalui stafnya yang bernama HERWING alias EWING (telah meninggal dunia) mengirimkan rekapitulasi penjualan melalui email (surat elektronik) yang bersangkutan yaitu herwinopetro@gmail.com ke alamat email Saksi BUDI SATRIO di bsatrio66@yahoo.com dan s.tama66@yahoo.com. Selain melalui BUDI SATRIO, pemesanan juga dilakukan melalui alamat email Saksi A FEN, yang merupakan karyawan konsultan pajak Saksi BUDI SATRIO di alamat afenkonsult@yahoo.com. Kemudian oleh Saksi BUDI SATRIO, email tersebut diteruskan kepada Saksi ABDUL CHALID alias TENGKU dan kemudian Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU menghubungi Saksi BUDI SATRIO untuk mengabarkan pesanan faktur pajak yang telah dikirimnya tersebut, namun sejak Pebruari 2015 pemesanan faktur pajaknya tidak melalui saksi BUDI SATRIO lagi melainkan dikirimkan langsung ke Saksi ABDUL CHALID alias TENGKU di alamat email cantik.geulis@yahoo.com dan setelah emailnya dikirim kemudian Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU menghubungi Saksi ABDUL CHALID alias TENGKU untuk menginformasikan bahwa pesanan melalui email telah dikirim.
- Pemesanan faktur pajak kepada Saksi BUDI SATRIO maupun Saksi ABDUL CHALID alias TENGKU dengan harga faktur sebesar 40 % dari nilai PPN, sedangkan yang 60 % dari nilai PPN dibagi-bagikan oleh Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU kepada Saksi EDWIN



NOOR LODAYANA, Saksi R.S. HADI SANTOSO alias SONY dan Saksi ARIE KENDALISADA.

Seluruh faktur pajak yang dipesan oleh Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU kepada Saksi BUDI SATRIO dan saksi ABDUL CHALID alias TENGKU dikirim melalui TIKI atau melalui kurir ke Kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY.

- Pembayaran faktur pajak oleh Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU kepada Saksi BUDI SATRIO dilakukan dengan cara transfer atau setor tunai ke rekening Saksi A FENDi Bank BCA Nomor rekening a/c 7130363321 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, sedangkan untuk tahun 2015, oleh karena pemesanan faktur pajaknya langsung kepada Saksi ABDUL CHALID, maka pembayaran faktur pajaknya ditujukan ke rekening Bank Mandiri atas nama ABDUL CHALID No. Rek. 1330012451910 dan rekening BCA atas nama PERMANA SAPUTRA.
- Bahwa faktur pajak yang dipesan dari Saksi BUDI SATRIO dan Saksi ABDUL CHALID telah dilaporkan sebagai pengkreditan dalam laporan SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Pusat NPWP 02.869.782.9-012.000 dan PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Jakarta NPWP 02.869.782.9-012.001, dan PT. OCEAN PETRO ENERGY Cabang Lampung, namun fakta sebenarnya faktur pajak tersebut adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena tidak berdasarkan transaksi yang riil atau tidak ada penyerahan barang dari penjual kepada pembeli yang artinya hanya jual beli nomor faktur pajak dan/atau kertas faktur pajak saja.
- Adapun SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Pusat, PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Jakarta dan PT. OCEAN PETRO ENERGY Cabang Lampung yang telah dilaporkan ke Kantor Pajak yang didasarkan pada Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

1. PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat.

SPT Masa PPN masa pajak Mei s.d. Desember 2013.

No	Masa	Jenis	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1.	05-May	Norma I	S- 01050675/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2013	2,502,367	01/07/2013	28/06/2013	ESPT
2.	06-Jun	Norma I	S- 01059675/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2013	(8,663,475)	31/07/2013		ESPT
3.	06-Jun	Pmbtu I Ke-1	S- 01068334/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2013	(7,454,544)	02/09/2013		ESPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	07-Jul	Norma I	S- 01069477/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2013	(51,039,765)	10/09/2013		ESPT
5.	07-Jul	Pmbtu I Ke-1	S- 01076629/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2013	(34,921,746)	25/09/2013		ESPT
6.	08-Aug	Norma I	S- 01076901/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2013	(16,231,639)	26/09/2013		ESPT
7.	09-Sep	Norma I	S- 01087478/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2013	8,540,950	08/11/2013	06/11/2013	ESPT
8.	10-Oct	Norma I	S- 01096782/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2013	31,391,451	09/12/2013	09/12/2013	ESPT
9.	11-Nov	Norma I	S- 01003635/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2014	243,505,689	17/01/2014	17/01/2014	ESPT
10.	12-Dec	Norma I	S- 01009634/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2014	23,406,858	13/02/2014	11/02/2014	ESPT

SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2014.

No	Masa	Jenis	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1.	01-Jan	Norma I	S- 01022289/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2014	126,355,393	18/03/2014	18/03/2014	ESPT
2.	02-Feb	Norma I	S- 01045304/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2014	(680,244,988)	22/05/2014		
3.	03-Mar	Norma I	S- 01045305/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2014	(515,113,861)	22/05/2014		ESPT
4.	04-Apr	Norma I	S- 01057410/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2014	(290,584,748)	10/07/2014		ESPT
5.	05-May	Norma I	S- 01057411/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2014	(803,181,349)	10/07/2014		ESPT
6.	06-Jun	Norma I	S- 01069095/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2014	289,085,512	18/08/2014	15/08/2014	ESPT
7.	07-Jul	Norma I	S- 01085963/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2014	47,227,722	06/10/2014	03/10/2014	ESPT
8.	08-Aug	Norma I	S- 01088224/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2014	(84,361,815)	15/10/2014		ESPT
9.	09-Sep	Norma I	S- 01106242/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2014	(101,866,893)	02/12/2014		ESPT
10.	10-Oct	Norma I	S- 01107510/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2014	(39,113,131)	10/12/2014		ESPT
11.	10-Oct	Pmbtu I Ke-1	S- 01001990/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	(46,233,131)	14/01/2015		ESPT
12.	11-Nov	Norma I	S- 01001992/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	(89,284,911)	14/01/2015		ESPT
13.	12-Dec	Norma I	S- 01011267/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	420,551,997	06/02/2015	04/02/2015	ESPT
14.	12-Dec	Pmbtu I Ke-1	S- 01022266/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	(32,210,011)	12/03/2015		ESPT

SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2015.

No	Masa	Jenis	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1.	01-Jan	Norma I	S-01022262/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	304,308,392	12/03/2015	11/03/2015	ESPT
2.	01-Jan	Pmbtu I Ke-1	S-01052157/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	304,308,392	03/06/2015	11/03/2015	ESPT
3.	02-Feb	Norma I	S-01039862/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	163,369,207	23/04/2015	16/04/2015	ESPT
4.	02-Feb	Pmbtu I Ke-1	S-01055971/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	163,369,207	16/06/2015	16/04/2015	ESPT
5.	03-Mar	Norma I	S-01051766/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	181,427,599	29/05/2015	29/05/2015	ESPT
6.	03-Mar	Pmbtu I Ke-1	S-01055976/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	298,881,487	16/06/2015	11/06/2015	ESPT
7.	04-Apr	Norma I	S-01071062/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	168,849,393	22/07/2015	14/07/2015	ESPT
8.	05-May	Norma I	S-01071863/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	354,577,070	28/07/2015	28/07/2015	ESPT
9.	06-Jun	Norma I	S-01094452/PPN1111 /WPJ.04/KP.0403/2015	168,769,268	28/09/2015	10/09/2015	ESPT
10.	07-Jul	Norma I	S-01001339/PPN1111 /WPJ.30/KP.0403/2015	302,032,681	12/11/2015	11/11/2015	ESPT
11.	08-Aug	Norma I	S-01001340/PPN1111 /WPJ.30/KP.0403/2015	282,384,796	12/11/2015	11/11/2015	ESPT
12.	09-Sep	Norma I	S-01001995/PPN1111 /WPJ.30/KP.0403/2015	87,526,337	27/11/2015	27/11/2015	ESPT

Halaman 23 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	10-Oct	Normal	S-01003138/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2015	63,206,266	29/12/2015	29/12/2015	ESPT
14	11-Nov	Normal	S-01001050/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2016	300,368,856	27/01/2016	27/01/2016	ESPT
15	11-Nov	Pmbtu I Ke-1	S-01005626/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2016	Nihil	08/06/2016		ESPT
16	12-Dec	Normal	S-01003188/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2016	267,397,465	22/03/2016	17/03/2016	ESPT
17	12-Dec	Pmbtu I Ke-1	S-01005623/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2016	Nihil	08/06/2016		ESPT

2. PT. OCEAN PETRO ENERGY Cabang Jakarta.

SPT Masa PPN masa pajak September 2011 s.d Desember 2011.

No	Masa	Jenis	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapo	Tanggal Bayar	Asal
1	09-Sep	Normal	S-01105975/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2011	5,840,000	31/10/2011	31/10/2011	DPC
2	10-Oct	Normal	S-01118630/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2011	1,440,000	08/12/2011	08/12/2011	DPC
3	11-Nov	Normal	S-01003330/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	7,040,697	17/01/2012	17/01/2012	DPC
4	12-Dec	Normal	S-01022276/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	55,174	28/02/2012	28/02/2012	DPC

SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d Desember 2012.

No	Masa	Jenis	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapo	Tanggal Bayar	Asal
1	01-Jan	Normal	S-01022275/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	28,182	28/02/2012	28/02/2012	DPC
2	02-Feb	Normal	S-01045454/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	3,566,182	23/04/2012	23/04/2012	DPC
3	03-Mar	Normal	S-01045583/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	2,669,051	24/04/2012	24/04/2012	DPC
4	04-Apr	Normal	S-01048647/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	4,180,552	09/05/2012	09/05/2012	DPC
5	05-May	Normal	S-01062100/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	3,819,592	13/06/2012	13/06/2012	DPC
6	06-Jun	Normal	S-01073733/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	2,259,416	13/07/2012	10/07/2012	DPC
7	07-Jul	Normal	S-01088090/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	3,275,810	14/08/2012	14/08/2012	DPC
8	07-Jul	Pembetulan Ke-1	S-01104080/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	3,275,810	20/09/2012	14/08/2012	DPC
9	08-Aug	Normal	S-01095111/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	2,087,996	07/09/2012	07/09/2012	DPC
10	09-Sep	Normal	S-01112097/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	11,242,851	17/10/2012	17/10/2012	DPC
11	10-Oct	Normal	S-01129157/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	7,895,463	23/11/2012	21/11/2012	DPC
12	11-Nov	Normal	S-01142878/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	(11,186,17)	28/12/2012		DPC
13	12-Dec	Normal	S-01007666/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	8,062,094	30/01/2013	30/01/2013	DPC

SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d April 2013.

No	Masa	Jenis	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapo	Tanggal Bayar	Asal
----	------	-------	-----	-----------------	--------------	---------------	------

Halaman 24 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	01-Jan	Normal	S-01015974/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	170,173,096	27/02/2013		ESPT
2	02-Feb	Normal	S-01020101/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	(9,960,351)	22/03/2013		ESPT
3	03-Mar	Normal	S-01031120/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	23,538,860	29/04/2013	29/04/2013	ESPT
4	04-Apr	Normal	S-01040476/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	51,803,641	03/06/2013	30/05/2013	ESPT
5	04-Apr	Pembetulan Ke-1	S-01069480/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	(13,309,091)	10/09/2013		ESPT

3. PT. OCEAN PETRO ENERGY Cabang Lampung.

SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2013.

Masa	Status	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Jenis Pelaporan
02-Feb	Normal	S-01035055/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2013	149,772	31/05/13	31/05/13	Perekaman Online
02-Feb	Pembetulan Ke-1	S-01073414/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2015	4,077,500	31/12/15	02/02/15	ESPT
03-Mar	Normal	S-01035057/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2013	818,545	31/05/13	31/05/13	Perekaman Online
03-Mar	Pembetulan Ke-1	S-01073420/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2015	20,886,000	31/12/15	03/09/15	ESPT
04-Apr	Normal	S-01040665/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2013	584,318	21/06/13	21/06/13	Perekaman Online
04-Apr	Pembetulan Ke-1	S-01073422/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2015	30,472,500	31/12/15	03/09/15	ESPT
05-May	Normal	S-01053135/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2013	2,150,499	21/08/13	06/08/13	Perekaman Online
05-May	Pembetulan Ke-1	S-01064929/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	09/12/14		ESPT
05-May	Pembetulan Ke-2	S-01073527/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2015	72,999,500	31/12/15	31/12/15	ESPT
06-Jun	Normal	S-01060772/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2013	(923,733.00)	03/10/13		ESPT
06-Jun	Pembetulan Ke-1	S-01000182/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2014	20,076,267	03/01/14	03/01/14	ESPT
06-Jun	Pembetulan Ke-2	S-01007672/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2014	272,727	12/02/14	10/02/14	ESPT
06-Jun	Pembetulan Ke-3	S-01013857/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2016	98,938,000	01/03/16	01/12/15	ESPT
07-Jul	Normal	S-01066014/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2013	Nihil	31/10/13		ESPT
07-Jul	Pembetulan Ke-1	S-01004590/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2014	53,713,632	22/01/14	17/01/14	ESPT
07-Jul	Pembetulan Ke-2	S-01007962/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2014	(639,362.00)	13/02/14		ESPT
07-Jul	Pembetulan Ke-3	S-01023157/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2015	12,818,100	23/04/15	21/04/15	ESPT
08-Aug	Normal	S-01060732/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2013	900,362	02/10/13	27/09/13	ESPT
08-Aug	Pembetulan Ke-1	S-01073367/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2015	25,736,000	31/12/15	30/12/15	ESPT
09-Sep	Normal	S-01065925/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2013	8,697,085	30/10/13	30/10/13	ESPT
09-Sep	Pembetulan Ke-1	S-01064930/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	09/12/14		ESPT
09-Sep	Pembetulan Ke-2	S-01073371/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2015	147,482,000	31/12/15	30/12/15	ESPT
10-Oct	Normal	S-01071431/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2013	2,910,217	27/11/13	25/11/13	ESPT
10-Oct	Pembetulan Ke-1	S-01064931/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	09/12/14		ESPT
10-Oct	Pembetulan Ke-2	S-01073374/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2015	84,842,100	31/12/15	30/12/15	ESPT
11-Nov	Normal	S-01000181/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2014	3,165,454	03/01/14	03/01/14	ESPT
11-Nov	Pembetulan Ke-1	S-01073377/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2015	99,972,500	31/12/15	30/12/15	ESPT
12-Dec	Normal	S-01006276/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2014	4,665,227	05/02/14	29/01/14	ESPT
12-Dec	Pembetulan Ke-1	S-01007673/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2014	2,760,000	12/02/14	10/02/14	ESPT
12-Dec	Pembetulan Ke-2	S-01064932/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	09/12/14		ESPT
12-Dec	Pembetulan Ke-3	S-01073380/PPN1111/WPJ.28/KP.0303/2015	145,380,500	31/12/15	30/12/15	ESPT

Halaman 25 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2014

Masa	Status	BPS	Nilai Pelaporan	TglLap or	Tgl Bayar	Asal
01-Jan	Normal	S-01011517/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	5,278,350	26/02/14	25/02/14	ESPT
02-Feb	Normal	S-01019422/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	7,664,490	08/04/14	07/04/14	ESPT
03-Mar	Normal	S-01023133/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	58,437,227	22/04/14	21/04/14	ESPT
03-Mar	Pembetulan Ke-1	S-01040909/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	25/07/14		ESPT
03-Mar	Pembetulan Ke-2	S-01064928/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	09/12/14		ESPT
04-Apr	Normal	S-01034510/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	20/06/14		ESPT
04-Apr	Pembetulan Ke-1	S-01041053/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	9,445,598	04/08/14	06/06/14	ESPT
04-Apr	Pembetulan Ke-2	S-01052387/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	73,440,000	30/09/14	06/05/14	ESPT
04-Apr	Pembetulan Ke-3	S-01064927/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	09/12/14		ESPT
05-May	Normal	S-01040910/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	10,503,229	25/07/14	21/07/14	ESPT
05-May	Pembetulan Ke-1	S-01052389/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	52,807,800	30/09/14	11/06/14	ESPT
05-May	Pembetulan Ke-2	S-01064926/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	09/12/14		ESPT
06-Jun	Normal	S-01041141/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	04/08/14		ESPT
06-Jun	Pembetulan Ke-1	S-01052390/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	81,393,209	30/09/14	29/09/14	ESPT
06-Jun	Pembetulan Ke-2	S-01064925/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	09/12/14		ESPT
07-Jul	Normal	S-01052391/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	70,362,579	30/09/14	29/09/14	ESPT
07-Jul	Pembetulan Ke-1	S-01057672/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	70,328,200	28/10/14	29/09/14	ESPT
07-Jul	Pembetulan Ke-2	S-01064924/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	09/12/14		ESPT
08-Aug	Normal	S-01052392/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	60,705,853	30/09/14	29/09/14	ESPT
08-Aug	Pembetulan Ke-1	S-01057673/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	7,920,000	28/10/14	29/09/14	ESPT
08-Aug	Pembetulan Ke-2	S-01064923/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	Nihil	09/12/14		ESPT
09-Sep	Normal	S-01057674/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	37,486,712	28/10/14	27/10/14	ESPT
09-Sep	Pembetulan Ke-1	S-01064920/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	7,384,000	09/12/14	08/12/14	ESPT
09-Sep	Pembetulan Ke-2	S-01001321/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	Nihil	12/01/15		ESPT
10-Oct	Normal	S-01065169/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2014	136,333,725	10/12/14	08/12/14	ESPT
10-Oct	Pembetulan Ke-1	S-01009690/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	Nihil	18/02/15		ESPT
11-Nov	Normal	S-01001376/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	70,317,577	12/01/15	04/12/14	ESPT
11-Nov	Pembetulan Ke-1	S-01009687/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	Nihil	18/02/15		ESPT
12-Dec	Normal	S-01009683/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	108,654,313	18/02/15	11/02/15	ESPT

SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2015.

Masa	Status	BPS	Nilai Pelaporan	TglLap or	Tgl Bayar	Asal
01-Jan	Normal	S-01018855/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	4,095,097	08/04/15	19/03/15	ESPT
02-Feb	Normal	S-01018856/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	4,408,597	08/04/15	19/03/15	ESPT
03-Mar	Normal	S-01024895/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	14,989,099	07/05/15	06/05/15	ESPT
04-Apr	Normal	S-01032470/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	15,811,357	16/06/15	12/06/15	ESPT
05-May	Normal	S-01040199/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	67,352,603	28/07/15	14/07/15	ESPT
06-Jun	Normal	S-01046742/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	Nihil	01/09/15		ESPT
06-Jun	Pembetulan Ke-1	S-01053740/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	39,915,736	08/10/15	07/10/15	ESPT
07-Jul	Normal	S-01046743/PPN1111/	Nihil	01/09/15		ESPT

Halaman 26 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



		WPJ.28/KP.0303/2015		15		
07-Jul	Pembetulan Ke-1	S-01053739/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	39,391,845	08/10/15	07/10/15	ESPT
08-Aug	Normal	S-01053738/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	49,836,570	08/10/15	07/10/15	ESPT
09-Sep	Normal	S-01060443/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	Nihil	10/11/15		ESPT
09-Sep	Pembetulan Ke-1	S-01068326/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	18,182,226	15/12/15	14/12/15	ESPT
10-Oct	Normal	S-01068327/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2015	31,055,170	15/12/15	14/12/15	ESPT
10-Oct	Pembetulan Ke-1	S-01006236/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2016	Nihil	25/01/16		ESPT
11-Nov	Normal	S-01001151/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2016	(222,080.00)	07/01/16		ESPT
11-Nov	Pembetulan Ke-1	S-01006235/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2016	Nihil	25/01/16		ESPT
12-Dec	Normal	S-01006234/PPN1111/ WPJ.28/KP.0303/2016	18,270,919	25/01/16	19/01/16	ESPT

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dari sektor perpajakan sekurang-kurangnya sebesar **Rp.24.530.398.589,-** (dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), dengan Rekapitulasi sebagai berikut :

- PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Pusat sebesar Rp 17.489.186.641,-
- PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Jakarta sebesar Rp 1.147.397.875,-
- PT. OCEAN PETRO ENERGY Kantor Cabang Lampung sebesar Rp 5.893.814.073,-

Jumlah

Rp 24.530.398.589,-

–Perbuatan Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Bonaventura Dwi Windu tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



1. **BUDI SATRIO**, dengan bersumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya dipenyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU sebagai Manajer Operasional PT. OCEAN PETRO ENERGY pada tahun 2011 tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui PT. OCEAN PETRO ENERGY bergerak dalam bidang usaha pembelian BBM solar dengan Kantor Pusat di Jakarta dan mempunyai Cabang di Surabaya dan Lampung;
- Bahwa, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, saksi pernah membantu PT Ocean Petro Energy memesan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari ABDUL CHALID alias TENGKU untuk :
 - Kantor Pusat PT. OCEAN PETRO ENERGY, NPWP 02.869.782.9-012.000 Jalan Ampera, Jakarta Selatan;
 - Kantor cabang PT. OCEAN PETRO ENERGY Jakarta Ampera, NPWP 02.869.782.9-012.001, alamat Jalan Ampera, Jakarta Selatan;
 - Kantor cabang PT. OCEAN PETRO ENERGY di Bandarlampung, NPWP 02.869.782.9-322.001;
 - Kantor cabang PT. OCEAN PETRO ENERGY di Sidoarjo, NPWP 02.869.782.9-643.001;
- Bahwa, berawal di tahun 2011, PT. OCEAN PETRO ENERGY (OPETRO) cabang Surabaya yang lebih dulu menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya karena melakukan pembelian BBM solar yang tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap (BBM pasar gelap) yang harganya dibawah harga pasar atau dibawah harga patokan dari PERTAMINA, kemudian BBM tersebut dijual ke beberapa perusahaan-perusahaan industri, namun perusahaan Industri tersebut mewajibkan OPETRO untuk menjelaskan bukti-bukti perolehan atas BBM-nya sehingga OPETRO Surabaya melakukan pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada ABDUL CHALID;

Halaman 28 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2012, saksi dihubungi oleh PT Ocean Petro Energy untuk melanjutkan pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya namun untuk kepentingan PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat, cabang Ampera Jakarta dan cabang Lampung. Atas pesanan faktur pajak tersebut, PT Ocean Petro Energy sudah menentukan imbalan saksi dan ABDUL CHALID yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% (dihitung dari imbalan atau fee jual beli faktur pajak setelah dikurangi setoran PPN ke kantor pajak atau SSP);
- Bahwa, proses pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - PT Ocean Petro Energy melalui stafnya yang bernama HERWIN alias AWIN, mengirimkan rekapitulasi berupa rincian pemesanan faktur pajak masukan melalui email herwinopetro@gmail.com ke alamat email saksi yaitu s.tama66@yahoo.com dan alamat email AFEN (staf saksi) afen_konsult@yahoo.com. Setelah dikirim, PT Ocean Petro Energy melalui Terdakwa atau HERWIN akan mengkonfirmasi kepada saksi atau staff saksi bernama A FEN;
 - Selanjutnya saksi meneruskan email dari HERWIN alias AWIN tersebut ke alamat email ABDUL CHALID alias TENGKU cantik.geulis@yahoo.com. kemudian saksi atau A FEN akan menghubungi ABDUL CHALID alias TENGKU perihal pesanan faktur pajak dari PT Ocean Petro Energy ;
 - Untuk pengiriman faktur pajak yang sudah selesai dari ABDUL CHALID, apabila masih dalam waktu normal setiap tanggal 5 maka faktur pajak dikirim via pos atau TIKI ke kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan Ampera, Jakarta Selatan, tetapi apabila waktunya sudah di atas tanggal 10 maka faktur pajak diantar ke kantor konsultan pajak yang saksi kelola, di alamat Ruko Petersburg, Gading Serpong, Tangerang kemudian dikirim melalui kurir ke PT. OCEAN PETRO ENERGY;
- Bahwa, faktur pajak untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Lampung dan Surabaya dikirim ke kantor pusat PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan Ampera, Jakarta Selatan. Sebelumnya saksi dihubungi PT Ocean Petro Energy melalui Terdakwa atau setelah faktur pajak diterima oleh Terdakwa atau HERWIN alias AWIN;

Halaman 29 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, faktur pajak yang dikirim disertai lampirannya yaitu invoice, tanda terima dan surat jalan;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti berupa printout email karena saksi pernah menerima-nya melalui alamat email saksi di s.tama66@yahoo.com, dari HERWIN melalui alamat email herwinopetro@gmail.com yaitu pesanan faktur pajak bulan Desember 2013, yang diminta Terdakwa untuk kepentingan PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Jakarta Ampera. Selain pesanan melalui email, saksi juga dihubungi oleh Terdakwa untuk menyatakan konfirmasinya atas pesanan faktur pajak tersebut;
- Bahwa, seluruh pesanan faktur pajak bulan Desember 2013 melalui email s.tama66@yahoo.com sebesar Rp. 707.547.836,- (tujuh ratus tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) telah diterbitkan faktur pajaknya oleh ABDUL CHALID alias TENGKU dan telah diterima secara fisik oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Jakarta Ampera melalui Terdakwa;
- Bahwa, faktur pajak PT. OCEAN PETRO ENERGY untuk bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran atas pembelian barangnya. Oleh karena faktur pajak tersebut dibeli berdasarkan imbalan atau fee sebesar 40% s.d 45% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak kepada ABDUL CHALID alias TENGKU;
- Bahwa, pembayaran imbalan atau fee pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan Terdakwa dengan cara :
 - Pembayaran tunai dilakukan apabila nilai imbalan atau fee nya dalam jumlah kecil, penyerahan uang dilakukan di kantor pusat PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan Ampera, Jakarta Selatan, atau di kantor konsultan pajak yang saksi jalankan di Ruko Pettersbugh, Gading Serpong, Tangerang;
 - Pembayaran menggunakan transaksi perbankan, dengan cara transfer atau setor tunai bank oleh Terdakwa ke rekening A FEN di bank BCA cabang Gading Serpong dengan nomor rekening a/c 7130363321;
- Bahwa, rekening bank BCA cabang Gading Serpong dengan nomor rekening a/c 7130363321 atas nama A FEN untuk tahun 2012 s.d 2013, terdapat mutasi kredit bank sebesar Rp. 5.154.404.904

Halaman 30 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan rincian sebagaimana dalam BAP) yang merupakan imbalan dari PT Ocean Petro Energy melalui Terdakwa atas pemesanan faktur pajak;

- Bahwa, saksi sudah dihukum/ dijatuhi pidana atas perbuatan saksi membuat faktur-faktur yang tidak sebenarnya tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah.

2. **AGUNG PRAYITNO**, dengan bersumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan diambil keterangannya dan membenarkan isi BAP Penyidikan;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa sebagai General Manajer Marketing atau atasan saksi di PT. OCEAN PETRO ENERGY tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai staf bagian pajak dan mempunyai tugas menangani masalah pajak PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat, yaitu :
 - a) menyusun SPT Tahunan Badan dan melaporkannya ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat, termasuk menyetor kekurangan bayar apabila kurang bayar;
 - b) menginput Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN serta menyetor pajak kurang bayar;
 - c) melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat;
- Bahwa, saksi dalam menyusun SPT tahunan PT. OCEAN PETRO ENERGY menerima data untuk penjualan (faktur Pajak Keluaran) dari NICO sedangkan data untuk pembelian (faktur Pajak Masukan) dari HERWIN alias AWIN (alm);
- Bahwa, PT. OCEAN PETRO ENERGY memiliki bidang usaha perdagangan BBM solar (menjual dan membeli) yang kantor pusatnya di Jakarta dengan cabang di Surabaya dan Lampung;
- Bahwa, yang menandatangani SPT, dokumen Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah Direktur pak EDWYN NOOR LODAYANA;

Halaman 31 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan pemesanan dan konfirmasi penerimaan barang serta pembayaran dengan supplier-supplier utama BBM Solar PT. OCEAN PETRO ENERGY antara lain PT. APEX INDO PACIFIC, PT. SOLARIS PRIMA ENERGY, PT. PETRO ENERGY, PT. PRO ENERGI, PT. AKR CORPORINDO, PT. ELNUSA PETROFIN, PT. PERTAMINA PATRANIAGA dan dalam proses pembelian BBM solar tersebut, dokumen transaksi benar-benar ada dan lengkap;
- Bahwa, nama-nama perusahaan yang terdapat faktur pajak masukan beserta lampiran invoice, surat jalan dan tanda terima saksi yang terima dari HERWIN alias AWING berbeda dari nama-nama supplier utama BBM Solar PT. OCEAN PETRO ENERGY yang sering saksi konfirmasi dan Saksi merasa curiga dan menanyakan kepada bu GALIH akan tetapi jawaban bu GALIH kerjakan saja sehingga tetap saksi masukkan nama-nama perusahaan tersebut dalam SPT PT. OCEAN PETRO ENERGY;
- Bahwa, saksi mengenal SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY, NPWP 02.869.782.9-012.000 untuk masa pajak Mei 2013 s.d Desember 2015 karena saksi yang mengisi SPT Masa PPN tersebut dan yang menandatangani adalah EDWYN NOOR LODAYANA selaku direktur PT. OCEAN PETRO ENERGY;
- Bahwa, seluruh SPT Masa PPN tersebut telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah.

3. GALIH PARAMANDANA, dengan bersumpah dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai General Manager Marketing PT. Ocean Petro Energy tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 saksi bekerja sebagai staf bagian Finance di PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat dan Kantor Cabang Ampera Jakarta dengan tugas adalah

Halaman 32 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus masalah penjualan dan pembelian BBM solar AP (Account Payable), piutang usaha (Account Receivable), penagihan dan masalah pajak (membuat faktur pajak keluaran, menginput Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN serta menyetor pajak kurang bayar dan melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat, namun setelah tahun 2015 tugas membuat SPT dikerjakan oleh AGUNG PRAYITNO;

- Bahwa, yang bertugas mengurus PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat adalah pak EDWIN NOOR LODAYANA, Terdakwa BONAVENTURA, R.S. HADI SANTOSO alias SONI, ARIE, NIKO, HERWIN, MIRZA alias ADE;
- Bahwa, kegiatan usaha PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah perdagangan BBM solar Industri (KSO) atau yang dikenal dengan HSD. Solar HSD tersebut dibeli dari perusahaan rekanan PERTAMINA untuk dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan industri yang ada di JABODETABEK;
- Bahwa, alamat kegiatan usaha PT. OCEAN PETRO ENERGY, yaitu :
 - Kantor pusat PT. OCEAN PETRO ENERGY di Komplek Polri Jl. A No. 43, Ampera, Jakarta Selatan;
 - Kantor cabang seperti Lampung, Jambi, Palembang, Surabaya, Semarang, Cikarang, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur;
 - PT. OCEAN PETRO ENERGY memiliki tempat penimbunan minyak di CIWANDAN, Banten;
- Bahwa, yang menandatangani SPT, dokumen Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah EDWYN NOOR LODAYANA selaku Direktur;
- Bahwa, PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat dan cabang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atas transaksi penjualan BBM karena memiliki NPWP yang sama dan Pegawai yang menangani penjualan BBM solar adalah HERWIN alias AWIN;
- Bahwa, yang berwenang menangani masalah pembelian solar PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah pak EDWYN, Terdakwa BONAVENTURA, ARIE, dan MIRZA alias ADE. Informasi supplier

Halaman 33 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait harga yang ditawarkan dll biasanya lebih banyak dimiliki oleh ARIE (GM Bussiness Development) dan Terdakwa BONAVENTURA (GM Marketing). Kemudian keputusan akhir supplier mana yang dipilih dilakukan oleh pak EDWYN;

- Bahwa, supplier-supplier utama BBM Solar yang melakukan pemesanan dan konfirmasi penerimaan barang serta pembayaran antara lain PT. APEX INDO PACIFIC, PT. SOLARIS PRIMA ENERGY, PT. PETRO ENERGY, PT. PRO ENERGI, PT. AKR CORPORINDO, PT. ELNUSA PETROFIN, PT. PERTAMINA PATRANIAGA dan Saksi yang melakukan komunikasi langsung dan melakukan pembayaran dengan pihak supplier BBM solar tersebut, dokumen transaksi benar-benar ada dan lengkap;
- Bahwa, saksi yang mengisi SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY, NPWP 02.869.782.9-012.000 untuk masa pajak Mei 2013 s.d Desember 2015 dan yang menandatangani adalah EDWYN NOOR LODAYANA selaku Direktur PT OCEAN PETRO ENERGY. Seluruh SPT Masa PPN tersebut telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat;
- Bahwa, saksi membuat pelaporan SPT PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat sebagai berikut:
 - a) Untuk Pajak Keluaran (PK), berdasarkan laporan penjualan dari NICO kemudian saksi menginput faktur Pajak yang diterbitkan ke konsumen;
 - b) Untuk Pajak Masukan (PM), saksi menginput PM berdasarkan :
 - Faktur pajak yang diterima dari Supplier (PKP/penjual);
 - Faktur pajak yang diterima terkait Sewa Tangki dan sewa Transportir
 - Faktur pajak atas pembelian barang/jasa yg nilainya kecil-kecil;
 - Dan yang terakhir adalah faktur Pajak Masukan yang saksi terima dari Terdakwa dan Herwin;
- Bahwa, pada awalnya saksi menerima faktur pajak masukan dari Herwin dan Terdakwa dalam map-map yang sudah ditandai untuk kantor pusat/cabang, disertai instruksi secara lisan agar faktur pajak tersebut dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY pusat/cabang;

Halaman 34 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang biasa berhubungan dengan kantor cabang PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah Terdakwa sehingga saksi tidak menanyakan lagi faktur pajak yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengenal nama-nama perusahaan yang faktur pajaknya dikreditkan sebagai Pajak Masukan (sebagaimana disebutkan dalam BAP) oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat dalam kurun waktu 2014 dengan jumlah total Nilai PPN sebesar Rp. 11,291,021,805 dan 2015 dengan jumlah total Nilai PPN sebesar Rp.6,198,164,836;
- Bahwa, faktur Pajak Masukan atas nama perusahaan tersebut diatas tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan baik dalam Buku besar pembelian maupun Buku besar Hutang (Account Payable) dan tidak terdapat pembayaran atas faktur Pajak Masukan dari perusahaan-perusahaan tersebut sebagaimana layaknya faktur pajak masukan yang normal;
- Bahwa, saksi tidak mengenal nama-nama perusahaan yang faktur pajaknya dikreditkan sebagai Pajak Masukan (sebagaimana disebutkan dalam BAP) oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY Cabang Ampera untuk masa September 2011 s.d April 2013, dengan jumlah total Nilai PPN sebesar Rp. 1,147,397,875;
- Bahwa, saksi menerima seluruh faktur pajak dari perusahaan yang nama-namanya tersebut di atas dari Terdakwa dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa September 2011 s.d April 2013;
- Bahwa, saksi yang membuat SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY masa September 2011 s.d April 2013 tetapi saksi tidak mengetahui nama-nama perusahaan yang faktur pajaknya tertera dalam SPT Masa PPN tersebut;
- Bahwa, tidak terdapat pembayaran atas Faktur Pajak Masukan tersebut sebagaimana layaknya Faktur Pajak Masukan yang normal;
- Bahwa, PT. OCEAN PETRO ENERGY mempunyai rekening di Bank Mandiri No. Rek. 1270006367179 dan Bank BCA No. Rek 5855008090 a.n PT. OCEAN PETRO ENERGY hanya digunakan untuk menampung hasil penjualan solar, termasuk fee KSO dan pengeluaran atas pembelian solar ke supplier dan biaya operasional perusahaan seperti gaji karyawan;

Halaman 35 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menandatangani seluruh SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY, NPWP 02.869.782.9-012.000 masa Januari 2013 s.d Desember 2015 yang telah disampaikan ke KPP Pratama Kebayoran Baru Empat adalah EDWIN NOOR LODAYANA selaku Direktur utama PT. OCEAN PETRO ENERGY tetapi saksi pernah sekali menandatangani SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY karena saksi diperintah oleh pak EDWYN yang saat itu berada di luar kota;
- Bahwa, EDWYN NOOR LODAYANA sebagai Direktur tidak pernah mengomentari apalagi mengkoreksi SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY yang telah saksi buat tetapi hanya fokus atau mengawasi output SPT PT. OCEAN PETRO ENERGY;
- Bahwa, saksi tidak mengkonfirmasi lagi faktur pajak yang akan dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY kepada Terdakwa maupun kepada EDWYN NOOR LODAYANA karena saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menginput Faktur Pajak ke dalam SPT Masa PPN maka saksi kerjakan;
- Bahwa, faktur pajak masukan dari Terdakwa, telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat NPWP 02.869.782.9-012.000 untuk kurun waktu 2013 – 2015;
- Bahwa, pada akhir tahun 2014, saksi baru mengetahui faktur pajak yang dikreditkan PT. OCEAN PETRO ENERGY tidak benar setelah mendapat telpon dari KPP Tanah Abang, kemudian saksi mencari tahu kegiatan usaha salah satu perusahaan yang ada dalam faktur pajak tersebut (saksi lupa namanya) melalui aplikasi Google dan ternyata perusahaan tersebut adalah perusahaan garment yang menurut saksi tidak mungkin bertransaksi dengan PT. OCEAN PETRO ENERGY karena berbeda kegiatan usaha;
- Bahwa, setelah mendapat telpon dari KPP Tanah Abang, saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencari semua faktur pajak yang telah dilaporkan oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY;
- Bahwa, saksi pernah menerima transfer uang dari Terdakwa (sesuai bukti rekening koran yang diperlihatkan dalam persiadian) atau kadang diberikan secara cash untuk dibagi-bagikan dengan karyawan yang lain.

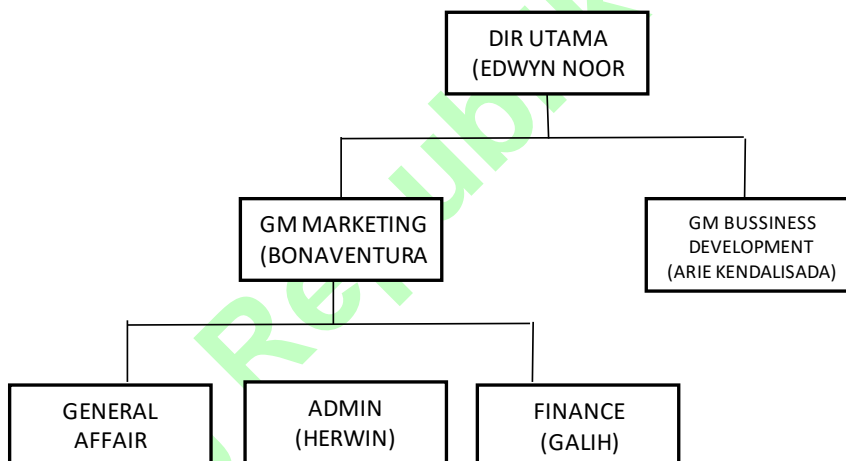
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 36 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



4. **EDWYN NOOR LODAYANA**, dengan bersumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan membenarkan isi BAP Penyidikan;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa sebagai General Manajer Marketing PT. OCEAN PETRO ENERGY tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah Direktur PT. Ocean Petro Energy;
- Bahwa, struktur organisasi PT OCEAN PETRO ENERGY pusat dapat saksi gambarkan sebagai berikut :



- Bahwa, kegiatan usaha PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah perdagangan BBM solar Industri atau yang dikenal dengan HSD. Solar HSD tersebut dibeli dari perusahaan rekanan PERTAMINA untuk dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan industri yang ada di JABODETABEK;
- Bahwa, alamat PT. OCEAN PETRO ENERGY terdaftar di Jl. Wolter Monginsidi No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sedangkan alamat operasional sekarang adalah di Jl. Terogong Raya No. 6B, Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa, jabatan saksi di PT. OCEAN PETRO ENERGY pada tahun 2009 adalah sebagai Direktur kemudian pada tahun 2011 sebagai Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab mengendalikan operasional perusahaan secara keseluruhan;
- Bahwa, PT. OCEAN PETRO ENERGY menyewa tempat penimbunan minyak di pelabuhan CIWANDAN, Banten sedangkan perijinan yang dimiliki PT. OCEAN PETRO ENERGY sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalur BBM solar HSD adalah Izin Usaha Niaga Umum (INU) BBM dari Kementerian ESDM q.q. Ditjen Migas;

- Bahwa, kewajiban PT. OCEAN PETRO ENERGY selaku pemegang INU dalam penyaluran BBM Solar HSD adalah :
 - a. Pembelian BBM HSD Solar : harus dilakukan kepada sesama pemegang Izin Usaha Niaga Umum (INU) dan seluruh pembelian BBM solar tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat MIGAS selama 3 bulan sekali (triwulan);
 - b. Sedangkan penjualan BBM HSD Solar bebas dilakukan kepada siapa saja, asalkan saja sumber atau asal usul BBM HSD solarnya benar keberadaanya (tidak menjual BBM Solar black market);
- Bahwa, cabang-cabang PT. OCEAN PETRO ENERGY ada di Surabaya, Lampung dan lain-lain dan semua cabang sudah dikukuhkan menjadi Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang membuat SPT dan membayar PPN;
- Bahwa, saksi mengenal seluruh SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY, NPWP 02.869.782.9-012.000, masa pajak Mei 2013 s.d Desember 2015 yang diperlihatkan kepada saksi (sesuai dalam BAP), yang menandatangani SPT tersebut adalah saksi sendiri (EDWYN NOOR LODAYANA) selaku Direktur Utama PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat dan telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat;
- Bahwa, saksi mengenal seluruh SPT Masa PPN Cabang Jakarta Ampera, NPWP 02.869.782.9-012.001, masa pajak September 2011 s.d April 2013 yang diperlihatkan kepada saksi (sesuai dalam BAP), yang menandatangani SPT Masa PPN masa Januari 2015 s.d Desember 2015 tersebut adalah saksi sendiri (EDWYN NOOR LODAYANA) selaku direktur utama PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Ampera dan telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat;
- Bahwa, yang bertugas membuat laporan pajak SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat NPWP 02.869.782.9-012.000 dan Cabang Ampera NPWP 02.869.782.9-012.001 adalah Terdakwa dibantu oleh BUDI SATRIO;
- Bahwa, awal pengenalan saksi dengan BUDI SATRIO oleh Terdakwa dan HADI SANTOSO alias SONY sekitar tahun 2011 di

Halaman 38 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY saat itu di Komplek Polri, Ampera, Jakarta Selatan, Terdakwa memperkenalkan BUDI SATRIO sebagai konsultan pajak yang mau membantu untuk membuat pelaporan pajak PT. OCEAN PETRO ENERGY;

- Bahwa, supplier-supplier utama BBM Solar PT. OCEAN PETRO ENERGY antara lain :PT. APEX INDO PACIFIC;PT. SOLARIS PRIMA ENERGY; PT. PETRO ENERGY; PT. PRO ENERGI; PT. AKR CORPORINDO; PT. ELNUSA PETROFIN; PT. PERTAMINA PATRANIAGA; PT. BATRAMA; PT. PALMINA; PT. SADP; PT. ISANOLOPO;
- Bahwa, BUDI SATRIO sangat menyakinkan teman-teman PT. OCEAN PETRO ENERGY dalam menceritakan kemampuan dan pengalamannya di bidang perpajakan, dan ada akhirnya BUDI SATRIO menawarkan faktur pajak kepada teman-teman di PT. OCEAN PETRO ENERGY yang berguna untuk mengurangi nilai PPN yang harus disetor ke Kas Negara oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY. BUDI SATRIO menjamin bahwa faktur pajak masukan yang digunakan nanti “AMAN” dan tidak akan dicurigai pihak pajak;
- Bahwa, pihak yang memutuskan untuk menerima tawaran “faktur pajak masukan” dari BUDI SATRIO adalah saksi dan diketahui oleh teman-teman yang ada di PT. OCEAN PETRO ENERGY, seperti Terdakwa, HADI SANTOSO alias SONY dan ARIE KENDALISADA.
- Bahwa, karena lebih dulu beroperasi adalah cabang Surabaya, maka penggunaan faktur pajak masukan tersebut dilakukan terlebih dahulu di Surabaya dan untuk teknis operasional pemesanan faktur pajaknya saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa, saksi memerintahkan Terdakwa agar teknis pemesanan faktur pajak kepada BUDI SATRIO ditangani oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengawasi hingga bagaimana pemesanan faktur pajak kepada BUDI SATRIO, pengawasan yang saksi lakukan terfokus pada output laporan pajak (SPT) PT. OCEAN PETRO ENERGY, misal pada mekanisme perhitungan PPN-nya apakah sudah benar, lalu apabila terjadi kurang bayar apakah telah sesuai dengan pembayarannya;

Halaman 39 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemesanan faktur pajak masukan untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY di cabang harus melalui kantor pusat PT. OCEAN PETRO ENERGY, kemudian diteruskan ke BUDI SATRIO atau ABDUL CAHLID alias TENGKU. Tetapi proses pembayaran atas faktur pajak masukan ditanggung oleh cabang, karena cabang mengelola keuangannya sendiri;
- Bahwa, biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan setiap faktur pajak baik, kepada BUDI SATRIO maupun kepada ABDUL CHALID adalah berupa imbalan atau fee sebesar 40% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, misalkan faktur pajak yang dipesan adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka imbalan atau fee nya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, tarif fee sebesar 40% merupakan kesepakatan atau nilai yang ditawarkan BUDI SATRIO dan Terdakwa kepada saksi, kemudian saksi setuju/sepakati;
- **Bahwa, yang membayarkan fee pemesanan faktur pajak baik kepada BUDI SATRIO maupun kepada ABDUL CHALID adalah Terdakwa melalui rekening BCA a.n. BONAVENTURA karena yang terkait dengan urusan keuangan semua melalui Terdakwa;**
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemesanan dan penyerahan faktur pajak masukan dari BUDI SATRIO dan ABDUL CHALID alias TENGKU ke PT. OCEAN PETRO ENERGY. Semua perihal teknis pemesanan dan pelaporan pajaknya saksi serahkan ke Terdakwa dan BUDI SATRIO. Saksi hanya mengetahui output/hasil akhirnya sudah berupa SPT Masa PPN yang saksi terima dari Terdakwa atau GALIH;
- Bahwa, dalam SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat NPWP 02.869.782.9-012.000 untuk kurun waktu 2013 - 2014, terdapat Faktur Pajak dari perusahaan-perusahaan (sesuai dengan BAP) yang telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh PT OCEAN PETRO ENERGY Pusat untuk kurun waktu 2013 - 2014 dengan jumlah total Nilai PPN sebesar Rp. 11,291,021,805 dan kurun waktu 2015 dengan jumlah total Nilai PPN sebesar Rp. 6,198,164,836 adalah merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dipesan kepada BUDI

Halaman 40 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



SATRIO dan ABDUL CHALID dan saksi sama sekali tidak mengenal nama-nama perusahaan tersebut;

- Bahwa, dalam SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-012.001 cabang Ampera masa pajak September 2011 s.d April 2013, pada lampiran Pajak Masukan tertera nama-nama perusahaan (sesuai dengan BAP) yang Faktur Pajaknya dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY Cabang Ampera dengan jumlah total nilai PPN sebesar Rp. 1,147,397,875 adalah merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dipesan kepada BUDI SATRIO dan ABDUL CHALID dan saksi sama sekali tidak mengenal nama-nama perusahaan tersebut;
- Bahwa, SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 cabang Lampung masa pajak Februari 2013 s.d Desember 2015, pada lampiran Pajak Masukan tertera nama-nama perusahaan (sesuai dengan BAP) yang Faktur Pajaknya dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Lampung dengan jumlah total nilai PPN sebesar Rp. 4,467,625,516 adalah merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dipesan kepada BUDI SATRIO dan ABDUL CHALID dan saksi sama sekali tidak mengenal nama-nama perusahaan tersebut;
- Bahwa, ringkasan besarnya faktur pajak yang telah digunakan dalam SPT Masa PPN adalah :

No	Unit Kantor	Masa Pajak	Jumlah
1	PT. OPETRO Pusat	Mei 2013 s.d Des 2014	11,291,021,805
2	PT. OPETRO Pusat	Jan s.d Des 2015	6,198,164,836
3	PT.OPETRO cabang Jakarta Ampera	Sept 2011 s.d Des 2013	1,147,397,875
4	PT. OPETRO cabang Lampung	Peb 2013 s.d Des 2014	4,467,625,516
5	PT. OPETRO cabang Lampung	Jan s.d Des 2015	1,426,188,557
			24.530.398.589

dan besarnya fee atau imbalan yang dikeluarkan PT. OCEAN PETRO ENERGY melalui Terdakwa untuk memperoleh faktur pajak dari BUDI SATRIO dan ABDUL CHALID alias TENGKU adalah sebesar 40% x Rp. 24.530.398.589,- yaitu sebesar Rp. 9.812.159.435,- (sembilan milyar delapan ratus dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rekening bank yang dimiliki oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah rekening Bank Mandiri a.n. PT. OCEAN PETRO ENERGY, nomornya saksi tidak ingat, yang digunakan untuk menampung fee KSO. Perusahaan juga menggunakan rekening BCA pribadi Terdakwa a.n. BONAVENTURA DWI WINDU, nomornya saksi tidak ingat, untuk menampung fee penjualan;
- Bahwa, rekening BCA Terdakwa a.n. BONAVENTURA DWI WINDU yang digunakan untuk menampung fee penjualan tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan PT OCEAN PETRO ENERGY. Karena terkait keputusan keuangan yang krusial harus melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa, selama kurun waktu 2011 s.d. 2015 saksi mendapatkan gaji, fee penjualan, dan bonus tahunan yang sifatnya tidak rutin;
- Bahwa, saksi menerima aliran dana dari rekening Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU tersebut yang terkait fee atas penjualan PT. OCEAN PETRO ENERGY;
- Bahwa, yang menandatangani SPT PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah sebagai berikut :
 - a. SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY pusat ditandatangani oleh saksi (EDWYN NOOR LODAYANA);
 - b. SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Ampera ditandatangani oleh saksi (EDWYN NOOR LODAYANA);
 - c. SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Lampung ditandatangani oleh BANDIYO/MIFTAHUDIN;
- Bahwa , sejak tahun 2015 PT. OCEAN PETRO ENERGY telah berhenti memesan faktur pajak kepada ABDUL CHALID alias TENGKU karena ada pemeriksaan dari Kantor Pajak terkait faktur pajak masukan yang dikreditkan oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY.
- bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah.

5. **A FEN**, dengan bersumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan membenarkan isi BAP Penyidikan;

Halaman 42 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdirinya PT. Inti Maju Sentosa yang bekerja sama dengan ABDUL CHALID alias TENGKU dalam kegiatan usaha perdagangan BBM tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai staf konsultan pajak BUDI SATRIO dan membantu melakukan transaksi jual beli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa, saksi berhubungan dengan Terdakwa untuk pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya PT. OCEAN PETRO ENERGY kepada pak ABDUL CHALID alias TENGKU sebagai penerbit faktur pajak melalui perantaraan BUDI SATRIO;
- Bahwa, faktur pajak masukan yang dibeli oleh Terdakwa yaitu untuk kepentingan :
 - (a) PT. OCEAN PETRO ENERGY di Jakarta dari tahun 2013 s.d Januari 2015;
 - (b) PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Lampung dari tahun 2013 s.d Januari 2015;
 - (c) PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Surabaya, pembelian faktur pajak dari tahun 2013 s.d 2014;Seluruh transaksi pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut saksi lakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa, proses pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya oleh Terdakwa dilakukan dengan cara :
 - (a) Terdakwa melalui stafnya yang bernama HERWIN alias AWIN, mengirimkan rekapitulasi berupa rincian pemesanan faktur pajak masukan melalui email ke alamat email pak BUDI SATRIO yaitu s.tama66@yahoo.com dan bsatrio66@yahoo.com dan alamat email saksi yaitu afen_konsult@yahoo.com. Kemudian Terdakwa ataupun HERWIN akan melakukan konfirmasi kepada saksi atau pak BUDI SATRIO;
 - (b) Selanjutnya saksi meneruskan email dari HERWIN alias AWIN dengan alamat email herwinopetro@gmail.com tersebut ke alamat email ABDUL CHALID alias TENGKU cantik.geulis@yahoo.com dan pak BUDI SATRIO akan

Halaman 43 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi ABDUL CHALID alias TENGKU perihal email ataspesanan faktur pajak dari Terdakwa;

- Bahwa, untuk pengiriman faktur pajak apabila masih dalam waktu normal diterimanya faktur pajak setiap tanggal 5, maka faktur pajak dikirim via pos atau TIKI ke kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan Ampera, Jakarta Selatan namun apabila waktunya sudah di atas tanggal 10 setiap bulannya, maka faktur pajak diantar langsung ke PT. OCEAN PETRO ENERGY atau ke kantor konsultan pajak pak BUDI SATRIO, di alamat Ruko Petersburg, Gading Serpong, Tangerang, kemudian dikirim melalui kurir ke kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan Ampera, Jakarta Selatan;
- Bahwa, faktur pajak untuk kantor cabang PT. OCEAN PETRO ENERGY yang ada di Lampung dan Surabaya, juga diserahkan ke Terdakwa, dengan cara mengirimkannya ke kantor pusat PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan Ampera, Jakarta Selatan. Sebelumnya saksi dihubungi Terdakwa atau setelah faktur pajak diterima oleh karyawan yang bernama HERWIN alias AWIN;
- Bahwa, yang mengelola alamat email s.tama66@yahoo.com dan bsatrio66@yahoo.com adalah pak BUDI SATRIO dan saksi diperintah pak BUDI SATRIO untuk membuka email pesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari HERWIN untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY. Selanjutnya email tersebut segera saksi teruskan ke pak ABDUL CHALID alias TENGKU;
- Bahwa, Terdakwa dan BUDI SATRIO sering bertemu untuk melakukan rapat di kantor konsultan pajak BUDI SATRIO di Serpong maupun di kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY di Ampera Jakarta;
- Bahwa, faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dipesan Terdakwa untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY untuk bulan Januari 2013 dan Januari 2015 sama sekali tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran atas pembelian barangnya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembayaran imbalan atau fee pembelian faktur pajak dengan cara transfer atau setor tunai melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening saksi An. A FEN di

Halaman 44 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bank BCA cabang Summarecon Serpong, Tangerang dengan nomor rekening a/c 7130363321 atas permintaan BUDI SATRIO;
- Bahwa, saksi adalah pemilik rekening bank BCA cabang Summarecon Serpong, Tangerang dengan nomor rekening A/c 7130363321 tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui imbalan atau fee atas pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk kantor pusat PT. OCEAN PETRO ENERGY, cabang Ampera Jakarta dan cabang Lampung yang ditransfer oleh Terdakwa adalah sebesar 40 - 50 % dari nilai PPN, yang seluruhnya sebesar Rp. 5.154.404.904,- (lima milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat rupiah);
 - Bahwa, setelah melakukan transfer atau setor tunai ke bank BCA cabang Summarecon Serpong, Tangerang dengan nomor a/c 7130363321 atas nama saksi, Terdakwa akan menghubungi saksi untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah melakukan transfer atau setor tunai atas imbalan atau fee pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;
 - Bahwa, saksi selalu menerima perintah dari BUDI SATRIO dan ABDUL CHALID alias TENGKU untuk segera mentransfer kembali dana imbalan atau fee yang masuk ke rekening saksi tersebut ke rekening yang diinginkan ABDUL CHALID alias TENGKU yaitu :
 - a) rekening BCA atas nama ABDUL CHALID di nomor rekening 7360261446 dan atas nama PERMANA SAPUTRA di BCA nomor rekening 7360430868 (setor tunai);
 - b) rekening bank atas nama ABDUL CHALID di Bank Mandiri nomor rekening 1330007375462;
 - Bahwa, jumlah yang saksi transfer atau setor tunai ke rekening ABDUL CHALID alias TENGKU yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah imbalan atau fee faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sedangkan bagian kantor konsultan pajak BUDI SATRIO sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah imbalan atau fee faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.;
 - Bahwa, saksi sudah dihukum/ dijatuhi pidana atas perbuatan saksi membuat faktur pajak yang tidak sebenarnya tersebut;

Halaman 45 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah.

6. R.S. HADI SANTOSO, dengan bersumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan membenarkan isi BAP Penyidikan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai General Manager Marketing dan Operasional PT. OCEAN PETRO ENERGY tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi sejak tahun 2011 s/d 2015 menjabat sebagai Kepala PT. OCEAN PETRO ENERGY Cabang Belitung dan sejak tahun 2016 s/d pertengahan 2018 sebagai Komisaris PT. OCEAN PETRO ENERGY;
- Bahwa, sebagai Kepala cabang Belitung, tugas saksi adalah mengembangkan usaha dan meneliti kelayakan pasar, namun faktanya lebih banyak dalam rangka rencana pengembangan pasar/market di sana. Sedangkan sebagai Komisaris, saksi tidak pernah dilibatkan karena hanya komisaris di atas kertas saja (komisaris etok-etokan);
- Bahwa, yang mengurus jual beli solar di PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah Terdakwa selaku Manager Marketing dan Operasional, Direktur operasional yaitu MIRZA dan Direktur utama PT. OCEAN PETRO ENERGY yaitu EDWYN NOOR LODAYANA;
- Bahwa, pada tahun 2011, saksi diminta oleh pak DIDIT selaku Direktur PT. OCEAN PETRO ENERGY pada saat itu untuk mencari konsultan pajak untuk mengurus masalah perpajakan karena sejak berdiri tahun 2009 PT. OCEAN PETRO ENERGY belum pernah melaporkan kewajiban perpajakan.
- Bahwa, lalu saksi mengajak BUDI SATRIO, untuk bertemu dengan Terdakwa dan EDWYN NOOR LODAYANA dengan maksud menawarkan jasa BUDI SATRIO sebagai konsultan pajak untuk membantu menyelesaikan kewajiban perpajakan PT. OCEAN PETRO ENERGY. Pertemuan dan perkanalan tersebut dilakukan di kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan L, Komplek Polri, Ampera, Jakarta Selatan;

Halaman 46 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menerima transfer uang dari rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening 5425011666 ke rekening BCA nomor rekening 6870928309 a.n R.S. HADI SANTOSO (sesuai dengan BAP dan BB yang ditunjukkan dalam persidangan) sejumlah total Rp.538.282.755;
- Bahwa, yang menandatangani SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY selama kurun waktu tahun 2011 s.d 2015 yaitu EDWYN NOOR LODAYANA selaku Direktur Utama

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah.

7. **JULIARTI JAYANI**, dengan bersumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan dibuatkan BAP pemeriksaan dan saksi membenarkan isi BAP Penyidikan;
- Bahwa, saksi tidak mengenal atau memiliki hubungan keluarga atau hubungan usaha / pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan Pada KPP Kebayoran Baru IV dengan tugas antara lain penerimaan penyampaian pelaporan SPT dari Wajib Pajak.
- Bahwa, PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat dan Cabang Jakarta telah dikukuhkan sebelumnya sebagai Pengusaha Kena Pajak jauh sebelum tahun 2013 yakni tepatnya tahun 2009 dengan penjelasan sebagai berikut :

a) PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat terdaftar di KPP Balikpapan sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-8670/WPJ.14/KP.1303/2009 tanggal 01 April 2009 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 22 Juli 2009 di KPP Balikpapan dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-880/WPJ.14/KP.1303/2009 tanggal 22 Juli 2009;

Sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-8670/WPJ.14/KP.1303/2009 tanggal 01 April 2009 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-880/WPJ.14/KP.1303/2009 tanggal 22 Juli 2009 tersebut di atas, kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat awalnya berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 09 Batu Ampar, Balikpapan Utara, Balikpapan;

Halaman 47 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) PT. OCEAN PETRO ENERGY Cabang Jakarta terdaftar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-03208/WPJ.04/KP.1203/2009 tanggal 13 November 2009 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 13 November 2009 di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-03256/WPJ.04/KP.1203/2009 tanggal 13 November 2009;
- Bahwa, terkait dengan prosedur pendaftaran ulang Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya perpindahan administrasi yang berkaitan dengan PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat dan Cabang Jakarta dari KPP sebelumnya ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat NPWP 02.869.782.9-012.000 terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat sejak 1 April 2009 sedangkan PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Ampera NPWP 02.869.782.9-012.001 terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat sejak 10 November 2009 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00030/WPJ.28/KP.0303/2013 dan PEM-00030/WPJ.28/KP.0303/2013 (Bersama ini saksi lampirkan Surat Keterangan Terdaftar NPWP PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat dan cabang Ampera;
 - b) PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat sejak 17 April 2013 berdasarkan surat pengukuhan PKP Nomor : PEM-00044/WPJ.28/KP.0303/ 2013 tanggal 15 Januari 2013 sedangkan PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Ampera sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat sejak 4 Januari 2013 berdasarkan surat pengukuhan PKP Nomor : PEM-00044/WPJ.28/KP.0303/ 2013 tanggal 15 Januari 2013. (Bersama ini saksi lampirkan Surat Pengukuhan PKP PT OCEAN PETRO ENERGY Pusat dan cabang Ampera;
 - Bahwa, berdasarkan data pada Aplikasi SIDJP, yang merupakan kewajiban perpajakan PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat yaitu

Halaman 48 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25/29, Pasal 15, Pasal 26, Pasal 4 ayat 2, Pasal 19 dan PPN, sedangkan yang menjadi kewajiban PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Ampera yaitu PPh Pasal 21, pasal 23, Pasal 26, pasal 4 Ayat (2), Pasal 19 dan PPN;

- Bahwa, berdasarkan data Aplikasi SIDJP, Susunan Direksi dan Komisaris PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat dan cabang Ampera adalah :

a) Direktur (Pusat) : EDWYN NOOR LODAYANA;

b) Direktur (Cabang Ampera) : EDWYN NOOR LODAYANA;

Berdasarkan fotokopi akta notaris Hangky Ribowo, SH No. 51 tanggal 18 Maret 1993, tentang Akta Pendirian PT. OCEAN PETRO ENERGY susunan Pemegang Saham PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah sesuai dengan pusat nya di Jakarta yaitu:

NO	NAMA	MODAL DISETOR	
		(Rupiah)	lembar
1	HERY SUSANTO GUN	1.250.000.000	2.500
2	DYAH AYU PERMATASARI	500.000.000	1.000
3.	DIANA ENDAH BUDIARTI	687.500.000	1.375
4	DR. LALU FAUZUL IDHI	62.500.000	125

Dengan susunan direksi dan dewan komisaris sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN
1.	Lalu Fauzul	Direktur Utama
2.	Edwyn Noor Lodayana	Direktur
3.	Rudi Susanto	Direktur
4.	Dyah Ayu Permatasari	Komisaris Utama
5.	Hery Susanto Gun	Komisaris
6.	Diana Endah Budiarti	Komisaris

- Bahwa, dari data Aplikasi SIDJP alamat atau lokasi kedudukan PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat dan cabang Ampera berada di Jl. Wolter Monginsidi No 99, Jakarta Selatan. Dan saksi belum pernah ke lokasi usaha PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat dan cabang Ampera karena sebagai Kepala Seksi Pelayanan saksi tidak berwenang mengunjungi Wajib Pajak ke lokasi usaha. Pengecekan alamat biasanya dilakukan untuk keperluan pengukuhan PKP dan atas penetapan PKP PT. OCEAN PETRO ENERGY telah dilakukan pengecekan lokasi oleh petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa, berdasarkan data pada Aplikasi SIDJP, kegiatan usaha PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat dan cabang Ampera adalah Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak;

Halaman 49 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan data Aplikasi SIDJP, penyampaian/pelaporan SPT Masa PPN a.n. PT. OCEAN PETRO ENERGY pusat NPWP 02.869.782.9-012.000 dan PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Ampera NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Januari 2011 s.d. Desember 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

a) PT. OCEAN PETRO ENERGY pusat, NPWP 02.869.782.9-012.000

- Tahun 2011 s.d. 2012 tidak ada pelaporan SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat;
- Tahun 2013 s.d. 2015 pelaporan SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat dimulai dari masa pajak Mei 2013 s.d. Desember 2015;
- Rincian pelaporan SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat masa pajak Mei 2013 s.d. Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. SPT Masa PPN masa pajak Mei s.d. Desember 2013

No	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Asal
1.	05-May	Normal	S-01050675/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	2,502,367	01/07/2013	ESPT
2.	06-Jun	Normal	S-01059675/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	(8,663,475)	31/07/2013	ESPT
3.	06-Jun	Pmbtul Ke-1	S-01068334/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	(7,454,544)	02/09/2013	ESPT
4.	07-Jul	Normal	S-01069477/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	(51,039,765)	10/09/2013	ESPT
5.	07-Jul	Pmbtul Ke-1	S-01076629/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	(34,921,746)	25/09/2013	ESPT
6.	08-Aug	Normal	S-01076902/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	(16,231,639)	26/09/2013	ESPT
7.	09-Sep	Normal	S-01087478/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	8,540,950	08/11/2013	ESPT
8.	10-Oct	Normal	S-01096782/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	31,391,451	09/12/2013	ESPT
9.	11-Nov	Normal	S-01003635/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2014	243,505,689	17/01/2014	ESPT
10.	12-Dec	Normal	S-01009634/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2014	23,406,858	13/02/2014	ESPT

b. SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2014

No	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Asal
1.	01-Jan	Normal	S-01022289/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2014	126,355,393	18/03/2014	ESPT

Halaman 50 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	02-Feb	Normal	S-01045304/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2014	(680,244,988)	22/05/2014	ESPT
3.	03-Mar	Normal	S-01045305/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2014	(515,113,861)	22/05/2014	ESPT
4.	04-Apr	Normal	S-01057410/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2014	(290,584,748)	10/07/2014	ESPT
5.	05-May	Normal	S-01057411/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2014	(803,181,349)	10/07/2014	ESPT
6.	06-Jun	Normal	S-01069095/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2014	289,085,512	18/08/2014	ESPT
7.	07-Jul	Normal	S-01085963/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2014	47,227,722	06/10/2014	ESPT
8.	08-Aug	Normal	S-01088224/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2014	(84,361,815)	15/10/2014	ESPT
9.	09-Sep	Normal	S-01106242/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2014	(101,866,893)	02/12/2014	ESPT
10.	10-Oct	Normal	S-01107510/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2014	(39,113,131)	10/12/2014	ESPT
11.	10-Oct	Pmbtul Ke-1	S-01001990/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2015	(46,233,131)	14/01/2015	ESPT
12.	11-Nov	Normal	S-01001992/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2015	(89,284,911)	14/01/2015	ESPT
13.	12-Dec	Normal	S-01011267/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2015	420,551,997	06/02/2015	ESPT
14.	12-Dec	Pmbtul Ke-1	S-01022266/PPN1111/WPJ.04/KP.04/03/2015	(32,210,011)	12/03/2015	ESPT

c. SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2015

No	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Asal
1.	01-Jan	Normal	S-01022262/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2015	304,308,392	12/03/2015	ESPT
2.	01-Jan	Pmbtul Ke-1	S-01052157/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2015	304,308,392	03/06/2015	ESPT
3.	02-Feb	Normal	S-01039862/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2015	163,369,207	23/04/2015	ESPT
4.	02-Feb	Pmbtul Ke-1	S-01055971/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2015	163,369,207	16/06/2015	ESPT
5.	03-Mar	Normal	S-01051766/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2015	181,427,599	29/05/2015	ESPT
6.	03-Mar	Pmbtul Ke-1	S-01055976/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2015	298,881,487	16/06/2015	ESPT
7.	04-Apr	Normal	S-01071062/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2015	168,849,393	22/07/2015	ESPT
8.	05-May	Normal	S-01071863/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2015	354,577,070	28/07/2015	ESPT
9.	06-Jun	Normal	S-01094452/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2015	168,769,268	28/09/2015	ESPT
10.	07-Jul	Normal	S-01001339/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2015	302,032,681	12/11/2015	ESPT

Halaman 51 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	08-Aug	Normal	S-01001340/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2015	282,384,796	12/11/2015	ESPT
12.	09-Sep	Normal	S-01001995/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2015	87,526,337	27/11/2015	ESPT
13.	10-Oct	Normal	S-01003138/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2015	63,206,266	29/12/2015	ESPT
14.	11-Nov	Normal	S-01001050/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2016	300,368,856	27/01/2016	ESPT
15.	11-Nov	Pmbtul Ke-1	S-01005626/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2016	Nihil	08/06/2016	ESPT
16.	12-Dec	Normal	S-01003188/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2016	267,397,465	22/03/2016	ESPT
17.	12-Dec	Pmbtul Ke-1	S-01005623/PPN1111/WPJ.30/KP.0403/2016	Nihil	08/06/2016	ESPT

a) PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Ampera, NPWP 02.869.782.9-012.001

- Tahun 2011 s.d. 2013 pelaporan SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Ampera dimulai dari masa pajak September 2011 s.d. April 2013;
- Tahun 2014 s.d. 2015 tidak ada pelaporan SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Ampera;
- Rincian pelaporan SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Ampera masa pajak September 2011 s.d. April 2013 adalah sebagai berikut;

a. SPT Masa PPN masa pajak September 2011 s.d. Desember 2011

No	Masa	Jenis	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Asal
1	09-Sep	Normal	S-01105975/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2011	5,840,000	31/10/2011	DP C
2	10-Oct	Normal	S-01118630/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2011	1,440,000	08/12/2011	DP C
3	11-Nov	Normal	S-01003330/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	7,040,697	17/01/2012	DP C
4	12-Dec	Normal	S-01022276/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	55,174	28/02/2012	DP C

b. SPT Masa PPN masa pajak Januari 2012 s.d. Desember 2012

No	Masa	Jenis	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Asal
1	01-Jan	Normal	S-01022275/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	28,182	28/02/2012	DP C
2	02-	Normal	S-		23/04/20	DP

Halaman 52 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Feb		01045454/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	3,566,182	12	C
3	03-Mar	Normal	S-01045583/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	2,669,051	24/04/2012	DP C
4	04-Apr	Normal	S-01048647/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	4,180,552	09/05/2012	DP C
5	05-May	Normal	S-01062100/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	3,819,592	13/06/2012	DP C
6	06-Jun	Normal	S-01073733/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	2,259,416	13/07/2012	DP C
7	06-Jun	Pembtln Ke-1	S-01104079/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	2,259,416	20/09/2012	Mnu al
8	07-Jul	Normal	S-01088090/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	3,275,810	14/08/2012	DP C
9	07-Jul	Pembtln Ke-1	S-01104080/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	3,275,810	20/09/2012	DP C
10	08-Aug	Normal	S-01095111/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	2,087,996	07/09/2012	DP C
11	09-Sep	Normal	S-01112097/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	11,242,851	17/10/2012	DP C
12	10-Oct	Normal	S-01129157/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	7,895,463	23/11/2012	DP C
13	11-Nov	Normal	S-01142878/PPN1111/WPJ.04/KP.1203/2012	(11,186,17)	28/12/2012	DP C
14	12-Dec	Normal	S-01007666/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	8,062,094	30/01/2013	DP C

c. SPT Masa PPN masa pajak Januari 2012 s.d Desember 2013

N o	Masa	Jenis	BPS	Nilai Pelaporan	Tangg al Lapo r	Asa l
1	01-Jan	Norma l	S-01015974/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	(170,173,096)	27/02/2013	ES PT
2	02-Feb	Norma l	S-01020101/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	(9,960,351)	22/03/2013	ES PT
3	03-Mar	Norma l	S-01031120/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	23,538,860	29/04/2013	ES PT
4	04-Apr	Norma l	S-01040476/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	51,803,641	03/06/2013	ES PT
5	04-Apr	Pembt ln Ke-1	S-01069480/PPN1111/WPJ.04/KP.0403/2013	(13,309,091)	10/09/2013	ES PT

- Bahwa, uraian ringkas isi SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY, NPWP 02.869.782.9-012.000 masa pajak Mei 2013 s.d Desember 2015, yaitu :

a. SPT Masa PPN masa pajak Mei s.d Desember 2013

Halaman 53 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Masa Pajak	Jumlah Seluruh Penyerahan	PK yang harus dipungut sendiri	PM yang dapat diperhitungkan	PPN yang kurang atau (lebih) dibayar
1	Jan				
2	Peb				
3	Mar				
4	April				
5	Mei	4.336.672.035	433.667.202	431.164.835	2.502.367
6	Juni	2.904.883.983	274.829.310	290.947.329	(16.118.019)
7	Juli	5.991.995.729	522.505.032	573.544.797	(51.039.765)
8	Agustus	3.147.765.082	314.776.509	331.008.148	(16.231.639)
9	Sept	5.773.886.262	563.788.627	555.247.677	8.540.950
10	Oktober	7.567.997.609	741.759.761	710.368.310	31.391.451
11	November	23.145.162.889	2.314.516.292	2.071.010.603	243.505.689
12	Desember	18.708.703.005	1.870.870.304	1.847.463.446	23.406.858
	Jumlah	71.577.066.594	7.036.713.037	6.810.755.145	225.957.892

b. SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d Desember 2014

No	Masa Pajak	Jumlah Seluruh Penyerahan	PK yang harus dipungut sendiri	PM yang dapat diperhitungkan	PPN yang kurang atau (lebih) dibayar
1	Januari	18.566.075.211	1.856.607.525	1.730.252.132	126.355.393
2	Pebruari	15.902.404.600	1.590.240.461	2.270.485.449	(680.244.988)
3	Maret	13.624.709.596	1.362.470.962	1.877.584.823	(515.113.861)
4	April	12.992.651.134	1.299.265.119	1.589.849.867	(290.584.748)
5	Mei	21.582.398.307	2.158.239.837	2.961.421.186	(803.181.349)
6	Juni	28.369.890.052	2.836.989.009	2.547.903.497	289.085.512
7	Juli	10.823.967.232	1.082.396.730	1.035.169.008	47.227.722
8	Agustus	13.988.681.525	1.254.568.161	1.338.929.976	(84.361.815)
9	Sept	17.457.256.525	1.617.285.656	1.719.152.549	(101.866.893)
10	Oktober	15.914.460.904	1.547.846.091	1.594.079.222	(46.233.131)
11	November	25.237.722.891	2.523.772.294	2.578.177.205	(54.404.911)
12	Desember	37.539.246.391	3.727.764.645	3.339.422.659	388.341.986
	Jumlah	231.999.464.368	22.857.446.490	24.582.427.573	(1.724.981.083)

c. SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d Desember 2015

No	Masa Pajak	Jumlah Seluruh Penyerahan	PK yang harus dipungut sendiri	PM yang dapat diperhitungkan	PPN yang kurang atau (lebih) dibayar
1	Januari	26.236.642.178	2.592.464.218	2.255.945.815	304.308.392
2	Pebruari	21.053.218.120	2.084.921.815	1.921.552.608	163.369.207
3	Maret	21.923.389.442	2.159.420.760	1.860.539.273	298.881.487

Halaman 54 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	April	34.898.666.090	3.460.986.602	3.292.137.209	168.849.393
5	Mei	49.906.057.569	4.964.570.747	4.609.993.677	354.577.070
6	Juni	46.396.955.737	4.576.130.094	4.407.360.826	168.769.268
7	Juli	28.708.873.128	2.870.887.258	2.561.494.577	309.392.681
8	Agustus	32.547.967.785	3.226.119.452	2.943.734.656	282.384.796
9	Sept	27.741.519.827	2.745.833.791	2.658.307.454	87.526.337
10	Oktober	16.481.305.680	1.613.403.274	1.550.197.008	63.206.266
11	November	35.264.021.521	3.510.220.313	3.209.851.457	300.368.856
12	Desember	25.533.157.395	2.536.906.641	2.269.509.176	267.397.465
	Jumlah	366.691.774.472	36.341.864.965	33.540.623.736	2.801.241.229

- Bahwa, uraian ringkas isi SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Jakarta, NPWP 02.869.782.9-012.000, masa pajak September 2011 s.d April 2013, yaitu :

a. Masa pajak September 2011 s.d Desember 2011

No	Masa Pajak	Jumlah Seluruh Penyerahan	PK yang harus dipungut sendiri	PM yang dapat diperhitungkan	PPN yang kurang atau (lebih) dibayar
1	Jan				
2	Peb				
3	Mar				
4	April				
5	Mei				
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus				
9	Sept	470,000,000	47,000,000	41,160,000	5,840,000
10	Oktober	260,800,000	26,080,000	24,640,000	1,440,000
11	November	704,175,228	70,417,522	63,376,825	7,040,697
12	Desember	410,354,544	37,171,820	37,116,646	55,174
	Jumlah	1,845,329,772	180,669,342	166,293,471	14,375,871

b. Masa pajak Januari s.d Desember 2012

No	Masa Pajak	Jumlah Seluruh Penyerahan	PK yang harus dipungut sendiri	PM yang dapat diperhitungkan	PPN yang kurang atau (lebih) dibayar
1	Januari	143.281.820	10.378.182	10.350.000	28.182
2	Pebruari	474.241.822	47.424.182	43.858.000	3.566.182
3	Maret	630.527.274	59.102.727	56.433.676	2.669.051
4	April	238.800.000	23.880.000	19.699.448	4.180.552
5	Mei	365.009.091	36.500.910	32.681.318	3.819.592
6	Juni	341.046.364	34.104.636	31.845.220	2.259.416
7	Juli	453.979.092	45.397.908	42.122.098	3.275.810
8	Agustus	232.000.000	23.200.000	21.112.004	2.087.996
9	Sept	1.251.234.837	125.123.505	113.880.654	11.242.851
10	Oktober	1.027.985.204	102.798.520	94.903.057	7.895.463
11	November	767.040.983	58.376.827	69.563.000	(11.186.173)
12	Desember	1.208.957.394	120.895.739	112.833.645	8.062.094
	Jumlah	7.134.103.981	687.183.136	649.282.120	37.901.016

c. Masa pajak Januari s.d Desember 2013

No	Masa Pajak	Jumlah Seluruh Penyerahan	PK yang harus	PM yang dapat	PPN yang kurang atau
----	------------	---------------------------	---------------	---------------	----------------------

Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



			dipungut sendiri	diperhitunga n	(lebih) dibayar
1	Januari	1.829.846.415	182.978.108	353.151.204	(170.173.096)
2	Pebruari	2.008.861.880	200.879.789	210.840.140	(9.960.351)
3	Maret	1.928.840.712	192.882.467	169.343.607	23.538.860
4	April	4.549.403.418	454.940.341	416.445.792	(13.309.091)
	Jumlah	10.316.952.425	1.031.680.705	1.149.780.743	(118.100.038)

- bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. **BANDIYO alias BANDI**, keterangan di BAP Penyidikan yang telah disumpah dibacakan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sebagai salah satu manager PT. OCEAN PETRO ENERGI Pusat dan selalu mengawasi dan memberikan masukan terkait kegiatan operasional cabang Lampung tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, yang menunjuk dan mengangkat saksi sebagai Kepala PT. OCEAN PETRO ENERGI cabang Lampung adalah pak EDWYN NOOR LODAYANA selaku Direktur Utama PT. OCEAN PETRO ENERGI;
- Bahwa, masalah administrasi dan perpajakan PT. OCEAN PETRO ENERGI cabang Lampung diserahkan pembinaannya oleh PT. OCEAN PETRO ENERGI Pusat kepada Terdakwa sehingga pada saat datang ke Lampung, Terdakwa banyak membawa contoh-contoh dokumen seperti form model surat jalan, segel, faktur pajak dan juga SPT Masa PPN. Selain itu Terdakwa juga mengajarkan bagaimana cara mengisi SPT Masa PPN;
- Bahwa, tugas pokok dan tanggung jawab saksi sehari-harinya sebagai kepala cabang PT OCEAN PETRO ENERGY cabang Lampung adalah :
 - a) Mencari pasar penjualan BBM (mencari customer);
 - b) Mengatur ketersediaan BBM dan pengirimannya;
 - c) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga;
 - d) Menandatangani faktur pajak dan SPT Masa PPN;
- Bahwa, saksi membuat laporan hasil penjualan BBM yang berisikan nama customer dan jumlah Kiloliter BBM yang dijual,

Halaman 56 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



yang saksi kirimkan melalui surat elektronik (email) kepada Terdakwa dengan alamat email milik HERWIN alias AWIN di herwinopetro@gmail.com, kira-kira 1(satu) minggu kemudian saksi kirimkan fisiknya lewat kurir atau jasa pengiriman;

- Bahwa, selama kurun waktu tahun 2013 s.d 2015, pembelian BBM solar PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Lampung ke PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat melalui hubungan komunikasi saksi dengan Terdakwa di nomor HP 082122682009, kemudian BBM diambil di tempat penimbunan yang disewa PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat di daerah CIWANDAN, BANTEN. Tidak ada sama sekali bukti-bukti pesanan pembelian dan dokumen lainnya seperti invoice, faktur pajak dan sebagainya;
- Bahwa, setiap pembelian BBM solar dari PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat, PT. OCEAN PETRO ENERGY Lampung tetap dikenakan PPN sebesar 10%, namun atas pungutan PPN 10% ini tidak ada faktur pajak yang diterbitkan PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat tetapi diberikan faktur pajak dari perusahaan-perusahaan yang tidak dikenal;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan perusahaan yang faktur pajaknya dikirimkan PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat karena PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Lampung tidak pernah membeli maupun melakukan pembayaran BBM dari perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa, seluruh faktur pajak masukan yang dikirimkan oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY pusat telah dikreditkan PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Lampung dalam SPT Masa PPN tahun 2013 s.d 2015;
- Bahwa, saksi yang menandatangani SPT Masa PPN PT OCEAN PETRO ENERGY selama kurun waktu Pebruari 2013 s.d Desember 2015.

Terhadap isi keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ANDIK TRI SULISTYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU
- Bahwa, Ahli mempunyai pengalaman sebagai Ahli Perpajakan dalam perkara pidana korupsi yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak serta kasus tindak pidana lain yang berkaitan dengan perpajakan. Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Peraturan Perpajakan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, menurut Pasal 4 Undang-Undang PPN, PPN dikenakan atas :
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;Termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah penyerahan barang yang diantaranya diakibatkan adanya transaksi jual beli dengan pihak lain;
- Bahwa, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN);
- Bahwa, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN);
- Bahwa, yang dimaksud dengan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) adalah :
 - 1) Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak;
 - 2) Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP;
- Bahwa, yang dimaksud Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan

Halaman 58 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

- Bahwa, persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerbitkan atau menggunakan Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material :
 - a. Syarat formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 ayat (5) UU PPN atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
 - b. Syarat material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Walaupun FAKTUR PAJAK telah terisi dengan data yang lengkap dan jelas namun ternyata dibuat tidak berdasarkan transaksi bisnis yang riil atau keadaan yang tidak sebenarnya maka dapat dikatakan bahwa faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau Faktur Pajak yang tidak sah adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis (underlying transaction) atau penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Faktur Pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat material seperti dimaksud dalam pasal 13 ayat (9) UU No. 42 Tahun 2009.

- Bahwa, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak” seperti yang dimaksud dalam pasal 39A huruf a UU KUP adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu bukti atau pengakuan/klaim bahwa suatu pihak telah melakukan suatu pungutan pajak dan atas bukti atau pengakuan/klaim tersebut oleh pihak lain dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara.
- Bahwa, yang berwenang menandatangani SPT sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan dalam hal Wajib Pajak adalah

Halaman 59 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Badan, Surat Pemberitahuan harus ditanda tangani oleh Pengurus atau Direksi.

- Bahwa, terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dapat dipidana dengan pasal 39A huruf a UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009.
- Bahwa, terhadap tindak pidana atas menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, tidak hanya dimintakan pertanggung jawaban pidananya terhadap pelaku materielnya saja, namun juga kepada pelaku-pelaku yang turut serta atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dengan pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 yang berbunyi :
"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai wajib pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".
- Bahwa, perbuatan menggunakan faktur pajak tidak SAH tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, karena Faktur Pajak yang tidak sah tersebut telah dikreditkan (sebagai Pajak Masukan). Pajak Masukan ini akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungut pembeli saat menjual BKP. Penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya tersebut mengakibatkan pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam FP tidak sah karena PPN yang tercantum dalam FP tidak sah tersebut tidak pernah disetorkan. Oleh karena itu, jelas pemerintah mengalami kerugian pada pendapatan PPN atas penerbitan FP tidak sah;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 13 ayat (9) UU PPN menyatakan bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material :

Halaman 60 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



- b. Syarat formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 ayat (5) UU PPN atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
- c. Syarat material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Walaupun FAKTUR PAJAK telah terisi dengan data yang lengkap dan jelas namun ternyata dibuat tidak berdasarkan transaksi bisnis yang riil atau keadaan yang tidak sebenarnya maka dapat dikatakan bahwa faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

- Bahwa, sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa, bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
 - pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis (underlying transaction) atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut;
- Bahwa, ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang tindak pidana dibidang perpajakan antara lain :



Pasal 38 UU KUP menyatakan bahwa “Setiap orang yang karena kealpaannya

- ✓ tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau
- ✓ menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun

Pasal 39 UU KUP menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. tidak menyampaikan SPT; atau
 - d. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau;
 - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
 - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau;
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memelihara menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia ; atau;
 - h. perlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau;

Halaman 62 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
2. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir 2”;
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan”;

Pasal 39A UU KUP menyatakan bahwa :

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau;
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak;

Halaman 63 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Pasal 43 UU KUP menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

- Bahwa konsekuensi terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dapat dipidana dengan Pasal 39A huruf a Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009;
- Bahwa, terhadap tindak pidana atas menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya tersebut, tidak hanya dimintakan pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku materiel nya saja namun juga kepada pelaku-pelaku yang turut serta atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 ayat(1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”;

- Bahwa, perbuatan menggunakan faktur pajak tidak sah tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, karena Faktur Pajak yang tidak sah tersebut telah dikreditkan (sebagai Pajak Masukan) oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY, Pajak Masukan (PM) ini akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungut oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY dari pembeli saat menjual BKP. Penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya tersebut mengakibatkan pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah karena PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah tersebut tidak pernah disetorkan.

Halaman 64 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



2. FALIH ALHUSNIEKA, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dasar penunjukan sebagai Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara dari Direktur Jenderal Pajak adalah Surat Nomor ST-796/PJ.01/2018 tanggal 10 September 2018;
- Bahwa, Ahli pernah beberapa kali diminta keterangannya dan bersaksi di Peradilan sebagai Ahli Perpajakan, Ahli Peraturan dan Ahli Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara untuk kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang lain;
- Bahwa, Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU;
- Bahwa, cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk PPN dalam SPT Masa PPN adalah dengan cara mengurangi Pajak Keluaran (PPN yang dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak) dengan Pajak Masukan (PPN yang dibayar atas Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak);
- Bahwa, syarat sahnya faktur pajak diantaranya adalah :
 - Secara Material Faktur Pajak didasarkan atas adanya transaksi ekonomi berupa penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak (underlying transaction);
 - Dipertanggung jawabkan (dilaporkan) oleh pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, yang menerbitkan Faktur Pajak di dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN;
 - Harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajakyaitu pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha;
- Bahwa, konsekuensi hukum di bidang perpajakan atas suatu Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan persyaratan formil dan atau persyaratan material adalah mengakibatkan PPN yang tercantum didalamnya (Pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan;
- Bahwa, faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan

Halaman 65 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana;

- Bahwa, dalam sistem PPN, pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) untuk memungut PPN yang dikenakan terhadap pembeli BKP. Jadi pembeli BKP membayar harga beli barang ditambah PPN atas barang tersebut sebesar 10% dari harga barang. Penjual BKP yang menerima uang pembayaran termasuk PPN-nya menerbitkan Faktur Pajak (FP) yang di dalamnya tercantum nama barang, harga, dan jumlah PPN yang dibayar sebagai tanda terima pemungutan PPN (Pajak Keluaran (PK) bagi penjual). Faktur Pajak ini bagi pembeli merupakan bukti pembayaran PPN di muka (Pajak Masukan (PM) bagi pembeli). Penjual melaporkan Faktur Pajak Keluaran tersebut dalam SPT Masa PPN pada bulan penerbitan FP dengan memperhitungkan Pajak Masukan yang telah dibayar saat perolehan BKP dan membayar pajak yang kurang dibayar apabila PK-nya lebih besar dari pada PM-nya. Demikian pula halnya dengan pembeli BKP, juga melaporkan Faktur Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN pada bulan yang bersangkutan. PM ini akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungut oleh pembeli saat menjual BKP tadi. Dengan demikian, FP mempunyai nilai uang karena dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan akan mengurangi kewajiban penyetoran atas PPN yang dipungut saat menjual BKP (Pajak Keluaran). Jika Faktur Pajak tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya, maka pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam FP tidak sah karena PPN yang tercantum dalam FP tidak sah tersebut tidak pernah disetorkan. Oleh karena itu, pemerintah mengalami kerugian pada pendapatan PPN atas penerbitan FP tidak sah;

Halaman 66 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada dasarnya penggelapan penyetoran PPN dilakukan dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN. Rincian Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN dan Rician Pajak Masukan (PM) direkayasa sedemikian rupa, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang atau bahkan memperoleh restitusi. Adapun caranya bermacam-macam antara lain :

a) Memperbesar/menggelembungkan Pajak Masukan yaitu, antara lain

- Mengkreditkan Faktur Pajak yang sah, tetapi seharusnya tidak dapat dikreditkan karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha;
- Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada transaksinya (fiktif);
- Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif SPT Masa PPN tanpa dilengkapi Faktur Pajak;

b) Memperkecil Pajak Keluaran antara lain :

- Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan Pajak Keluaran
- Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak atau menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN;
- Melaporkan penjualan dalam negeri sebagai ekspor

- Bahwa, kerugian pada pendapatan negara yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan Faktur Pajak yang tidak sah, setidaknya-tidaknya adalah sebesar nilai PPN yang tertera pada Faktur Pajak tidak sah yang diserahkan oleh orang atau sekelompok orang tersebut kepada pengguna dan telah dimanfaatkan sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN pengguna. Karena penggelembungan Pajak Masukan oleh pengguna tersebut mengakibatkan Setoran PPN ke Kas Negara oleh Pengguna menjadi berkurang sebesar jumlah Faktur Pajak tidak sah yang dimanfaatkan;

- Bahwa, Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah sebagai berikut :

1) Kantor Pusat, tahun 2013 – 2014 yaitu:

N	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
---	------	------	-----	-----------

Halaman 67 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o.				
1	PT ABADI TATA NUSANTARA	02.727.026.3-432.000	2014	165,757,708
2	PT ABADISAPTA DUDAUNI ANUGRAH	03.326.495.3-009.000	2014	48,112,512
3	PT ANDIN PERMATA JAYA	66.896.500.7-407.000	2014	199,181,200
4	PT ANGKASA ENGGIH BLITAR	03.332.063.1-005.000	2014	61,500,000
5	PT APRIL SUKSES ABADI	03.312.908.1-008.000	2013	323,694,137
6	PT ARUS BANGUNAN	03.345.244.2-411.000	2014	123,058,606
7	PT ARWANA MERAH BERJAYA	03.288.377.9-027.000	2013	68,209,880
8	PT BAHANA KASTA RANCAMAYA	66.815.510.4-016.000	2014	98,928,576
9	PT BARU SEMPURNA	66.312.872.6-411.000	2014	80,645,526
10	PT BERKAT MULIA LESTARI	03.247.218.5-008.000	2013	344,518,115
11	PT BERKAT MULIA LESTARI	03.247.218.5-008.000	2014	63,656,600
12	PT CAHAYA AGUNG FURNITURE	03.345.229.3-411.000	2014	8,739,000
13	PT CAHAYA MARMER ABADI	03.343.171.9-411.000	2014	131,146,400
14	PT CENTRAL MAKMUR AGROTAMA	03.268.241.1-008.000	2013	158,388,878
15	PT CENTRAL MAKMUR AGROTAMA	03.268.241.1-008.000	2014	69,712,100
16	PT CILENGGANGANG INDAH ALUMUNIUM	66.309.736.8-411.000	2014	127,564,850
17	PT DONINDO MEGAH PRATAMA	66.575.297.8-005.000	2014	214,050,794
18	PT FAJAR SERPONG MANDIRI	66.312.878.3-411.000	2014	62,782,000
19	PT FURINDO CIPTA	66.303.687.9-411.000	2014	197,777,018
20	PT GARUDA MEKAR BERJAYA	03.269.281.6-027.000	2013	124,312,173
21	PT GRACIA DEO PERMATA	66.896.458.8-407.000	2014	60,574,917
22	PT GUNUNG SEWU PERMAI	66.802.652.9-016.000	2014	156,571,810
23	PT HAMPARAN KOLODAUL MAKSIMA	03.326.494.6-009.000	2014	55,490,600
24	PT HARUM NINTRA JAYA	72.102.714.2-411.000	2014	206,166,280
25	PT HIKARI BUANA TATAN	66.171.532.6-017.000	2014	195,455,500
26	PT ILAX SARANA UTAMA	66.848.866.1-407.000	2014	122,607,514
27	PT KARISMA GEMILANG	03.268.102.5-008.000	2013	139,333,000
28	PT KARISMA GEMILANG	03.268.102.5-008.000	2014	69,895,680
29	PT KARYA LOGAM TEKNO	03.343.174.3-411.000	2014	52,242,430
30	PT KEMBANG KIRANA	03.345.224.4-411.000	2014	90,278,480
31	PT KHARISMA PELANGI NUSANTARA	03.269.275.8-027.000	2013	157,100,911
32	PT KHATULISTIWA NUSANTARA JAYA	03.269.276.6-027.000	2013	168,512,320
33	PT KINANTI BULAN PURNAMA	03.269.279.0-027.000	2013	143,697,210
34	PT KURNIA BINTANG SUKSES	02.727.074.3-432.000	2014	191,667,490
35	PT LOGAM INDOMITRA JAYA	03.247.220.1-008.000	2013	174,098,550

Halaman 68 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	PT MAHARAYA TECHNIC INDONESIA	03.288.385.2-027.000	2013	59,276,400
37	PT MARAHA ANUGRAH BINTANG	66.168.090.0-017.000	2014	422,829,807
38	PT MEGARAYA AGUNG JAYA	03.268.240.3-008.000	2013	296,958,170
39	PT MEGARAYA AGUNG JAYA	03.268.240.3-008.000	2014	209,305,640
40	PT MEXTRANDO PRODIATAN	66.640.241.7-407.000	2014	14,489,600
41	PT MITRA PLUS SEJATI	66.848.710.1-407.000	2014	216,553,557
42	PT MULAJADI JAYA	03.323.112.7-045.000	2014	3,660,000
43	PT MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	2013	329,623,922
44	PT MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	2014	202,619,557
45	PT MULTI GLOBAL INTERNATIONAL	02.832.519.9-027.000	2013	85,289,034
46	PT MULYA RAYA	03.345.225.1-411.000	2014	192,908,009
47	PT MURNI JAYA PRIMA	66.789.379.6-412.000	2014	98,736,267
48	PT NAAFI JAYA UTAMA	03.345.226.9-411.000	2014	79,119,560
49	PT NUNATA SARANA SERVICE	03.345.201.2-411.000	2014	318,438,312
50	PT PADANAN CIPTA NUSA	66.890.175.4-407.000	2014	243,045,884
51	PT PANCARAN RADAYA	66.642.751.3-407.000	2014	81,807,596
52	PT PANDA ALAM KHATULISTIWA	03.288.386.0-027.000	2013	64,899,618
53	PT PANJI MEGA SENTOSA	03.312.904.0-008.000	2013	249,348,798
54	PT PARAGAN BITUAL TITAMA	03.332.064.9-005.000	2014	64,601,570
55	PT PRAMBANAN LAKSANA	66.794.214.8-412.000	2014	81,245,600
56	PT PUTRA PAJAJARAN TEHNIK	66.309.739.2-411.000	2014	61,215,324
57	PT RAWINTA BRAMA BERSINAR	03.335.009.1-017.000	2014	65,638,065
58	PT RINJANI BINTANG ABADI	03.224.265.3-008.000	2013	177,547,200
59	PT ROMEO CITRA LESTARI	03.333.585.2-009.000	2014	120,847,215
60	PT ROMEO WIBISANA INDONESIA	03.312.905.7-008.000	2013	197,128,336
61	PT SARINAH MULIA	03.224.265.3-008.000	2014	115,792,110
62	PT SECAMBAH ANUGERAH	03.333.585.2-009.000	2014	97,740,000
63	PT SEDANAN ABADILOKA	03.312.905.7-008.000	2014	264,191,712
64	PT SEJUTA KARYA MANDIRI	03.224.265.3-008.000	2014	208,177,260
65	PT SEMANGAT JAYA	66.307.188.4-411.000	2014	255,821,520
66	PT SUANTAPUI PRATAMA INDAH	66.871.170.8-407.000	2014	178,281,868
67	PT SUNDEYEN PRAKARSA	66.628.284.3-407.000	2014	243,319,864
68	PT SURYA SENTOSA	66.307.102.5-411.000	2014	273,448,923
69	PT TATA SURYA KENCANA	03.345.203.8-411.000	2014	141,622,474
70	PT TEKNO LISTRIK	03.343.173.5-411.000	2014	61,550,400
71	PT TIRTA BAROKAH NUSANTARA	66.896.485.1-407.000	2014	169,280,140

Halaman 69 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	PT USAHA MITRA BERSAMA	03.268.103.3-008.000	2013	175,273,693
73	PT VADILTAMA GAPSONINDO	03.315.697.7-017.000	2014	284,182,235
74	PT VIELTA	03.345.227.7-411.000	2014	162,833,800
75	PT XOIXE KARYA TAMA	66.890.242.2-407.000	2014	66,944,000
	Grand Total			11,291,021,805

2) Kantor Pusat, tahun 2015 yaitu :

No	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	ARWANITO SEMBADA	72.184.141.9-411.000	2015	49,851,820
2	PT AGUNG MAKMUR TERBANGGI	66.794.326.0-412.000	2015	52,162,515
3	PT AMANAH GLOBAL PERSADA JAYA	72.789.181.4-411.000	2015	635,737,753
4	PT ARWANITO SEMBADA	72.184.141.9-411.000	2015	50,009,225
5	PT BEJANA PUTERA KHATULISWA	72.789.222.6-411.000	2015	721,834,566
6	PT BERSAMA LAKSANA CIPTA	72.190.023.1-411.000	2015	81,975,454
7	PT BUNGA SARI ALAMANDA	72.190.139.5-411.000	2015	164,076,959
8	PT GEMAR NIAGA	03.350.994.4-045.000	2015	14,492,000
9	PT HARORO BUANA NUSANTARA	72.789.203.6-411.000	2015	719,444,488
10	PT HARUM BINTANG SEJATI	72.102.714.2-411.000	2015	122,566,500
11	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	72.183.557.7-411.000	2015	339,144,411
12	PT HARWAN DWI PERKASA	72.109.919.0-411.000	2015	228,293,493
13	PT HUMALA PERSADA JAYA	72.789.242.4-411.000	2015	50,578,184
14	PT JANUR HANKAM SEJATI	70.089.413.2-412.000	2015	214,990,464
15	PT KASTURI INDO WIDURI	70.113.797.8-412.000	2015	59,400,000
16	PT KAYU RINGAN PERSADA	70.113.439.7-412.000	2015	79,627,270
17	PT KHARISMA BERDIKARI JUJUNAN	72.110.007.1-411.000	2015	169,667,555
18	PT LAKSANA PRAGA INDO	72.183.443.0-411.000	2015	96,216,000
19	PT MAHATA SENTOSA	72.190.210.4-411.000	2015	100,180,950
20	PT MANGGALA BRAGA BAJA	72.115.946.5-411.000	2015	115,009,439
21	PT MATUMONA INDAH KARYA	72.740.882.5-411.000	2015	41,995,185
22	PT METALINDO MAKSIMA	66.792.343.7-016.000	2015	57,866,494
23	PT NUSA BENING	03.314.854.5-045.000	2015	71,578,187
24	PT OBETO RAGAM CAHAYA	72.189.947.4-411.000	2015	265,427,353
25	PT PERDANA SIANITA	70.113.754.9-412.000	2015	176,209,943
26	PT RAMA KIANI RAYA	66.815.699.5-016.000	2015	52,636,360
27	PT RUMBANA SAKTI	70.113.495.9-412.000	2015	46,499,712
28	PT SAOPHAR PESANGGRAHAN	66.788.884.6-412.000	2015	74,659,215
29	PT SUKABUMI RAIHAN	72.184.187.2-411.000	2015	50,707,712

Halaman 70 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	PT SUKAMULYA PERKASA DANA	70.113.700.2-412.000	2015	135,793,340
31	PT TENSA BERKARYA GLOBAL	72.789.256.4-411.000	2015	729,921,560
32	PT ULUWATI PARATOL	72.109.941.4-411.00	2015	290,762,485
33	PT WAHYU RINGAN SELARAS	70.096.019.8-412.000	2015	138,848,244
	GRAN TOTAL			6,198,164,836

3). Kantor Cabang Jakarta, tahun 2011-2013 yaitu :

No	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	PT BESINDO INDOTAMA RAYA	31.432.373.4-008.000	2012	109,386,674
2	PT BUMI REJO KONSTRUKSINDO	31.365.602.7-018.000	2011	44,199,329
3	PT BUMI REJO PERKASA	31.365.601.9-018.000	2011	12,320,000
4	PT CAKRA DAYA MANUNGAL	31.432.512.7-008.000	2012	18,799,000
5	PT GARUDA MEKAR BERJAYA	03.269.281.6-027.000	2013	119,794,761
6	PT GARUDA MEKAR BERJAYA	03.269.281.6-027.000	2013	32,601,924
7	PT KARIMATA PRATAMA MANDIRI	31.422.376.9-027.000	2012	99,928,944
8	PT KHARISMA PELANGI NUSANTARA	03.269.275.8-027.000	2013	109,680,288
9	PT KHATULISTIWA NUSANTARA JAYA	03.269.276.6-027.000	2013	144,225,853
10	PT KINANTI BULAN PURNAMA	03.269.279.0-027.000	2013	155,491,665
11	PT MITRA SARANA JAYA	03.098.903.2-027.000	2011	44,134,497
12	PT MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	2013	30,362,818
13	PT RODA HIDUP SEMESTA	02.979.415.3-014.000	2012	31,418,136
14	PT SINAR BERKAH ENERGI	03.078.055.5-086.000	2012	13,417,891
15	PT SUKARAMAI INDAH JAYA	31.445.705.2-022.000	2012	149,826,004
16	PT TRIMITRA INTERBUANA	02.979.412.0-014.000	2012	31,810,091
	Grand Total			1,147,397,875

4). Kantor Cabang Lampung, tahun 2013-2014 yaitu :

➤ Tahun 2013 s.d 2014 :

No	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	PT. ABADI TATA NUSANTARA	02.727.026.3-432.000	2014	171,488,000
2	PT. ABADISAPTA DUDAUNIANUGRAH	03.326.495.3-009.000	2014	101,692,000
3	PT. ANGKASA ENGGIH BLITAR	03.332.063.1-005.000	2014	178,423,500
4	PT. APRIL SUKSES ABADI	03.312.908.1-008.000	2013	47,091,600
5	PT. ARDHANA DWITUNGAL	66.568.074.0-005.000	2014	19,088,000
6	PT. ARWANA MERAH BERJAYA	03.288.377.9-027.000	2013	34,900,000
7	PT. BAHANA KASTA RANCAMAYA	66.815.510.4-016.000	2014	45,686,300
8	PT. BARU SEMPURNA	66.312.872.6-411.000	2014	45,863,000
9	PT. BUMBUNGAN	66.626.911.3-	2014	

Halaman 71 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUHAYA	407.000		108,818,014
10	PT. CAHAYA AGUNG FURNITURE	03.345.229.3-411.000	2014	98,543,000
11	PT. CAPRIASI MULTI NASIONAL PERKASA	03.234.795.7-022.000	2013	28,229,500
12	PT. CENTRAL MAKMUR AGROTAMA	03.268.241.1-008.000	2013	25,736,000
13	PT. DINAMIC SUTRA ABADI	03.234.793.2-008.001	2013	50,030,500
14	PT. ERIKANDO INDAH	66.637.005.1-407.000	2014	111,024,300
15	PT. FURINDO CIPTA	66.303.687.9-411.000	2014	102,340,000
16	PT. GARUDA MEKAR BERJAYA	03.269.281.6-027.000	2013	12,257,000
17	PT. GRACIA DEO PERMATA	66.896.458.8-407.000	2014	100,187,732
18	PT. HAMPARAN KOLODAUL MAKSIMA	03.326.494.6-009.000	2014	154,804,500
19	PT. HIKARI BUANA TATAN	66.171.532.6-017.000	2014	56,702,636
20	PT. ILAX SARANA UTAMA	66.848.866.1-407.000	2014	126,438,500
21	PT. KARISMA GEMILANG	03.268.102.5-008.000	2013	49,422,500
22	PT. KARYA LOGAM TEKNO	03.343.174.3-411.000	2014	57,805,600
23	PT. KEMBANG KIRANA	03.345.224.4-411.000	2014	155,232,739
24	PT. KHARISMA PELANGI NUSANTARA	03.269.275.8-027.000	2013	8,381,500
25	PT. KHATULISTIWA NUSANTARA JAYA	03.269.276.6-027.000	2013	32,332,000
26	PT. KINANTI BULAN PURNAMA	03.269.279.0-027.000	2013	16,763,000
27	PT. KING KILABAN JAYA	02.832.246.9-027.000	2013	41,844,000
28	PT. KURNIA BINTANG SUKSES	02.727.074.3-432.000	2014	145,054,500
29	PT. LABUAN LALANG BERSINAR	03.234.797.3-022.000	2013	98,938,000
30	PT. MAHAKAM SAPTASA	66.794.600.8-412.000	2014	35,638,500
31	PT. MAHARAYA TECHNIC INDONESIA	03.288.385.2-027.000	2013	40,563,000
32	PT. MEGARAYA AGUNG JAYA	03.268.240.3-008.000	2013	18,100,000
33	PT. MITRA PLUS SEJATI	66.848.710.1-407.000	2014	120,369,900
34	PT. MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	2013	22,222,500
35	PT. NAAFI JAYA UTAMA	03.345.226.9-411.000	2014	52,610,750
36	PT. NUNATA SARANA SERVICE	03.345.201.2-411.000	2014	75,390,000
37	PT. PADANAN CIPTA NUSA	66.890.175.4-407.000	2014	27,214,000
38	PT. PANCARAN RADAYA	66.642.751.3-407.000	2014	42,665,000
39	PT. PANDA ALAM KHATULISTIWA	03.288.386.0-027.000	2013	30,175,000
40	PT. PANJI MEGA SENTOSA	03.312.904.0-008.000	2013	48,903,000
41	PT. PARAGAN BITUAL TITAMA	03.332.064.9-005.000	2014	148,414,000
42	PT. RAPITAMA SARANA GLOBAL	66.877.401.1-407.000	2014	86,913,000
43	PT. RAWINTA BRAMA BERSINAR	03.335.009.1-017.000	2014	53,303,500
44	PT. ROMEO CITRA LESTARI	03.333.585.2-009.000	2014	38,173,000

Halaman 72 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	PT. ROMEO WIBISANA INDONESIA	03.312.905.7-008.000	2013	47,370,000
46	PT. SARINAH MULIA	66.312.851.0-411.000	2014	58,319,500
47	PT. SECAMBAH ANUGERAH	66.640.154.2-407.000	2014	35,512,000
48	PT. SEMANGAT JAYA	66.307.188.4-411.000	2014	196,962,000
49	PT. SUANTAPUI PRATAMA INDAH	66.871.170.8-407.000	2014	151,187,000
50	PT. SUMBER ALAS SUMSEL	03.250.891.3-027.000	2013	30,472,500
51	PT. SUNDEYEN PRAKARSA	66.628.284.3-407.000	2014	51,128,369
52	PT. SURYA SENTOSA	66.307.102.5-411.000	2014	196,587,736
53	PT. TATA SURYA KENCANA	03.345.203.8-411.000	2014	99,732,400
54	PT. TEKNO LISTRIK	03.343.173.5-411.000	2014	129,669,300
55	PT. TIRTA BAROKAH NUSANTARA	66.896.485.1-407.000	2014	194,371,740
56	PT. USAHA MITRA BERSAMA	03.268.103.3-008.000	2013	47,055,000
57	PT. VADILTAMA GAPSONINDO	03.315.697.7-017.000	2014	120,024,400
58	PT. XOIXE KARYA TAMA	66.890.242.2-407.000	2014	43,460,500
Grand Total				4,467,625,516

➤ Tahun 2015 :

No	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	PT. ARWANITO SEMBADA	72.184.141.9-411.000	2015	149,055,800
2	PT. BUNGA SARI ALAMANDA	72.190.139.5-411.000	2015	44,895,800
3	PT. DWI RANDU CIPTA	70.089.481.9-412.000	2015	210,075,235
4	PT. HARUM BINTANG SEJATI	72.102.714.2-411.000	2015	71,020,972
5	PT. HARUMI CAHAYA CIPTA	72.183.557.7-411.000	2015	80,205,100
6	PT. HARWAN DWI PERKASA	72.109.919.0-411.000	2015	46,552,000
7	PT. HUMALA PERSADA JAYA	72.789.242.4-411.000	2015	89,502,400
8	PT. KASTURI INDO WIDURI	70.113.797.8-412.000	2015	137,703,500
9	PT. KHARISMA BERDIKARI JUNUNAN	72.110.007.1-411.000	2015	79,819,240
10	PT. MAHATA SENTOSA	72.190.210.4-411.000	2015	154,092,426
11	PT. MANGGALA BRAGA BAJA	72.115.946.5-411.000	2015	129,596,500
12	PT. MATUMONA INDAH KARYA	72.740.882.5-411.000	2015	51,697,500
13	PT. METALINDO MAKSIMA	66.792.343.7-016.000	2015	43,788,480
14	PT. PERDANA SIANITA	70.113.754.9-412.000	2015	49,183,900
15	PT. RAMA KIANI RAYA	66.815.699.5-016.000	2015	40,808,704
16	PT. SUKAMULYA PERKASA DANA	70.113.700.2-412.000	2015	48,191,000
Grand Total				1,426,188,557

Halaman 73 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Sehingga total jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu :

No	Unit Kantor	Masa Pajak	Jumlah
1	PT OPETRO Pusat	Mei 2013 s.d Des 2014	11,291,021,805
2	PT OPETRO Pusat	Jan s.d Des 2015	6,198,164,836
3	PT OPETRO cabang Jakarta Ampera	Sept 2011 s.d April 2013	1,147,397,875
4	PT OPETRO cabang Lampung	Peb 2013 s.d Des 2014	4,467,625,516
5	PT OPETRO cabang Lampung	Jan s.d Des 2015	1,426,188,557
	GRAND TOTAL		24.530.398.589

- Bahwa, perbuatan mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY selama kurun waktu tahun 2011 s.d 2015, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, karena seluruh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dijadikan sebagai UNSUR PENGURANG dari PPN yang telah dipungut melalui faktur pajak keluaran yang diserahkan PT. OCEAN PETRO ENERGY ke pembeli (customer) atau dengan kata lain Hak Negara atas PPN yang dipungut PT. OCEAN PETRO ENERGY menjadi berkurang sebesar faktur pajak yang digunakan atau dikreditkan, yaitu :

No	Unit Kantor	Masa Pajak	Jumlah
1	PT OPETRO Pusat	Mei 13 s.d Des 2014	11,291,021,805
2	PT OPETRO Pusat	Jan s.d Des 2015	6,198,164,836
3	PT OPETRO cabang Jakarta	Sept 2011 s.d April 2013	1,147,397,875
4	PT OPETRO cabang Lampung	Peb 2013 s.d Des 2014	4,467,625,516
5	PT OPETRO cabang Lampung	Jan s.d Des 2015	1,426,188,557
	GRAND TOTAL		24.530.398.589

(terbilang dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan menandatangani berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa, jabatan terdakwa di PT. OCEAN PETRO ENERGY selama kurun waktu tahun 2011 s.d. 2015 adalah Manager Operasional dan Logistik, terdakwa diangkat berdasarkan keputusan direksi PT. OCEAN PETRO ENERGY;

Halaman 74 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Manajer Operasional dan Logistic adalah mengurus stock BBM kantor pusat dan pengiriman barang ke customer serta mengkoordinir laporan penjualan kantor pusat;
- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2011, terdakwa mengenal BUDI SATRIO pada saat perusahaan mulai aktif melakukan kegiatan trading solar melalui saksi R.S. HADI SANTOSO atau SONY yang memperkenalkan BUDI SATRIO sebagai konsultan yang akan membantu perusahaan dalam melaporkan kewajiban perpajakan PT. OCEAN PETRO ENERGY. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, pak EDWYN NOOR LODAYANA dan pak SONY;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan saksi ABDUL CHALID alias TENGKU diperkenalkan oleh BUDI SATRIO, setelah beberapa pesanan faktur pajak berjalan, kenal dan bertemu dilakukan di Jakarta;
- Bahwa, awal kronologisnya PT. OCEAN PETRO ENERGY menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yaitu BUDI SATRIO sangat meyakinkan teman-teman PT. OCEAN PETRO ENERGY dalam menceritakan kemampuan dan pengalamannya di bidang perpajakan, dan ada akhirnya BUDI SATRIO menawarkan faktur pajak kepada teman-teman di PT. OCEAN PETRO ENERGY yang berguna untuk mengurangi nilai PPN yang harus disetor ke Kas Negara oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY. BUDI SATRIO menjamin bahwa faktur pajak masukan yang digunakan nanti "AMAN" dan tidak akan dicurigai pihak pajak;
- Bahwa, pihak yang memutuskan untuk menerima tawaran "faktur pajak masukan" dari BUDI SATRIO adalah pak EDWYN NOOR LODAYANA dan diketahui oleh Terdakwa dan teman-teman yang ada di PT. OCEAN PETRO ENERGY, seperti pak SONY HADI SANTOSO dan pak ARIE KENDALISADA. Karena lebih dulu beroperasi adalah cabang Surabaya, maka penggunaan faktur pajak masukan tersebut dilakukan terlebih dahulu di Surabaya. Untuk teknis operasional pemesanan faktur pajaknya diserahkan pak EDWYN NOOR LODAYANA kepada terdakwa, selaku Manajer Operasional dan Logistik;
- Bahwa, cara pemesanan faktur pajak kepada BUDI SATRIO sebagai berikut:
 - Terdakwa membuat rekapitulasi penjualan PT. OCEAN PETRO ENERGY dalam satu bulan dalam bentuk table yang berisi informasi : Jumlah HSD Solar Yang Dijual (dalam Liter), Harga HSD Solar Per Liter (dalam rupiah), jumlah tersebut

Halaman 75 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi terlebih dahulu dengan pembelian HSD Solar yang sebenarnya kepada sesama pemegang INU;

- Diperoleh jumlah pembelian HSD solar yang tidak memiliki dokumen, berdasarkan hal itu, terdakwa memesan faktur pajaknya kepada BUDI SATRIO. Pemesanan dilakukan dengan cara email (surat elektronik), pada awalnya melalui alamat email terdakwa di bona_dwi@yahoo.com atau email HERWIN herwinopetro@gmail.com ke alamat email BUDI SATRIO di b_satrio66@yahoo.com dan s.tama66@yahoo.com. Setelah itu terdakwa menghubungi BUDI SATRIO untuk mengkonfirmasinya;
- Selain kepada BUDI SATRIO, pemesanan faktur pajak juga dilakukan melalui alamat email A FEN, karyawan konsultan pajak BUDI SATRIO, di alamat email afen_konsult@yahoo.com. Pengiriman ke alamat email itu atas persetujuan BUDI SATRIO;
- Sejak Pebruari 2015, pemesanan faktur pajak dikirimkan langsung ke ABDUL CHALID alias TENGKU di alamat email cantik.geulis@yahoo.com. terdakwa menghubungi ABDUL CHALID untuk mengabarkan pesanan faktur pajak telah dikirim;
- Bahwa, pemesanan faktur pajak masukan untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY di cabang harus melalui kantor pusat PT. OCEAN PETRO ENERGY, kemudian diteruskan ke BUDI SATRIO atau TENGKU. tetapi proses pembayaran atas faktur pajak masukan ditanggung oleh cabang karena cabang mengelola keuangannya sendiri;
- Bahwa, biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan setiap faktur pajak baik, kepada BUDI SATRIO maupun kepada ABDUL CHALID adalah berupa imbalan atau FEE sebesar 40% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak;
- Bahwa, proses penyerahan faktur pajak masukan dari BUDI SATRIO dan TENGKU ke PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah :
 - Seluruh pesanan faktur pajak, baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat PT. OCEAN PETRO ENERGY, kantor cabang Jakarta Ampera,, Kantor cabang Surabaya dan Lampung, dikirim lewat TIKI ke kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY

Halaman 76 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jalan Wolter Monginsidi 99, Jakarta Selatan, hanya sekali-sekali saja diantar langsung lewat kurir BUDI SATRIO;

- Setelah diterima oleh HERWIN alias AWING akan dipilah-pilah faktur pajak masukannya untuk dikirimkan ke kantor cabang Surabaya dan Lampung, menggunakan jasa pengiriman (TIKI);
- Bahwa, seluruh penyampaian SPT Masa PPN yang dibuat sendiri oleh karyawan bernama GALIH PARAMANDANA, sudah memasukkan seluruh pajak masukan, biasanya HERWIN setiap bulannya hampir tepat waktu menyerahkan fisik pesanan faktur pajak yang diterima ke GALIH;
- Bahwa, pesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya bulan Desember 2013 dan Januari 2015 untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY, sama sekali tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran atas pembelian barangnya. Oleh karena faktur pajak tersebut dibeli berdasarkan imbalan atau fee sebesar 40% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak kepada BUDI SATRIO dan ABDUL CHALID alias TENGKU. Berdasarkan contoh di atas imbalan fee nya sebesar :
 - a) Faktur pajak Des 2013 senilai Rp. 707.547.836,- dibeli dengan nilai sebesar Rp. 283.019.134,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu seratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - b) Sedangkan pesanan faktur pajak Januari 2015 senilai Rp. 455.727.536,- dibeli dengan nilai sebesar Rp. 182.291.014,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat belas rupiah);

Seluruh pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut merupakan hasil pembicaraan/ konfirmasi dari EDWYN NOOR LODAYANA;

- Bahwa, pembayaran faktur pajak dilakukan dengan cara transaksi perbankan, yaitu :
 - transfer atau setor tunai bank oleh Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU ke rekening A FEN di bank BCA cabang Gading Serpong dengan nomor rekening a/c 7130363321, atas pembayaran faktur pajak tahun 2011 s.d 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk tahun 2015, oleh karena pemesanan faktur pajaknya langsung ditujukan kepada ABDUL CHALID, maka pembayaran fee fakturnya ditujukan ke rekening :

- Rekening bank Mandiri atas nama ABDUL CHALID;
- Rekening bank BCA atas nama PERMANA SAPUTRA;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui rekening bank BCA cabang Gading Serpong dengan nomor rekening a/c 7130363321 atas nama A FEN untuk tahun 2012 s.d 2013 karena rekening tersebut digunakan untuk menampung uang imbalan atau fee dari hasil jual beli faktur pajak dari PT. OCEAN PETRO ENERGY kantor pusat, kantor cabang Ampera dan kantor cabang Lampung yang ditransfer oleh Terdakwa melalui "pemindahan langsung dari tahapan, transfer via ATM dr tahapan, LLG Otomatis dan transaksi lainnya"dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Mutasi	Nominal	Keterangan
1	21-Jan-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	61.922.682	PPN OPETRO
2	23-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DRI TAHAPAN	10.312.900	5425011666- BONAVENTURA
3	28-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DRI TAHAPAN	5.948.750	5425011666- BONAVENTURA
4	4-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DRI TAHAPAN	10.371.720	5425011666- BONAVENTURA
5	7-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DRI TAHAPAN	468.261	5425011666- BONAVENTURA
6	4-Apr-13	TRANSFER VIA ATM DRI TAHAPAN	1.223.250	5425011666- BONAVENTURA
7	4-Apr-13	TRANSFER VIA ATM DRI TAHAPAN	7.086.720	5425011666- BONAVENTURA
8	19-Apr-13	TRANSFER VIA ATM DRI TAHAPAN	6.265.800	5425011666IDR
9	19-Apr-13	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	23.640.240	TRSF DR 5425011666
10	14-May-13	SETORAN TUNAI DGN BERITA	77.700.000	BONA
11	27-May-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	21.831.726	Pemb. Pajak Opetro
12	10-Jun-13	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	58.556.000	TRSF DR 5425011666
13	18-Jun-13	TRANSFER VIA ATM DRI TAHAPAN	9.141.750	5425011666IDR
14	19-Jun-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	27.206.812	pajak opetro - a/c 7010615594
15	21-Jun-13	SETORAN TUNAI DGN BERITA	67.519.909	SSLAN MEI 2013
16	21-Jun-13	SETORAN TUNAI DGN BERITA	12.886.364	SSLAN APRIL 2013
17	2-Jul-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5.941.473	Transfer
18	2-Jul-13	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	24.359.850	TRSF DR 5425011666
19	2-Jul-13	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	67.799.585	TRSF DR 5425011666
20	18-Jul-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	30.844.143	KSO Opetro -a/c 7010615594
21	30-Jul-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	25.822.767	KSO Opetro- 7010315594
22	4-Sep-13	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	89.669.625	TRSF DR 5425011666
23	9-Sep-13	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	307.281.763	TRSF DR 5425011666
24	12-Sep-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	6.164.985	OP
25	1-Nov-13	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	123.342.471	TRSF DR 5425011666

Halaman 78 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	1-Nov-13	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	44.244.600	TRSF DR 5425011666
27	6-Nov-13	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	102.777.273	TRSF DR 5425011666
28	6-Nov-13	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	5.292.000	TRSF DR 5425011666
29	9-Dec-13	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	178.295.228	TRSF DR 5425011666
30	9-Dec-13	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	25.452.630	TRSF DR 5425011666
31	6-Jan-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	29.991.750	TRSF DR 5425011666
32	13-Jan-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	50.086.300	TRSF DR 5425011666
33	4-Feb-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	43.614.150	TRSF DR 5425011666
34	10-Feb-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	212.264.350	TRSF DR 5425011666
35	7-Mar-14	TRANSFER VIA ATM DRI TAHAPAN	48.817.515	5855005911IDR
36	18-Mar-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	164.314.000	TRSF DR 5425011666
37	7-Apr-14	TRANSFER VIA ATM DR TAHAPAN	3.926.000	5425011666-BONAVENTURA
38	7-Apr-14	TRANSFER VIA ATM DR TAHAPAN	6.700.000	5425011666-BONAVENTURA
39	11-Apr-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	73.922.000	TRSF DR 5425011666
40	7-May-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	115.690.000	TRSF DR 5425011666
41	9-May-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	212.082.000	TRSF DR 5425011666
42	5-Jun-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	85.492.000	TRSF DR 5425011666
43	11-Jun-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	203.175.000	TRSF DR 5425011666
44	7-Jul-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	104.937.000	TRSF DR 5425011666
45	8-Jul-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	284.113.000	TRSF DR 5425011666
46	14-Jul-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	2.304.148	5425011666-BONAVENTURA
47	5-Aug-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	149.188.500	TRSF DR 5425011666
48	6-Aug-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	188.922.000	TRSF DR 5425011666
49	5-Sep-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	121.844.000	TRSF DR 5425011666
50	12-Sep-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	199.104.722	TRSF DR 5425011666
51	6-Oct-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	131.185.400	TRSF DR 5425011666
52	20-Oct-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	286.686.000	TRSF DR 5425011666
53	27-Oct-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	3.000.592	5425011666-BONAVENTURA
54	11-Nov-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	94.593.400	TRSF DR 5425011666
55	17-Nov-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	234.520.800	TRSF DR 5425011666
56	8-Dec-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	298.825.900	TRSF DR 5425011666
57	8-Dec-14	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	98.226.100	TRSF DR 5425011666
58	14-Jan-15	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	114.254.000	TRSF DR 5425011666
59	14-Jan-15	PMINDHAN LGSNG DR TAHAPAN	153.253.000	TRSF DR 5425011666
		JUMLAH	5.154.404.904	

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan rekening bank BCA cabang Gading Serpong dengan nomor a/c 7130363321 atas nama A FEN tersebut dari BUDI SATRIO;
- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan transaksi ke rekening bank Mandiri nomor 1330012451910 atas nama ABDUL CHALID alias

Halaman 79 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENGGU sebesar Rp. 658.383.938,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dalam rangka pembayaran fee atau imbalan atas pesanan faktur pajak selama tahun 2015, yang ditujukan kepada ABDUL CHALID dengan perincian sebagai berikut :

No	TANGGAL	CBNG	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1	25-Feb-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI WINDU	50,000,000
2	25-Feb-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	50,000,000
3	25-Feb-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	50,000,000
4	25-Feb-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	50,000,000
5	31-Mar-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	50,000,000
6	31-Mar-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	50,000,000
7	8-Apr-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	44,563,214
8	8-Apr-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	2,740,909
9	17-Apr-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	50,000,000
10	17-Apr-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	50,000,000
11	23-Apr-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	41,043,764
12	9-May-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	50,000,000
13	9-May-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	50,000,000
14	1-Jun-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	50,000,000
15	1-Jun-2015	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BONAVENTURA DWI W	20,036,051
			Jumlah		658,383,938

- Bahwa, yang menandatangani seluruh SPT Masa PPN PT. OCEAN PETRO ENERGY, NPWP 02.869.782.9-012.000 masa Januari 2013 s.d Desember 2015 yang telah disampaikan ke KPP Pratama Kebayoran Baru Empat adalah EDWIN NOOR LODAYANA selaku Direktur Utama PT. OCEAN PETRO ENERGY;
- Bahwa, yang menerima kompensasi imbalan faktur pajak di PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah Terdakwa, EDWYN NOOR LODAYANA, RS HADI SANTOSO dan ARIE KENDALISADA. Namun kompensasi yang diterima jumlahnya tidak sebesar 60% melainkan hanya sedikit saja yang diperoleh. Itupun Terdakwa tidak dapat memastikannya karena tidak ada pencatatan yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2011 s.d 2015;

Halaman 80 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara pembayaran atas pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Surabaya dan Lampung yaitu :
 - a) yang melakukan transaksi pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat melalui Terdakwa dan EDWYN NOOR LODAYANA;
 - b) Terdakwa dan Pak EDWYN NOOR LODAYANA meminta cabang untuk menyetorkan uang Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut masing-masing cabang PT. OCEAN PETRO ENERGY ke rekening Terdakwa di bank BCA A/c 5425011666 atas nama BONAVENTURA DWI WINDU;
 - c) Setelah uang masuk ke rekening BCA terdakwa, maka terdakwa akan membayarkan imbalan atau FEE faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ke rekening bank BCA atas nama A FEN. Selesai transfer, Terdakwa konfirmasi ke A FEN dan ke ABDUL CHALID alias TENGGU;
 - d) Sejak tahun 2015, membayarkan imbalan atau FEE faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya terdakwa transfer ke rekening bank Mandiri atas nama ABDUL CHALID dan bank BCA atas nama PERMANA SAPUTRA (anak ABDUL CHALID);
- Bahwa, kronologis penggunaan rekening terdakwa pada bank BCA nomor rekening A/c 5425011666 untuk menampung uang Pajak Pertambahan Nilaisebagai berikut :
 - Pada awalnya sekitar tahun 2011 s.d 2012, rekening yang digunakan untuk menampung uang Pajak Pertambahan Nilai adalah rekening milik pak EDWYN NOOR LODAYANA;
 - Kemudian pak EDWYN NOOR LODAYANA dan rekan-rekan lainnya seperti RS HADI SANTOSO alias SONY dan ARIE KENDALISADA meminta terdakwa untuk membuka rekening bank BCA agar dapat digunakan untuk menampung uang Pajak Pertambahan Nilai. terdakwa tidak dapat menolaknya, hingga akhirnya pun menggunakan rekening bank BCA dengan nomor rekening 5425011666;

Halaman 81 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sudah beberapa lama berjalan, terdakwa sebenarnya menyampaikan keberatan atas penggunaan rekening bank BCA terdakwa tersebut, namun direksi tetap meminta terdakwa untuk terus menggunakan rekening bank pribadi tersangka di bank BCA;
- Penggunaan rekening bank BCA atas nama terdakwa nomor rekening A/c 5425011666, terus digunakan sampai dengan bulan Desember 2015.
- bahwa, perbuatan Terdakwa dan teman-teman dari PT Ocean dalam menggunakan faktur pajak yang tidak sebenarnya berhenti sejak tahun 2015 karena ada teguran / pemberitahuan dari Kantor Pajak;
- bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.		Penetapan Pengadilan Nomor : 267/Pen.Pid/2019/PN.Tjk tanggal 25 Februari 2019
	PRIN-10.SITA/PJ.05/2/2019 tanggal 15 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none">1) Fotocopy Print Out SI DJP Penyampaian SPT PPN PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 Masa Januari 2013 s.d. Desember 2015 sebanyak 3 (tiga) lembar2) Fotocopy SPT PPN Masa Pebruari s.d. Juni 2013 dan Agustus s.d. Desember 2013 Normal dan Pembetulan PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) set3) Fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. Desember 2014 Normal dan Pembetulan PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) set4) Fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. Agustus 2015 Normal dan Pembetulan PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 10 (sepuluh) set5) Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar NPWP No. PEM-00030/WPJ.28/KP.0303/2013 a.n. PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 1 (satu) lembar6) Fotocopy Surat Pengukuhan PKP No. PEM-00044/WPJ.28/KP.0303/ 2013 tanggal 15 Januari 2013 a.n. PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 1 (satu) lembar7) Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi PKP NO. LHV-04/WPJ.28/KP.03/2012 sebanyak 5 (lima) lembar8) Fotocopy Print Out SI DJP Kewajiban Perpajakan a.n. PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.		Penetapan Pengadilan Nomor : 358/Pen.Pid/2019/PN Bdg tanggal 15 Maret 2019
	PRIN-14.SITA/PJ.052/2019 tanggal 18 Februari 2019	1) Fotokopi Rekening Koran BCA Nomor 7360261446 a.n. ABDUL CHALID, S.E sebanyak 1 (satu) set 2) Fotokopi buku catatan penjualan faktur sebanyak 1 (satu) set
3.		Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 16 April 2019
	PRIN-17.SITA/PJ.052/2019 tanggal 20 Februari 2019	1) Fotocopy Legalitas PT OCEAN PETRO ENERGY tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set 2) Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 14453K/10DJM.O/2009 sebanyak 1 (satu) set 3) Fotocopy Kuasa Usaha No. 021/SKU-SMD/OPETRO/XI/2012 sebanyak 1 (satu) set 4) Fotocopy Kuasa Usaha No. 072/SKU-LMP/OPETRO/IV/2016 sebanyak 1 (satu) set
4.		Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 16 April 2019
	PRIN-20.SITA/PJ.052/2019 tanggal 19 Maret 2019	1) Fotocopy Draft Laporan Penjualan PT Ocean Petro Energy Cab. Lampung bulan Pebruari-Mei dan Oktober-Desember tahun 2013 sebanyak 7 (tujuh) lembar 2) Fotocopy Draft Laporan Penjualan PT Ocean Petro Energy Cab. Lampung bulan Januari-Pebruari tahun 2014 sebanyak 2 (dua) lembar 3) Fotocopy Draft Laporan Penjualan PT Ocean Petro Energy Cab. Lampung bulan Januari-Pebruari dan Agustus tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) lembar 4) Fotocopy SPT PPN Masa Pebruari s.d. Juni dan Oktober s.d. Desember tahun 2013 status Normal dan Pembetulan 1, 2 dan 3 sebanyak 21 (dua puluh satu) set 5) Fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. Desember tahun 2014 status Normal dan Pembetulan 1, 2, 3, 4 dan 5 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) set 6) Fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. Desember tahun 2015 status Normal dan Pembetulan 1 sebanyak 17 (tujuh belas) set 7) Fotocopy Faktur Pajak No.010001-14.82249113, Invoice dan Surat Jalan No. 9113/MPS/I/06/2014 sebanyak 3 (tiga) lembar 8) Fotocopy Print Out Email dr herwinopetro@gmail.com ke Opetro Lampung perihal Faktur IN OPE Lampung bulan Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set 9) Fotocopy Print Out Email dr herwinopetro@gmail.com ke Opetro Lampung perihal Faktur IN OPE Lampung bulan Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) set 10) Fotocopy Faktur Pajak Masukan PT Ocean Petro Energy bulan Mei 2015 sebanyak 1 (satu) set 11) Fotocopy Faktur Pajak Masukan PT Ocean Petro Energy bulan Juni 2015 sebanyak 1 (satu) set
5.		Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-

Halaman 83 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



		Sel tanggal 16 April 2019
	PRIN- 23.SITA/PJ.05 2/2019 tanggal 20 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none">1) Fotocopy Print Out Rekening Koran No. 5425011666 a.n. Bonaventura Dwi Windu tgl. 29-Mar-2010 sd 16-Des-2016 sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar2) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.001) bulan Januari 2013 sebanyak 1 (satu) set3) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.001) bulan Pebruari 2013 sebanyak 1 (satu) set4) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.001) bulan Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set5) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.001) bulan April 2013 sebanyak 1 (satu) set6) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set7) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set8) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set9) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set10) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan September 2013 sebanyak 1 (satu) set11) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set12) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Nopember 2013 sebanyak 1 (satu) set13) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set14) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set15) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Pebruari 2014 sebanyak 1 (satu) set16) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy bulan Maret 2014 sebanyak 1 (satu) set17) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan April 2014 sebanyak 1 (satu) set

Halaman 84 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>18) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Mei 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>19) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Juni 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>20) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Juli 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>21) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>22) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan September 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>23) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set</p>
6.		Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 16 April 2019
	PRIN-38.SITA/PJ.052/2019 tanggal 2 April 2019	<p>1) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00210/WPJ.04/KP.0403/2013 sebanyak 1 (satu) lembar</p> <p>2) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00585/WPJ.04/KP.0403/2013 sebanyak 1 (satu) lembar</p> <p>3) Fotokopi Surat Permintaan Sertifikat Elektronik Nomor 079/ADM-TAX/OPETRO/VI/2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>4) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak September 2011 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>5) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Oktober 2011 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>6) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak November 2011 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>7) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Desember 2011 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>8) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Januari 2012 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>9) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Februari 2012 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>10) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2012 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>11) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak April 2012 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>12) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Mei 2012 sebanyak 1 (satu) set</p>

Halaman 85 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



		(satu) set
		13) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Juni 2012 sebanyak 1 (satu) set
		14) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Juli 2012 sebanyak 1 (satu) set
		15) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Juli 2012 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		16) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Agustus 2012 sebanyak 1 (satu) set
		17) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak September 2012 sebanyak 1 (satu) set
		18) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) set
		19) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak November 2012 sebanyak 1 (satu) set
		20) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Desember 2012 sebanyak 1 (satu) set
		21) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Januari 2013 sebanyak 1 (satu) set
		22) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Februari 2013 sebanyak 1 (satu) set
		23) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set
		24) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak April 2013 sebanyak 1 (satu) set
		25) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak April 2013 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		26) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set
		27) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set
		28) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juni 2013 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		29) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		30) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juli 2013 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		31) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set
		32) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak September 2013 sebanyak 1 (satu) set
		33) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set
		34) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak November 2013 sebanyak 1 (satu) set
		35) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set
		36) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set
		37) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Februari 2014 sebanyak 1 (satu) set
		38) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2014 sebanyak 1 (satu) set
		39) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak April 2014 sebanyak 1 (satu) set
		40) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Mei 2014 sebanyak 1 (satu) set
		41) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juni 2014 sebanyak 1 (satu) set
		42) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juli 2014 sebanyak 1 (satu) set
		43) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) set
		44) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak September 2014 sebanyak 1 (satu) set
		45) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set
		46) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Oktober 2014 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		47) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP

Halaman 87 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02.869.782.9-012.000 Masa Pajak November 2014 sebanyak 1 (satu) set
		48) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set
		49) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2014 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		50) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Januari 2015 sebanyak 1 (satu) set
		51) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Januari 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		52) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Februari 2015 sebanyak 1 (satu) set
		53) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Februari 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		54) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2015 sebanyak 1 (satu) set
		55) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		56) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak April 2015 sebanyak 1 (satu) set
		57) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Mei 2015 sebanyak 1 (satu) set
		58) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juni 2015 sebanyak 1 (satu) set
		59) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juli 2015 sebanyak 1 (satu) set
		60) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) set
		61) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak September 2015 sebanyak 1 (satu) set
		62) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Oktober 2015 sebanyak 1 (satu) set
		63) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak November 2015 sebanyak 1 (satu) set
		64) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak November 2015

Halaman 88 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set 65) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set 66) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
7.		Penetapan Pengadilan Nomor : 1655/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 09 Juli 2019
		1) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-8670/WPJ.14/KP.1303/2009 tanggal 01 April 2009 sebanyak 1 (satu) lembar 2) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-880WPJ.14/KP.1303/2009 tanggal 22 Juli 2009 sebanyak 1 (satu) lembar 3) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-03208/WPJ.04/KP.1203/2009 tanggal 13 November 2009 sebanyak 1 (satu) lembar 4) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-03256WPJ.04/KP.1203/2009 tanggal 13 November 2009 sebanyak 1 (satu) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan PT. Ocean Petro Energy dengan jabatan selama kurun waktu tahun 2011 s.d. 2015 adalah sebagai Manager Operasional dan Logistik dan terdakwa diangkat berdasarkan keputusan direksi PT. OCEAN PETRO ENERGY;
- Bahwa, tugas terdakwa sebagai Manajer Operasional dan Logistic adalah mengurus stock BBM kantor pusat dan pengiriman barang ke customer serta mengkoordinir laporan penjualan kantor pusat;
- Bahwa, kegiatan usaha PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah perdagangan BBM solar Industri atau yang dikenal dengan HSD dan Solar HSD tersebut dibeli dari perusahaan rekanan PERTAMINA untuk dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan industri yang ada di JABODETABEK;
- Bahwa, alamat PT. OCEAN PETRO ENERGY terdaftar di Jl. Wolter Monginsidi No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sedangkan alamat operasional sekarang adalah di Jl. Terogong Raya No. 6B, Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa, kewajiban PT. OCEAN PETRO ENERGY selaku pemegang INU dalam penyaluran BBM Solar HSD adalah :

Halaman 89 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembelian BBM HSD Solar : harus dilakukan kepada sesama pemegang Izin Usaha Niaga Umum (INU) dan seluruh pembelian BBM solar tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat MIGAS selama 3 bulan sekali (triwulan);
- b) Sedangkan penjualan BBM HSD Solar bebas dilakukan kepada siapa saja, asalkan saja sumber atau asal usul BBM HSD solarnya benar keberadaannya (tidak menjual BBM Solar black market);
- Bahwa, cabang-cabang PT. OCEAN PETRO ENERGY ada di Surabaya, Lampung dan lain-lain dan semua cabang sudah dikukuhkan menjadi Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang membuat SPT dan membayar PPN;
- Bahwa, pada tahun 2011, saksi Sonny diminta oleh pak DIDIT selaku Direktur PT. OCEAN PETRO ENERGY pada saat itu untuk mencari konsultan pajak untuk mengurus masalah perpajakan karena sejak berdiri tahun 2009 PT. OCEAN PETRO ENERGY belum pernah melaporkan kewajiban perpajakan.
- Bahwa, kemudian saksi Sony mengajak BUDI SATRIO, untuk bertemu dengan Terdakwa dan EDWYN NOOR LODAYANA dengan maksud menawarkan jasa BUDI SATRIO sebagai konsultan pajak untuk membantu menyelesaikan kewajiban perpajakan PT. OCEAN PETRO ENERGY. Pertemuan dan perkanalan tersebut dilakukan di kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan L, Komplek Polri, Ampera, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tahun 2012, Budi Satrio dihubungi oleh PT. Ocean Petro Energy melalui Direktur Edwin Noor Lodaya, Sony dan Terdakwa untuk melanjutkan pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya namun untuk kepentingan PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat, cabang Ampera Jakarta dan cabang Lampung. Atas pesanan faktur pajak tersebut, PT. Ocean Petro Energy, yaitu Edwin, Sony dan Terdakwa sudah menentukan imbalan Budi Satrio dan ABDUL CHALID yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% (dihitung dari imbalan atau fee jual beli faktur pajak setelah dikurangi setoran PPN ke kantor pajak atau SSP);
- bahwa, kemudian pemesanan faktur masukan yang tidak benar tersebut berlanjut
- Bahwa, proses pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 90 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Ocean Petro Energy melalui Terdakwa atau HERWIN alias AWIN, mengirimkan rekapitulasi berupa rincian pemesanan faktur pajak masukan melalui email herwinopetro@gmail.com ke alamat email Budi Satrio yaitu s.tama66@yahoo.com dan alamat email AFEN (staf Budi Satrio) afen_konsult@yahoo.com. Setelah dikirim, PT. Ocean Petro Energy melalui Terdakwa atau HERWIN akan mengkonfirmasi kepada saksi Budi Satrio atau staff i bernama A FEN;
 - Selanjutnya saksi meneruskan email dari PT. Ocean Petro Energy yang dikirim HERWIN alias AWIN tersebut ke alamat email ABDUL CHALID alias TENGKU cantik.geulis@yahoo.com. kemudian saksi atau A FEN akan menghubungi ABDUL CHALID alias TENGKU perihal pesanan faktur pajak dari PT. Ocean Petro Energy
- Bahwa, Untuk pengiriman faktur pajak yang sudah selesai dari ABDUL CHALID, apabila masih dalam waktu normal setiap tanggal 5 maka faktur pajak dikirim via pos atau TIKI ke kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan Ampera, Jakarta Selatan akan tetapi apabila waktunya sudah di atas tanggal 10 maka faktur pajak diantar ke kantor konsultan pajak Budi Satrio, di alamat Ruko Petersburg, Gading Serpong, Tangerang kemudian dikirim melalui kurir ke PT. OCEAN PETRO ENERGY;
- Bahwa, faktur pajak untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Lampung dan Surabaya dikirim ke kantor pusat PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan Ampera, Jakarta Selatan. Sebelumnya saksi dihubungi PT. Ocean Petro Energy melalui Terdakwa atau setelah faktur pajak diterima oleh Terdakwa atau HERWIN alias AWIN;
- Bahwa, faktur pajak yang dikirim disertai lampirannya yaitu invoice, tanda terima dan surat jalan;
- Bahwa, di PT. Ocean Petro Energy pegawai yang bertugas mengisi pajak adalah Saksi Galih Paramandana dan saksi Agung Prayitno yang menerangkan bahwa dalam Menyusun SPT tahunan PT. Ocean Petro Energy mereka mendapatkan data untuk penjualan (faktur faktur pajak keluaran) dari Nico sedangkan data pembelian (faktur pajak masukan) diperoleh dari Herwin (Alm) atau Terdakwa dalam map-map yang sudah ditandai untuk kantor pusat/cabang dengan instruksi agar faktur pajak tersebut dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. Ocean Petro Energy;

Halaman 91 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SPT Masa PPN PT. Ocean Petro Energy ditandatangani oleh Saksi Edwin Noor Lodayana selaku Direktur;
- Bahwa, rekening bank yang dimiliki oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah rekening Bank Mandiri a.n. PT. OCEAN PETRO ENERGY, yang digunakan untuk menampung fee KSO. Perusahaan juga menggunakan rekening BCA pribadi Terdakwa a.n. BONAVENTURA DWI WINDU, untuk menampung fee penjualan;
- Bahwa, rekening BCA Terdakwa a.n. BONAVENTURA DWI WINDU yang digunakan untuk menampung fee penjualan tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan PT OCEAN PETRO ENERGY. Dan rekening ini yang digunakan untuk membayar fee 40% kepada Budi Satrio, Tengku Chalid melalui rekening A Fen untuk membeli faktur-faktur pajak yang tidak sebenarnya yang digunakan oleh PT Ocean Petro Energy;
- Bahwa, sejak tahun 2015 PT. OCEAN PETRO ENERGY telah berhenti memesan faktur pajak kepada ABDUL CHALID alias TENGKU karena ada pemeriksaan dari Kantor Pajak terkait faktur pajak masukan yang dikreditkan oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY.
- Bahwa, Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah sebagai berikut:

3) Kantor Pusat, tahun 2013 – 2014 yaitu:

No.	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	PT ABADI TATA NUSANTARA	02.727.026.3-432.000	2014	165,757,708
2	PT ABADISAPTA DUDAUNI ANUGRAH	03.326.495.3-009.000	2014	48,112,512
3	PT ANDIN PERMATA JAYA	66.896.500.7-407.000	2014	199,181,200
4	PT ANGKASA ENGGIH BLITAR	03.332.063.1-005.000	2014	61,500,000
5	PT APRIL SUKSES ABADI	03.312.908.1-008.000	2013	323,694,137
6	PT ARUS BANGUNAN	03.345.244.2-411.000	2014	123,058,606
7	PT ARWANA MERAH BERJAYA	03.288.377.9-027.000	2013	68,209,880
8	PT BAHANA KASTA RANCAMAYA	66.815.510.4-016.000	2014	98,928,576
9	PT BARU SEMPURNA	66.312.872.6-411.000	2014	80,645,526
10	PT BERKAT MULIA LESTARI	03.247.218.5-008.000	2013	344,518,115
11	PT BERKAT MULIA LESTARI	03.247.218.5-008.000	2014	63,656,600
12	PT CAHAYA AGUNG FURNITURE	03.345.229.3-411.000	2014	8,739,000
13	PT CAHAYA MARMER ABADI	03.343.171.9-411.000	2014	131,146,400
14	PT CENTRAL MAKMUR AGROTAMA	03.268.241.1-008.000	2013	158,388,878

Halaman 92 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	PT CENTRAL MAKMUR AGROTAMA	03.268.241.1-008.000	2014	69,712,100
16	PT CILENGGANG INDAH ALUMINIUM	66.309.736.8-411.000	2014	127,564,850
17	PT DONINDO MEGAH PRATAMA	66.575.297.8-005.000	2014	214,050,794
18	PT FAJAR SERPONG MANDIRI	66.312.878.3-411.000	2014	62,782,000
19	PT FURINDO CIPTA	66.303.687.9-411.000	2014	197,777,018
20	PT GARUDA MEKAR BERJAYA	03.269.281.6-027.000	2013	124,312,173
21	PT GRACIA DEO PERMATA	66.896.458.8-407.000	2014	60,574,917
22	PT GUNUNG SEWU PERMAI	66.802.652.9-016.000	2014	156,571,810
23	PT HAMPARAN KOLODAUL MAKSIMA	03.326.494.6-009.000	2014	55,490,600
24	PT HARUM NINTRA JAYA	72.102.714.2-411.000	2014	206,166,280
25	PT HIKARI BUANA TATAN	66.171.532.6-017.000	2014	195,455,500
26	PT ILAX SARANA UTAMA	66.848.866.1-407.000	2014	122,607,514
27	PT KARISMA GEMILANG	03.268.102.5-008.000	2013	139,333,000
28	PT KARISMA GEMILANG	03.268.102.5-008.000	2014	69,895,680
29	PT KARYA LOGAM TEKNO	03.343.174.3-411.000	2014	52,242,430
30	PT KEMBANG KIRANA	03.345.224.4-411.000	2014	90,278,480
31	PT KHARISMA PELANGI NUSANTARA	03.269.275.8-027.000	2013	157,100,911
32	PT KHATULISTIWA NUSANTARA JAYA	03.269.276.6-027.000	2013	168,512,320
33	PT KINANTI BULAN PURNAMA	03.269.279.0-027.000	2013	143,697,210
34	PT KURNIA BINTANG SUKSES	02.727.074.3-432.000	2014	191,667,490
35	PT LOGAM INDOMITRA JAYA	03.247.220.1-008.000	2013	174,098,550
36	PT MAHARAYA TECHNIC INDONESIA	03.288.385.2-027.000	2013	59,276,400
37	PT MARAHA ANUGRAH BINTANG	66.168.090.0-017.000	2014	422,829,807
38	PT MEGARAYA AGUNG JAYA	03.268.240.3-008.000	2013	296,958,170
39	PT MEGARAYA AGUNG JAYA	03.268.240.3-008.000	2014	209,305,640
40	PT MEXTRANDO PRODIATAN	66.640.241.7-407.000	2014	14,489,600
41	PT MITRA PLUS SEJATI	66.848.710.1-407.000	2014	216,553,557
42	PT MULAJADI JAYA	03.323.112.7-045.000	2014	3,660,000
43	PT MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	2013	329,623,922
44	PT MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	2014	202,619,557
45	PT MULTI GLOBAL INTERNATIONAL	02.832.519.9-027.000	2013	85,289,034
46	PT MULYA RAYA	03.345.225.1-411.000	2014	192,908,009
47	PT MURNI JAYA PRIMA	66.789.379.6-412.000	2014	98,736,267
48	PT NAAFI JAYA UTAMA	03.345.226.9-411.000	2014	79,119,560
49	PT NUNATA SARANA SERVICE	03.345.201.2-411.000	2014	318,438,312
50	PT PADANAN CIPTA NUSA	66.890.175.4-407.000	2014	243,045,884

Halaman 93 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	PT PANCARAN RADAYA	66.642.751.3-407.000	2014	81,807,596
52	PT PANDA ALAM KHATULISTIWA	03.288.386.0-027.000	2013	64,899,618
53	PT PANJI MEGA SENTOSA	03.312.904.0-008.000	2013	249,348,798
54	PT PARAGAN BITUAL TITAMA	03.332.064.9-005.000	2014	64,601,570
55	PT PRAMBANAN LAKSANA	66.794.214.8-412.000	2014	81,245,600
56	PT PUTRA PAJAJARAN TEHNIK	66.309.739.2-411.000	2014	61,215,324
57	PT RAWINTA BRAMA BERSINAR	03.335.009.1-017.000	2014	65,638,065
58	PT RINJANI BINTANG ABADI	03.224.265.3-008.000	2013	177,547,200
59	PT ROMEO CITRA LESTARI	03.333.585.2-009.000	2014	120,847,215
60	PT ROMEO WIBISANA INDONESIA	03.312.905.7-008.000	2013	197,128,336
61	PT SARINAH MULIA	03.224.265.3-008.000	2014	115,792,110
62	PT SECAMBAH ANUGERAH	03.333.585.2-009.000	2014	97,740,000
63	PT SEDANAN ABADILOKA	03.312.905.7-008.000	2014	264,191,712
64	PT SEJUTA KARYA MANDIRI	03.224.265.3-008.000	2014	208,177,260
65	PT SEMANGAT JAYA	66.307.188.4-411.000	2014	255,821,520
66	PT SUANTAPUI PRATAMA INDAH	66.871.170.8-407.000	2014	178,281,868
67	PT SUNDEYEN PRAKARSA	66.628.284.3-407.000	2014	243,319,864
68	PT SURYA SENTOSA	66.307.102.5-411.000	2014	273,448,923
69	PT TATA SURYA KENCANA	03.345.203.8-411.000	2014	141,622,474
70	PT TEKNO LISTRIK	03.343.173.5-411.000	2014	61,550,400
71	PT TIRTA BAROKAH NUSANTARA	66.896.485.1-407.000	2014	169,280,140
72	PT USAHA MITRA BERSAMA	03.268.103.3-008.000	2013	175,273,693
73	PT VADILTAMA GAPSONINDO	03.315.697.7-017.000	2014	284,182,235
74	PT VIELTA	03.345.227.7-411.000	2014	162,833,800
75	PT XOIXE KARYA TAMA	66.890.242.2-407.000	2014	66,944,000
	Grand Total			11,291,021,805

4) Kantor Pusat, tahun 2015 yaitu :

No	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	ARWANITO SEMBADA	72.184.141.9-411.000	2015	49,851,820
2	PT AGUNG MAKMUR TERBANGGI	66.794.326.0-412.000	2015	52,162,515
3	PT AMANAH GLOBAL PERSADA JAYA	72.789.181.4-411.000	2015	635,737,753
4	PT ARWANITO SEMBADA	72.184.141.9-411.000	2015	50,009,225
5	PT BEJANA PUTERA KHATULISWA	72.789.222.6-411.000	2015	721,834,566
6	PT BERSAMA LAKSANA CIPTA	72.190.023.1-411.000	2015	81,975,454
7	PT BUNGA SARI ALAMANDA	72.190.139.5-411.000	2015	164,076,959
8	PT GEMAR NIAGA	03.350.994.4-045.000	2015	14,492,000
9	PT HARORO BUANA NUSANTARA	72.789.203.6-	2015	

Halaman 94 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		411.000		719,444,488
10	PT HARUM BINTANG SEJATI	72.102.714.2-411.000	2015	122,566,500
11	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	72.183.557.7-411.000	2015	339,144,411
12	PT HARWAN DWI PERKASA	72.109.919.0-411.000	2015	228,293,493
13	PT HUMALA PERSADA JAYA	72.789.242.4-411.000	2015	50,578,184
14	PT JANUR HANKAM SEJATI	70.089.413.2-412.000	2015	214,990,464
15	PT KASTURI INDO WIDURI	70.113.797.8-412.000	2015	59,400,000
16	PT KAYU RINGAN PERSADA	70.113.439.7-412.000	2015	79,627,270
17	PT KHARISMA BERDIKARI JUJUNAN	72.110.007.1-411.000	2015	169,667,555
18	PT LAKSANA PRAGA INDO	72.183.443.0-411.000	2015	96,216,000
19	PT MAHATA SENTOSA	72.190.210.4-411.000	2015	100,180,950
20	PT MANGGALA BRAGA BAJA	72.115.946.5-411.000	2015	115,009,439
21	PT MATUMONA INDAH KARYA	72.740.882.5-411.000	2015	41,995,185
22	PT METALINDO MAKSIMA	66.792.343.7-016.000	2015	57,866,494
23	PT NUSA BENING	03.314.854.5-045.000	2015	71,578,187
24	PT OBETO RAGAM CAHAYA	72.189.947.4-411.000	2015	265,427,353
25	PT PERDANA SIANITA	70.113.754.9-412.000	2015	176,209,943
26	PT RAMA KIANI RAYA	66.815.699.5-016.000	2015	52,636,360
27	PT RUMBANA SAKTI	70.113.495.9-412.000	2015	46,499,712
28	PT SAOPHAR PESANGGRAHAN	66.788.884.6-412.000	2015	74,659,215
29	PT SUKABUMI RAIHAN	72.184.187.2-411.000	2015	50,707,712
30	PT SUKAMULYA PERKASA DANA	70.113.700.2-412.000	2015	135,793,340
31	PT TENSA BERKARYA GLOBAL	72.789.256.4-411.000	2015	729,921,560
32	PT ULUWATI PARATOL	72.109.941.4-411.000	2015	290,762,485
33	PT WAHYU RINGAN SELARAS	70.096.019.8-412.000	2015	138,848,244
	GRAN TOTAL			6,198,164,836

3). Kantor Cabang Jakarta, tahun 2011-2013 yaitu :

N o	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	PT BESINDO INDOTAMA RAYA	31.432.373.4-008.000	2012	109,386,674
2	PT BUMI REJO KONSTRUKSINDO	31.365.602.7-018.000	2011	44,199,329
3	PT BUMI REJO PERKASA	31.365.601.9-018.000	2011	12,320,000
4	PT CAKRA DAYA MANUNGAL	31.432.512.7-008.000	2012	18,799,000
5	PT GARUDA MEKAR BERJAYA	03.269.281.6-027.000	2013	119,794,761
6	PT GARUDA MEKAR BERJAYA	03.269.281.6-027.000	2013	32,601,924
7	PT KARIMATA PRATAMA MANDIRI	31.422.376.9-027.000	2012	99,928,944
8	PT KHARISMA PELANGI NUSANTARA	03.269.275.8-027.000	2013	109,680,288

Halaman 95 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PT Khatulistiwa Nusantara Jaya	03.269.276.6-027.000	2013	144,225,853
10	PT Kinanti Bulan Purnama	03.269.279.0-027.000	2013	155,491,665
11	PT Mitra Sarana Jaya	03.098.903.2-027.000	2011	44,134,497
12	PT Mulia Sukses Makmur	03.268.242.9-008.000	2013	30,362,818
13	PT Roda Hidup Semesta	02.979.415.3-014.000	2012	31,418,136
14	PT Sinar Berkah Energi	03.078.055.5-086.000	2012	13,417,891
15	PT Sukaramai Indah Jaya	31.445.705.2-022.000	2012	149,826,004
16	PT Trimitra Interbuana	02.979.412.0-014.000	2012	31,810,091
	Grand Total			1,147,397,875

4). Kantor Cabang Lampung, tahun 2013-2014 yaitu :

> Tahun 2013 s.d 2014 :

No	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	PT. ABADI TATA NUSANTARA	02.727.026.3-432.000	2014	171,488,000
2	PT. ABADISAPTA DUDAUNI ANUGRAH	03.326.495.3-009.000	2014	101,692,000
3	PT. ANGKASA ENGGIH BLITAR	03.332.063.1-005.000	2014	178,423,500
4	PT. APRIL SUKSES ABADI	03.312.908.1-008.000	2013	47,091,600
5	PT. ARDHANA DWITUNGAL	66.568.074.0-005.000	2014	19,088,000
6	PT. ARWANA MERAH BERJAYA	03.288.377.9-027.000	2013	34,900,000
7	PT. BAHANA KASTA RANCAMAYA	66.815.510.4-016.000	2014	45,686,300
8	PT. BARU SEMPURNA	66.312.872.6-411.000	2014	45,863,000
9	PT. BUMBUNGAN SUHAYA	66.626.911.3-407.000	2014	108,818,014
10	PT. CAHAYA AGUNG FURNITURE	03.345.229.3-411.000	2014	98,543,000
11	PT. CAPRIASI MULTI NASIONAL PERKASA	03.234.795.7-022.000	2013	28,229,500
12	PT. CENTRAL MAKMUR AGROTAMA	03.268.241.1-008.000	2013	25,736,000
13	PT. DINAMIC SUTRA ABADI	03.234.793.2-008.001	2013	50,030,500
14	PT. ERIKANDO INDAH	66.637.005.1-407.000	2014	111,024,300
15	PT. FURINDO CIPTA	66.303.687.9-411.000	2014	102,340,000
16	PT. GARUDA MEKAR BERJAYA	03.269.281.6-027.000	2013	12,257,000
17	PT. GRACIA DEO PERMATA	66.896.458.8-407.000	2014	100,187,732
18	PT. HAMPARAN KOLODAUL MAKSIMA	03.326.494.6-009.000	2014	154,804,500
19	PT. HIKARI BUANA TATAN	66.171.532.6-017.000	2014	56,702,636
20	PT. ILAX SARANA UTAMA	66.848.866.1-407.000	2014	126,438,500
21	PT. KARISMA GEMILANG	03.268.102.5-008.000	2013	49,422,500
22	PT. KARYA LOGAM TEKNO	03.343.174.3-411.000	2014	57,805,600
23	PT. KEMBANG KIRANA	03.345.224.4-411.000	2014	155,232,739
24	PT. KHARISMA PELANGI NUSANTARA	03.269.275.8-027.000	2013	8,381,500
25	PT. Khatulistiwa	03.269.276.6-	2013	

Halaman 96 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NUSANTARA JAYA	027.000		32,332,000
26	PT. KINANTI BULAN PURNAMA	03.269.279.0-027.000	2013	16,763,000
27	PT. KING KILABAN JAYA	02.832.246.9-027.000	2013	41,844,000
28	PT. KURNIA BINTANG SUKSES	02.727.074.3-432.000	2014	145,054,500
29	PT. LABUAN LALANG BERSINAR	03.234.797.3-022.000	2013	98,938,000
30	PT. MAHAKAM SAPTASA	66.794.600.8-412.000	2014	35,638,500
31	PT. MAHARAYA TECHNIC INDONESIA	03.288.385.2-027.000	2013	40,563,000
32	PT. MEGARAYA AGUNG JAYA	03.268.240.3-008.000	2013	18,100,000
33	PT. MITRA PLUS SEJATI	66.848.710.1-407.000	2014	120,369,900
34	PT. MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	2013	22,222,500
35	PT. NAAFI JAYA UTAMA	03.345.226.9-411.000	2014	52,610,750
36	PT. NUNATA SARANA SERVICE	03.345.201.2-411.000	2014	75,390,000
37	PT. PADANAN CIPTA NUSA	66.890.175.4-407.000	2014	27,214,000
38	PT. PANCARAN RADAYA	66.642.751.3-407.000	2014	42,665,000
39	PT. PANDA ALAM KHATULISTIWA	03.288.386.0-027.000	2013	30,175,000
40	PT. PANJI MEGA SENTOSA	03.312.904.0-008.000	2013	48,903,000
41	PT. PARAGAN BITUAL TITAMA	03.332.064.9-005.000	2014	148,414,000
42	PT. RAPITAMA SARANA GLOBAL	66.877.401.1-407.000	2014	86,913,000
43	PT. RAWINTA BRAMA BERSINAR	03.335.009.1-017.000	2014	53,303,500
44	PT. ROMEO CITRA LESTARI	03.333.585.2-009.000	2014	38,173,000
45	PT. ROMEO WIBISANA INDONESIA	03.312.905.7-008.000	2013	47,370,000
46	PT. SARINAH MULIA	66.312.851.0-411.000	2014	58,319,500
47	PT. SECAMBAH ANUGERAH	66.640.154.2-407.000	2014	35,512,000
48	PT. SEMANGAT JAYA	66.307.188.4-411.000	2014	196,962,000
49	PT. SUANTAPUI PRATAMA INDAH	66.871.170.8-407.000	2014	151,187,000
50	PT. SUMBER ALAS SUMSEL	03.250.891.3-027.000	2013	30,472,500
51	PT. SUNDEYEN PRAKARSA	66.628.284.3-407.000	2014	51,128,369
52	PT. SURYA SENTOSA	66.307.102.5-411.000	2014	196,587,736
53	PT. TATA SURYA KENCANA	03.345.203.8-411.000	2014	99,732,400
54	PT. TEKNO LISTRIK	03.343.173.5-411.000	2014	129,669,300
55	PT. TIRTA BAROKAH NUSANTARA	66.896.485.1-407.000	2014	194,371,740
56	PT. USAHA MITRA BERSAMA	03.268.103.3-008.000	2013	47,055,000
57	PT. VADILTAMA GAPSONINDO	03.315.697.7-017.000	2014	120,024,400
58	PT. XOIXE KARYA TAMA	66.890.242.2-407.000	2014	43,460,500
	Grand Total			4,467,625,516

Halaman 97 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



➤ Tahun 2015 :

No	NAMA	NPWP	THN	Nilai PPN
1	PT. ARWANITO SEMBADA	72.184.141.9-411.000	2015	149,055,800
2	PT. BUNGA SARI ALAMANDA	72.190.139.5-411.000	2015	44,895,800
3	PT. DWI RANDU Cipta	70.089.481.9-412.000	2015	210,075,235
4	PT. HARUM BINTANG SEJATI	72.102.714.2-411.000	2015	71,020,972
5	PT. HARUMI CAHAYA Cipta	72.183.557.7-411.000	2015	80,205,100
6	PT. HARWAN DWI PERKASA	72.109.919.0-411.000	2015	46,552,000
7	PT. HUMALA PERSADA JAYA	72.789.242.4-411.000	2015	89,502,400
8	PT. KASTURI INDO WIDURI	70.113.797.8-412.000	2015	137,703,500
9	PT. KHARISMA BERDIKARI JUNUNAN	72.110.007.1-411.000	2015	79,819,240
10	PT. MAHATA SENTOSA	72.190.210.4-411.000	2015	154,092,426
11	PT. MANGGALA BRAGA BAJA	72.115.946.5-411.000	2015	129,596,500
12	PT. MATUMONA INDAH KARYA	72.740.882.5-411.000	2015	51,697,500
13	PT. METALINDO MAKSIMA	66.792.343.7-016.000	2015	43,788,480
14	PT. PERDANA SIANITA	70.113.754.9-412.000	2015	49,183,900
15	PT. RAMA KIANI RAYA	66.815.699.5-016.000	2015	40,808,704
16	PT. SUKAMULYA PERKASA DANA	70.113.700.2-412.000	2015	48,191,000
	Grand Total			1,426,188,557

Sehingga total jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu :

No	Unit Kantor	Masa Pajak	Jumlah
1	PT OPETRO Pusat	Mei 2013 s.d Des 2014	11,291,021,805
2	PT OPETRO Pusat	Jan s.d Des 2015	6,198,164,836
3	PT OPETRO cabang Jakarta Ampere	Sept 2011 s.d April 2013	1,147,397,875
4	PT OPETRO cabang Lampung	Peb 2013 s.d Des 2014	4,467,625,516
5	PT OPETRO cabang Lampung	Jan s.d Des 2015	1,426,188,557
	GRAND TOTAL		24.530.398.589

- Bahwa, perbuatan mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY selama kurun waktu tahun 2011 s.d 2015, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, karena seluruh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dijadikan sebagai UNSUR PENGURANG dari PPN yang telah dipungut melalui faktur pajak keluaran yang diserahkan PT. OCEAN PETRO ENERGY ke pembeli (customer) atau dengan kata lain Hak Negara atas PPN yang dipungut PT. OCEAN PETRO ENERGY



menjadi berkurang sebesar faktur pajak yang digunakan atau dikreditkan, yaitu :

No	Unit Kantor	Masa Pajak	Jumlah
1	PT OPETRO Pusat	Mei13 s.d Des 2014	11,291,021,805
2	PT OPETRO Pusat	Jan s.d Des 2015	6,198,164,836
3	PT OPETRO cabang Jakarta	Sept 2011 s.d April 2013	1,147,397,875
4	PT OPETRO cabang Lampung	Peb 2013 s.d Des 2014	4,467,625,516
5	PT OPETRO cabang Lampung	Jan s.d Des 2015	1,426,188,557
	GRAND TOTAL		24.530.398.589

(terbilang dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :

KESATU:

Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU,

KEDUA :

Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali

Halaman 99 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
3. Yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan
4. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai tindakan yang dilanjutkan

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Bonaventura Dwi Windu yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (error in persona), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 dan 3

- **Unsur Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**
- **Yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan**

Menimbang bahwa kesengajaan (opzet) secara umum mempunyai tiga bentuk yaitu:

- Opzet sebagai tujuan
Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan “tujuan” dari pelaku
- Opzet dengan tujuan pasti atau yang merupakan keharusan
Bentuk opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang



tidak dikehendaki);

- Opzet dengan kesadaran dan kemungkinan

Opzet ini juga disebut dengan “opzet dengan syarat” (*voordardelijk opzet*) atau disebut juga *dolus eventualis*;

Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh Undang Undang.

Terhadap akibat lain yang bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya ;

Menimbang, bahwa Faktur pajak menurut pasal 1 angka 23 dan pasal 9 UU PPN adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau suatu bukti adanya Pajak Masukan bagi PKP Pembeli yang kemudian dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak Keluaran sehingga mengurangi kewajiban PPN Kurang Bayar yang harus disetorkan kepada kas Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4, Pasal 1 A dan pasal 13 ayat (1) dan (1a) UU PPN, Faktur Pajak harus dibuat atau diterbitkan atas dasar adanya transaksi yang sebenarnya berupa penyerahan BKP/JKP dan/atau ekspor, untuk itu Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap: a) penyerahan Barang Kena Pajak, b) penyerahan Jasa Kena Pajak, c) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau d) ekspor Jasa Kena Pajak;

Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang benar secara formal apabila telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan yaitu harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak;
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. PPN yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;

Halaman 101 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang benar secara material apabila keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti, yaitu :

- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan PT. Ocean Petro Energy dengan jabatan selama kurun waktu tahun 2011 s.d. 2015 adalah sebagai Manager Operasional dan Logistik dan terdakwa diangkat berdasarkan keputusan direksi PT. OCEAN PETRO ENERGY;
- Bahwa, tugas terdakwa sebagai Manajer Operasional dan Logistic adalah mengurus stock BBM kantor pusat dan pengiriman barang ke customer serta mengkoordinir laporan penjualan kantor pusat;
- Bahwa, kegiatan usaha PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah perdagangan BBM solar Industri atau yang dikenal dengan HSD dan Solar HSD tersebut dibeli dari perusahaan rekanan PERTAMINA untuk dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan industri yang ada di JABODETABEK;
- Bahwa, cabang-cabang PT. OCEAN PETRO ENERGY ada di Surabaya, Lampung dan lain-lain dan semua cabang sudah dikukuhkan menjadi Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang membuat SPT dan membayar PPN;
- Bahwa, pada tahun 2011, saksi Sonny diminta oleh pak DIDIT selaku Direktur PT. OCEAN PETRO ENERGY pada saat itu untuk mencari konsultan pajak untuk mengurus masalah perpajakan karena sejak berdiri tahun 2009 PT. OCEAN PETRO ENERGY belum pernah melaporkan kewajiban perpajakan.
- Bahwa, kemudian saksi Sony mengajak BUDI SATRIO, untuk bertemu dengan Terdakwa dan EDWYN NOOR LODAYANA dengan maksud menawarkan jasa BUDI SATRIO sebagai konsultan pajak untuk membantu menyelesaikan kewajiban perpajakan PT. OCEAN PETRO ENERGY. Pertemuan dan perkanalan tersebut dilakukan di kantor PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCEAN PETRO ENERGY di jalan L, Komplek Polri, Ampera, Jakarta Selatan;

- Bahwa pada tahun 2012, Budi Satrio dihubungi oleh PT. Ocean Petro Energy melalui Direktur Edwin Noor Lodaya, Sony dan Terdakwa untuk melanjutkan pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya namun untuk kepentingan PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat, cabang Ampera Jakarta dan cabang Lampung. Atas pesanan faktur pajak tersebut, PT. Ocean Petro Energy, yaitu Edwin, Sony dan Terdakwa sudah menentukan imbalan Budi Satrio dan ABDUL CHALID yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% (dihitung dari imbalan atau fee jual beli faktur pajak setelah dikurangi setoran PPN ke kantor pajak atau SSP);
- bahwa, kemudian pemesanan faktur masukan yang tidak benar tersebut berlanjut
- Bahwa, proses pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - PT. Ocean Petro Energy melalui Terdakwa atau HERWIN alias AWIN, mengirimkan rekapitulasi berupa rincian pemesanan faktur pajak masukan melalui email herwinopetro@gmail.com ke alamat email Budi Satrio yaitu s.tama66@yahoo.com dan alamat email AFEN (staf Budi Satrio) afen_konsult@yahoo.com. Setelah dikirim, Pt. Ocean Petro Energy melalui Terdakwa atau HERWIN akan mengkonfirmasi kepada saksi Budi Satrio atau staff i bernama A FEN;
 - Selanjutnya saksi meneruskan email dari PT. Ocean Petro Energy yang dikirim HERWIN alias AWIN tersebut ke alamat email ABDUL CHALID alias TENGKU cantik.geulis@yahoo.com. kemudian saksi atau A FEN akan menghubungi ABDUL CHALID alias TENGKU perihal pesanan faktur pajak dari PT. Ocean Petro Energy
- Bahwa, Untuk pengiriman faktur pajak yang sudah selesai dari ABDUL CHALID, apabila masih dalam waktu normal setiap tanggal 5 maka faktur pajak dikirim via pos atau TIKI ke kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan Ampera, Jakarta Selatan akan tetapi apabila waktunya sudah di atas tanggal 10 maka faktur pajak diantar ke kantor konsultan pajak Budi Satrio, di alamat Ruko Petersburg, Gading

Halaman 103 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong, Tangerang kemudian dikirim melalui kurir ke PT. OCEAN PETRO ENERGY;

- Bahwa, faktur pajak untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Lampung dan Surabaya dikirim ke kantor pusat PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan Ampera, Jakarta Selatan. Sebelumnya saksi dihubungi PT. Ocean Petro Energy melalui Terdakwa atau setelah faktur pajak diterima oleh Terdakwa atau HERWIN alias AWIN;
- Bahwa, faktur pajak yang dikirim disertai lampirannya yaitu invoice, tanda terima dan surat jalan;
- Bahwa, faktur pajak yang dikirim disertai lampirannya yaitu invoice, tanda terima dan surat jalan;
- Bahwa, di PT. Ocean Petro Energy pegawai yang bertugas mengisi pajak adalah Saksi Galih Paramandana dan saksi Agung Prayitno yang menerangkan bahwa dalam Menyusun SPT tahunan PT. Ocean Petro Energy mereka mendapatkan data untuk penjualan (faktur pajak keluaran) dari Nico sedangkan data pembelian (faktur pajak masukan) diperoleh dari Herwin (Alm) atau Terdakwa dalam map-map yang sudah ditandai untuk kantor pusat/cabang dengan instruksi agar faktur pajak tersebut dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. Ocean Petro Energy;
- Bahwa, SPT Masa PPN PT. Ocean Petro Energy ditandatangani oleh Saksi Edwin Noor Lodayana selaku Direktur;
- Bahwa, rekening bank yang dimiliki oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah rekening Bank Mandiri a.n. PT. OCEAN PETRO ENERGY, yang digunakan untuk menampung fee KSO. Perusahaan juga menggunakan rekening BCA pribadi Terdakwa a.n. BONAVENTURA DWI WINDU, untuk menampung fee penjualan;
- Bahwa, rekening BCA Terdakwa a.n. BONAVENTURA DWI WINDU yang digunakan untuk menampung fee penjualan tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan PT OCEAN PETRO ENERGY dan rekening ini yang digunakan untuk membayar fee 40% kepada Budi Satrio, Tengku Chalid melalui rekening A Fen untuk membeli faktur-faktur pajak yang tidak sebenarnya yang digunakan oleh PT Ocean Petro Energy;
- Bahwa, sejak tahun 2015 PT. OCEAN PETRO ENERGY telah berhenti memesan faktur pajak kepada ABDUL CHALID alias TENGGU karena ada pemeriksaan dari Kantor Pajak terkait faktur pajak masukan yang dikreditkan oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY.

Halaman 104 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, perbuatan mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY selama kurun waktu tahun 2011 s.d 2015, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, karena seluruh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dijadikan sebagai UNSUR PENGURANG dari PPN yang telah dipungut melalui faktur pajak keluaran yang diserahkan PT. OCEAN PETRO ENERGY ke pembeli (customer) atau dengan kata lain Hak Negara atas PPN yang dipungut PT. OCEAN PETRO ENERGY menjadi berkurang sebesar faktur pajak yang digunakan atau dikreditkan, yaitu :

No	Unit Kantor	Masa Pajak	Jumlah
1	PT OPETRO Pusat	Mei 13 s.d Des 2014	11,291,021,805
2	PT OPETRO Pusat	Jan s.d Des 2015	6,198,164,836
3	PT OPETRO cabang Jakarta	Sept 2011 s.d April 2013	1,147,397,875
4	PT OPETRO cabang Lampung	Peb 2013 s.d Des 2014	4,467,625,516
5	PT OPETRO cabang Lampung	Jan s.d Des 2015	1,426,188,557
	GRAND TOTAL		24.530.398.589

(terbilang dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan pengurus dan pegawai PT. Ocean Petro Energy yang memesan Faktur Pajak, Bukti Pemungutan Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, dan/atau Bukti Setoran Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dari saksi Budi Satrio, Tengku Khalid dan Afen lalu menggunakannya sebagai pajak masukan PT. Ocean Petro Energy sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar PT. Ocean Petro Energy telah memenuhi unsur “Dengan sengaja menggunakan faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” dan “dilakukan secara bersama-sama”;

Ad. 4. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai tindakan yang dilanjutkan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ;

- Bahwa, pada tahun 2011, saksi Sonny diminta oleh pak DIDIT selaku Direktur PT. OCEAN PETRO ENERGY pada saat itu untuk mencari konsultan pajak untuk mengurus masalah perpajakan karena sejak berdiri tahun 2009 PT. OCEAN PETRO ENERGY belum pernah melaporkan kewajiban perpajakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi Sony mengajak BUDI SATRIO, untuk bertemu dengan Terdakwa dan EDWYN NOOR LODAYANA dengan maksud menawarkan jasa BUDI SATRIO sebagai konsultan pajak untuk membantu menyelesaikan kewajiban perpajakan PT. OCEAN PETRO ENERGY. Pertemuan dan perkanalan tersebut dilakukan di kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan L, Komplek Polri, Ampera, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tahun 2012, Budi Satrio dihubungi oleh PT. Ocean Petro Energy melalui Direktur Edwin Noor Lodaya, Sony dan Terdakwa untuk melanjutkan pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya namun untuk kepentingan PT. OCEAN PETRO ENERGY Pusat, cabang Ampera Jakarta dan cabang Lampung. Atas pesanan faktur pajak tersebut, PT. Ocean Petro Energy, yaitu Edwin, Sony dan Terdakwa sudah menentukan imbalan Budi Satrio dan ABDUL CHALID yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% (dihitung dari imbalan atau fee jual beli faktur pajak setelah dikurangi setoran PPN ke kantor pajak atau SSP);
- bahwa, kemudian pemesanan faktur masukan yang tidak benar tersebut berlanjut
- Bahwa, proses pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - PT. Ocean Petro Energy melalui Terdakwa atau HERWIN alias AWIN, mengirimkan rekapitulasi berupa rincian pemesanan faktur pajak masukan melalui email herwinopetro@gmail.com ke alamat email Budi Satrio yaitu s.tama66@yahoo.com dan alamat email AFEN (staf Budi Satrio) afen_konsult@yahoo.com. Setelah dikirim, Pt. Ocean Petro Energy melalui Terdakwa atau HERWIN akan mengkonfirmasi kepada saksi Budi Satrio atau staff i bernama A FEN;
 - Selanjutnya saksi meneruskan email dari PT. Ocean Petro Energy yang dikirim HERWIN alias AWIN tersebut ke alamat email ABDUL CHALID alias TENGKU cantik.geulis@yahoo.com. kemudian saksi atau A FEN akan menghubungi ABDUL CHALID alias TENGKU perihal pesanan faktur pajak dari PT. Ocean Petro Energy
- Bahwa, Untuk pengiriman faktur pajak yang sudah selesai dari ABDUL CHALID, apabila masih dalam waktu normal setiap tanggal 5 maka

Halaman 106 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



faktur pajak dikirim via pos atau TIKI ke kantor PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan Ampera, Jakarta Selatan akan tetapi apabila waktunya sudah di atas tanggal 10 maka faktur pajak diantar ke kantor konsultan pajak Budi Satrio, di alamat Ruko Petersburg, Gading Serpong, Tangerang kemudian dikirim melalui kurir ke PT. OCEAN PETRO ENERGY;

- Bahwa, faktur pajak untuk PT. OCEAN PETRO ENERGY cabang Lampung dan Surabaya dikirim ke kantor pusat PT. OCEAN PETRO ENERGY di jalan Ampera, Jakarta Selatan. Sebelumnya saksi dihubungi PT. Ocean Petro Energy melalui Terdakwa atau setelah faku pajak diterima oleh Terdakwa atau HERWIN alias AWIN;
- Bahwa, faktur pajak yang dikirim disertai lampirannya yaitu invoice, tanda terima dan surat jalan;
- Bahwa, faktur pajak yang dikirim disertai lampirannya yaitu invoice, tanda terima dan surat jalan;
- **Bahwa, di PT. Ocean Petro Energy pegawai yang bertugas mengisi pajak adalah Saksi Galih Paramandana dan saksi Agung Prayitno yang menerangkan bahwa dalam Menyusun SPT tahunan PT. Ocean Petro Energy mereka mendapatkan data untuk penjualan (faktur faktur pajak keluaran) dari Nico sedangkan data pembelian (faktur pajak masukan) diperoleh dari Herwin (Alm) atau Terdakwa dalam map-map yang sudah ditandai untuk kantor pusat/cabang dengan instruksi agar faktur pajak tersebut dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. Ocean Petro Energy;**
- **Bahwa, SPT Masa PPN PT. Ocean Petro Energy ditandatangani oleh Saksi Edwin Noor Lodayana selaku Direktur;**
- Bahwa, rekening bank yang dimiliki oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY adalah rekening Bank Mandiri a.n. PT. OCEAN PETRO ENERGY, yang digunakan untuk menampung fee KSO. Perusahaan juga menggunakan rekening BCA pribadi Terdakwa a.n. BONAVENTURA DWI WINDU, untuk menampung fee penjualan;
- Bahwa, rekening BCA Terdakwa a.n. BONAVENTURA DWI WINDU yang digunakan untuk menampung fee penjualan tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan PT OCEAN PETRO ENERGY. Dan rekening ini yang digunakan untuk membayar fee 40% kepada Budi Satrio, Tengku Chalid melalui rekening A Fen untuk membeli faktur-faktur pajak yang tidak sebenarnya yang digunakan oleh PT Ocean Petro Energy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2015 PT. OCEAN PETRO ENERGY telah berhenti memesan faktur pajak kepada ABDUL CHALID alias TENGKU karena ada pemeriksaan dari Kantor Pajak terkait faktur pajak masukan yang dikreditkan oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY.
- Bahwa, perbuatan mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY selama kurun waktu tahun 2013 s.d 2015, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, karena seluruh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dijadikan sebagai UNSUR PENGURANG dari PPN yang telah dipungut melalui faktur pajak keluaran yang diserahkan PT. OCEAN PETRO ENERGY ke pembeli (customer) atau dengan kata lain Hak Negara atas PPN yang dipungut PT. OCEAN PETRO ENERGY menjadi berkurang sebesar faktur pajak yang digunakan atau dikreditkan,

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan pengurus dan pegawai PT. Ocean Petro Energy sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang memesan Faktur Pajak, Bukti Pemungutan Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, dan/atau Bukti Setoran Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dari saksi Budi Satrio, Tengku Khalid dan Afen lalu menggunakannya sebagai pajak masukan PT. Ocean Petro Energy sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar PT. Ocean Petro Energy yang dilakukan berulang-ulang, dimana sampai tahun 2015 PT. OCEAN PETRO ENERGY telah berhenti memesan faktur pajak kepada ABDUL CHALID alias TENGKU karena ada pemeriksaan dari Kantor Pajak terkait faktur pajak masukan yang dikreditkan oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY, maka dengan demikian unsur “dilakukan sebagai perbuatan berlanjut” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan,

Halaman 108 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka pembelaan tersebut harus dikesampingkan, sedangkan permohonan agar memberi putusan yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa surat-surat untuk selanjutnya Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti Nomor Urut 1 dan 4 dikembalikan kepada Penyidik PPNS DJP Pusat, sedangkan Nomor Urut 2,3,5,6 dan 7 dipergunakan dalam berkas perkara atas nama EDWYN NOOR LODAYANA.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39A UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, maka selain dijatuhi dipidana penjara juga Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Majelis juga akan menjatuhkan denda yaitu 2(dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang dalam hal ini sebesar faktur transaksi tidak benar yang dapat dibuktikan dan telah digunakan Terdakwa bersama-sama dengan pengurus dan pegawai PT. Ocean Petra Energy yang lain dengan cara mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya oleh PT. OCEAN PETRO ENERGY selama kurun waktu tahun 2011 s.d 2015, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yaitu :

No	Unit Kantor	Masa Pajak	Jumlah
1	PT OPETRO Pusat	Mei 13 s.d Des 2014	11,291,021,805
2	PT OPETRO Pusat	Jan s.d Des 2015	6,198,164,836
3	PT OPETRO cabang Jakarta	Sept 2011 s.d April 2013	1,147,397,875
4	PT OPETRO cabang Lampung	Peb 2013 s.d Des 2014	4,467,625,516
5	PT OPETRO cabang Lampung	Jan s.d Des 2015	1,426,188,557
	GRAND TOTAL		24.530.398.589

Halaman 109 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



(terbilang dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);,

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana denda, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutan, bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka harta Terdakwa dalam jangka waktu satu bulan sejak putusannya telah mempunyai kekuatan hukum, hartanya akan disita dan dilelang untuk membayar dendanya, oleh karena setelah diteliti dan dipelajari tuntutan pengganti denda yang demikian tersebut, belum diatur/ tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Perpajakan, maka apabila Hakim mengikuti, akan melanggar Azas dalam Hukum Pidana karena Tiada satupun perbuatan yang dapat dihukum, kecuali telah ada Undang-undang yang mengaturnya, oleh karena itu berpedoman dalam pasal 103 KUHP dalam bab I, apabila belum diatur di dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang perpajakan, maka dapatlah diberlakukan ketentuan Umum KUHP, oleh karena itu tentang denda penggantinya telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dalam pendapatan negara sector pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah seorang pegawai di PT. Ocean Petro Energy ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 110 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BONAVENTURA DWI WINDU tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : “Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan secara Bersama-sama secara berlanjut“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 6(enam) bulan** dan denda sebesar *2(dua) X Rp. 24.530.398.589,- (dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) = = Rp 49.060.797.178,- (empat puluh Sembilan milyar enam puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.		Penetapan Pengadilan Nomor : 267/Pen.Pid/2019/PN.Tjk tanggal 25 Februari 2019
	PRIN-10.SITA/PJ.052/2019 tanggal 15 Februari 2019	<p>9) Fotocopy Print Out SI DJP Penyampaian SPT PPN PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 Masa Januari 2013 s.d. Desember 2015 sebanyak 3 (tiga) lembar</p> <p>10) Fotocopy SPT PPN Masa Pebruari s.d. Juni 2013 dan Agustus s.d. Desember 2013 Normal dan Pembetulan PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) set</p> <p>11) Fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. Desember 2014 Normal dan Pembetulan PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) set</p> <p>12) Fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. Agustus 2015 Normal dan Pembetulan PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 10 (sepuluh) set</p> <p>13) Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar NPWP No. PEM-00030/ WPJ.28/KP.0303/2013 a.n. PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 1 (satu) lembar</p> <p>14) Fotocopy Surat Pengukuhan PKP No. PEM-00044/WPJ.28/KP.0303/ 2013 tanggal 15 Januari 2013 a.n. PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 1 (satu) lembar</p> <p>15) Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi PKP NO. LHV-04/WPJ.28/ KP.03/2012 sebanyak 5 (lima) lembar</p> <p>16) Fotocopy Print Out SI DJP Kewajiban Perpajakan a.n. PT OCEAN PETRO ENERGY NPWP 02.869.782.9-322.001 sebanyak 1 (satu) lembar</p>
2.		Penetapan Pengadilan Nomor : 358/Pen.Pid/2019/PN Bdg tanggal 15 Maret 2019

Halaman 111 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRIN-14.SITA/PJ.05 2/2019 tanggal 18 Februari 2019	3) Fotokopi Rekening Koran BCA Nomor 7360261446 a.n. ABDUL CHALID, S.E sebanyak 1 (satu) set 4) Fotokopi buku catatan penjualan faktur sebanyak 1 (satu) set
3.		Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 16 April 2019
	PRIN-17.SITA/PJ.05 2/2019 tanggal 20 Februari 2019	5) Fotocopy Legalitas PT OCEAN PETRO ENERGY tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set 6) Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 14453K/10DJM.O/2009 sebanyak 1 (satu) set 7) Fotocopy Kuasa Usaha No. 021/SKU-SMD/OPETRO/XI/2012 sebanyak 1 (satu) set 8) Fotocopy Kuasa Usaha No. 072/SKU-LMP/OPETRO/IV/2016 sebanyak 1 (satu) set
4.		Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 16 April 2019
	PRIN-20.SITA/PJ.05 2/2019 tanggal 19 Maret 2019	12) Fotocopy Draft Laporan Penjualan PT Ocean Petro Energy Cab. Lampung bulan Pebruari-Mei dan Oktober-Desember tahun 2013 sebanyak 7 (tujuh) lembar 13) Fotocopy Draft Laporan Penjualan PT Ocean Petro Energy Cab. Lampung bulan Januari-Pebruari tahun 2014 sebanyak 2 (dua) lembar 14) Fotocopy Draft Laporan Penjualan PT Ocean Petro Energy Cab. Lampung bulan Januari-Pebruari dan Agustus tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) lembar 15) Fotocopy SPT PPN Masa Pebruari s.d. Juni dan Oktober s.d. Desember tahun 2013 status Normal dan Pembetulan 1, 2 dan 3 sebanyak 21 (dua puluh satu) set 16) Fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. Desember tahun 2014 status Normal dan Pembetulan 1, 2, 3, 4 dan 5 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) set 17) Fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. Desember tahun 2015 status Normal dan Pembetulan 1 sebanyak 17 (tujuh belas) set 18) Fotocopy Faktur Pajak No.010001-14.82249113, Invoice dan Surat Jalan No. 9113/MPS/I/06/2014 sebanyak 3 (tiga) lembar 19) Fotocopy Print Out Email dr herwinopetro@gmail.com ke Opetro Lampung perihal Faktur IN OPE Lampung bulan Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set 20) Fotocopy Print Out Email dr herwinopetro@gmail.com ke Opetro Lampung perihal Faktur IN OPE Lampung bulan Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) set 21) Fotocopy Faktur Pajak Masukan PT Ocean Petro Energy bulan Mei 2015 sebanyak 1 (satu) set 22) Fotocopy Faktur Pajak Masukan PT Ocean Petro Energy bulan Juni 2015 sebanyak 1 (satu) set
5.		Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 16 April 2019
	PRIN-23.SITA/PJ.05 2/2019 tanggal	24) Fotocopy Print Out Rekening Koran No. 5425011666 a.n. Bonaventura Dwi Windu tgl. 29-Mar-2010 sd 16-Des-2016 sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar

Halaman 112 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2019	<p>25) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.001) bulan Januari 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>26) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.001) bulan Pebruari 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>27) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.001) bulan Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>28) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.001) bulan April 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>29) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>30) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>31) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>32) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>33) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan September 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>34) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>35) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Nopember 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>36) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>37) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>38) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Pebruari 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>39) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy bulan Maret 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>40) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan April 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>41) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Mei 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>42) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Juni 2014</p>
---------------	---

Halaman 113 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebanyak 1 (satu) set 43) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Juli 2014 sebanyak 1 (satu) set 44) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) set 45) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan September 2014 sebanyak 1 (satu) set 46) Fotocopy faktur pajak, invoice dan surat jalan a.n. pembeli PT Ocean Petro Energy (02.869.782.9-012.000) bulan Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set
6.		Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 16 April 2019
	PRIN-38.SITA/PJ.052/2019 tanggal 2 April 2019	67) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00210/WPJ.04/KP.0403/2013 sebanyak 1 (satu) lembar 68) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00585/WPJ.04/KP.0403/2013 sebanyak 1 (satu) lembar 69) Fotokopi Surat Permintaan Sertifikat Elektronik Nomor 079/ADM-TAX/OPETRO/VI/2015 sebanyak 1 (satu) set 70) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak September 2011 sebanyak 1 (satu) set 71) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Oktober 2011 sebanyak 1 (satu) set 72) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak November 2011 sebanyak 1 (satu) set 73) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Desember 2011 sebanyak 1 (satu) set 74) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Januari 2012 sebanyak 1 (satu) set 75) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Februari 2012 sebanyak 1 (satu) set 76) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2012 sebanyak 1 (satu) set 77) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak April 2012 sebanyak 1 (satu) set 78) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Mei 2012 sebanyak 1 (satu) set 79) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Juni 2012 sebanyak 1 (satu) set 80) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP

Halaman 114 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Juli 2012 sebanyak 1 (satu) set
		81) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Juli 2012 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		82) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Agustus 2012 sebanyak 1 (satu) set
		83) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak September 2012 sebanyak 1 (satu) set
		84) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) set
		85) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak November 2012 sebanyak 1 (satu) set
		86) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Desember 2012 sebanyak 1 (satu) set
		87) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Januari 2013 sebanyak 1 (satu) set
		88) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Februari 2013 sebanyak 1 (satu) set
		89) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set
		90) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak April 2013 sebanyak 1 (satu) set
		91) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak April 2013 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		92) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set
		93) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set
		94) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juni 2013 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		95) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set
		96) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juli 2013 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		97) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Agustus 2013 sebanyak 1

Halaman 115 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(satu) set
		98) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak September 2013 sebanyak 1 (satu) set
		99) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set
		100) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak November 2013 sebanyak 1 (satu) set
		101) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set
		102) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set
		103) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Februari 2014 sebanyak 1 (satu) set
		104) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2014 sebanyak 1 (satu) set
		105) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak April 2014 sebanyak 1 (satu) set
		106) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Mei 2014 sebanyak 1 (satu) set
		107) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juni 2014 sebanyak 1 (satu) set
		108) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juli 2014 sebanyak 1 (satu) set
		109) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) set
		110) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak September 2014 sebanyak 1 (satu) set
		111) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set
		112) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Oktober 2014 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		113) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak November 2014 sebanyak 1 (satu) set
		114) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set

Halaman 116 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



		115) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2014 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		116) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Januari 2015 sebanyak 1 (satu) set
		117) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Januari 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		118) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Februari 2015 sebanyak 1 (satu) set
		119) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Februari 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		120) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2015 sebanyak 1 (satu) set
		121) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.001 Masa Pajak Maret 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		122) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak April 2015 sebanyak 1 (satu) set
		123) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Mei 2015 sebanyak 1 (satu) set
		124) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juni 2015 sebanyak 1 (satu) set
		125) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Juli 2015 sebanyak 1 (satu) set
		126) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) set
		127) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak September 2015 sebanyak 1 (satu) set
		128) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Oktober 2015 sebanyak 1 (satu) set
		129) Print out SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak November 2015 sebanyak 1 (satu) set
		130) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak November 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
		131) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP 02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2015 sebanyak 1 (satu) set
		132) Fotocopy SPT PPN PT Ocean Petro Energy NPWP



		02.869.782.9-012.000 Masa Pajak Desember 2015 (Pembetulan ke-1) sebanyak 1 (satu) set
7.		Penetapan Pengadilan Nomor : 1655/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 09 Juli 2019
		5) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-8670/WPJ.14/KP.1303/2009 tanggal 01 April 2009 sebanyak 1 (satu) lembar 6) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-880WPJ.14/KP.1303/2009 tanggal 22 Juli 2009 sebanyak 1 (satu) lembar 7) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-03208/WPJ.04/KP.1203/2009 tanggal 13 November 2009 sebanyak 1 (satu) lembar 8) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-03256WPJ.04/KP.1203/2009 tanggal 13 November 2009 sebanyak 1 (satu) lembar

Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti Nomor Urut 1 dan 4 dikembalikan kepada Penyidik PPNS DJP Pusat, sedangkan Nomor Urut 2,3,5,6 dan 7 dipergunakan dalam berkas perkara atas nama EDWYN NOOR LODAYANA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari RABU, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Toto Ridarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Florensani Susana Kendenan, S.H..MH, Arlandi Triyogo, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 25 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrinaini, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Agus Harmain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Florensani Susana Kendenan, S.H..MH Toto Ridarto, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Halaman 118 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Syafrinaini, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)